

# Akuntabilitas

*Jurnal Ilmu Akuntansi*

Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berkala Ilmiah ini fokus dalam kajian ilmu akuntansi, terbit dua kali dalam satu tahun. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi telah terakreditasi Peringkat 4 oleh Kemenristek Dikti berdasarkan SK No. 14/E/KPT/2019 (berlaku sampai Volume 15 (1), Tahun 2023).

## **Pemimpin Redaksi**

Fitri Yani Jalil

## **Redaktur Pelaksana**

Ade Suherlan

Ismawati Haribowo

M. Nur Rianto Al Arif

## **Redaksi Ahli**

Amilin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Dian Agustia (Universitas Airlangga)

Doddy Setiawan (Universitas Sebelas Maret)

Iwan Triuwono (Universitas Brawijaya)

M. Nur Rianto Al Arif (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Tulus Suryanto (UIN Raden Intan Lampung)

Yuliansyah (Universitas Lampung)

Unggul Purwohedi (Universitas Negeri Jakarta)

## **Penyunting**

Renti Damayanti

## **Desain Grafis**

Yenni Arini Amalia

## **Sekretariat**

Sri Atfiah

Marwiyati

## **Alamat Redaksi**

Gedung II Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ibn Taimiyah IV, Ciputat 15412 Telp. (021) 7493318, Fax. (021) 7496006

Email: [akuntabilitas@uinjkt.ac.id](mailto:akuntabilitas@uinjkt.ac.id),

Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas>

## Daftar Isi

<b>Kausalitas Mental Accounting dan Pengambilan Keputusan Investasi Mesin Produksi: Suatu Studi Eksperimen .....</b>	<b>145</b>
Fadlil Abdani, Fajar Nurdin	
<b>Pengujian Teori <i>Fraud Pentagon</i> Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia.....</b>	<b>157</b>
I Made Laut Mertha Jaya, Ajeng Ayu Ambarwati Poerwono	
<b>Tanggung Jawab Sosial Universitas dan Tata Kelola Universitas Terhadap Citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .....</b>	<b>169</b>
Atiqah	
<b>Variabel Fundamental Perusahaan Dalam Memprediksi <i>Keputusan Hedging</i>.....</b>	<b>179</b>
Sofyan Hadinata, Diah Anggari Hardianti	
<b>Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia .....</b>	<b>191</b>
Azizah Kartika Rahmawati, S.R. Kartika Sari, Herry Hermawan	
<b>Effect of Risk Based Bank Rating on Financial Performance of Sharia Commercial Banks .....</b>	<b>201</b>
Diah Munawaroh, Peny Cahaya Azwari	
<b>Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Environmental Disclosure</i>.....</b>	<b>215</b>
Eny Suprapti, Farhan Achmad Fajari, Achmad Syaiful Hidayat Anwar	
<b>Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang .....</b>	<b>227</b>
Suluh Hendrawan, Nur Anisah, Lina Nasihatun Nafidah	
<b>Peningkatan Akuntabilitas Publik Melalui Sistem Informasi Akuntansi pada Pondok Pesantren Salafiyah .....</b>	<b>237</b>
Dwi Sulistiani	
<b>Studi Fenomenologis Tentang Implementasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Badan Hukum di Indonesia .....</b>	<b>249</b>
Yusar Sagara, Santi Yustini	

## **Kausalitas Mental Accounting dan Pengambilan Keputusan Investasi Mesin Produksi: Suatu Studi Eksperimen**

**Fadlil Abdani<sup>1\*</sup>, Fajar Nurdin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

<sup>1</sup>fadlilabdani@uin-malang.ac.id, <sup>2</sup>nurdin.fajar@uin-malang.ac.id

<sup>\*</sup>Penulis Korespondensi

### **Abstract**

This research is included in the true experiment which aims to test the main effect and the interaction effect of mental accounting and self efficacy on investment decisions on production machinery. The method used is the true experiment, with the design of 2 x 2 between subjects that uses two levels of mental accounting (existing or absent) and two levels of self efficacy (high or low). Statistical tests are used with ANOVA, for the first and second hypotheses using One Way Analysis of Variance and for the third hypothesis using Two Way Analysis of Variance. The results of the study found that mental accounting proved to influence the investment decision making of production machinery. Self efficacy is also proven to have an effect on investment decisions in production machinery. While the interaction effect between mental accounting and self efficacy does not affect the investment decision making of a production machine.

**Keywords:** mental accounting, self efficacy, behavioral accounting, decision making

### **Abstrak**

Penelitian ini termasuk dalam true experiment yang bertujuan untuk menguji main effect maupun interaction effect variabel mental accounting dan self efficacy terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi. Metode yang digunakan adalah true experiment, dengan desain 2 x 2 between subject yang menggunakan dua level kondisi mental accounting (ada atau tidak ada) dan dua level kondisi self efficacy (tinggi atau rendah). Uji statistik yang digunakan dengan Analysis of Variance (ANOVA), untuk hipotesis pertama dan kedua menggunakan One Way Analysis of Variance dan untuk hipotesis ketiga menggunakan Two Way Analysis of Variance. Hasil penelitian menemukan bahwa mental accounting terbukti berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi. Self efficacy juga terbukti berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi. Sementara efek interaksi antara mental accounting dan self efficacy tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi.

**Kata Kunci:** *mental accounting, self efficacy, behavioral accounting*, pengambilan keputusan

## PENDAHULUAN

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan untuk mengelola organisasi agar dapat menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan kompetitornya. Berada dalam suatu industri yang kompetitif mengharuskan suatu perusahaan memiliki daya saing tersendiri, sehingga perusahaan dapat bertahan ataupun dapat lebih unggul. Salah satu cara menghadapi persaingan adalah dengan menganalisis bagaimana kekuatan karakteristik suatu industri, Porter (1989) menggambarkan "*Five Force Model*" sebagai alat analisis suatu industri, meliputi; ancaman pendatang baru, kekuatan tawar menawar pemasok, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar menawar pembeli, dan persaingan di antara anggota industri. Tuntutan perusahaan yang ada dalam industri tersebut untuk bersaing menimbulkan pelbagai alternatif pengambilan keputusan strategi bisnis sesuai dengan tujuan perusahaan, baik itu pengambilan keputusan pada internal perusahaan berupa; inovasi hasil produksi atau investasi alat-alat produksi, maupun pengambilan keputusan eksternal berupa; investasi di pasar modal guna memperoleh dana untuk operasional perusahaan.

Salah satu alternatif dalam pengambilan keputusan, berupa keputusan investasi internal maupun eksternal menjadi hal penting untuk masa depan perusahaan. Pengambilan keputusan investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dapat dipandang dari 2 (dua) sisi, yakni pengambilan keputusan investasi (eksternal) yang merupakan pengambilan keputusan investasi melalui transaksi jual beli surat berharga di bursa efek yang bertujuan untuk mendistribusikan atau menghimpun modal dari pihak luar. Sedangkan pengambilan keputusan investasi dari sudut pandang (internal) perusahaan merupakan pengambilan keputusan investasi untuk membenahi atau memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara melakukan pengambilan keputusan investasi sistem produksi yang terintegrasi dan juga investasi mesin produksi.

Pengambilan keputusan investasi bukanlah sebuah keputusan yang mudah karena menyangkut masa depan perusahaan, mengandung ketidakpastian dan berisiko. Berdasarkan kondisi ketidakpastian dan berisiko tersebut, para manajer dituntut untuk mampu mengambil alternatif keputusan terbaik yang disebut dengan keputusan yang rasional. Hal ini disadari telah menciptakan sebuah permasalahan tersendiri antara principal dengan manajer.

Pengambilan keputusan investasi disebabkan dua hal yaitu faktor ekonomi klasik dan faktor perilaku keuangan (Nagy & Obenberger 1994; Ritter 2003). Faktor ekonomi yang dimaksud adalah informasi akuntansi dan kompensasi. Informasi akuntansi dapat digunakan manajer untuk memutuskan pengambilan keputusan investasi mana yang layak atau tidak layak dilakukan. Sementara lebih jauh, faktor perilaku keuangan terdiri dari gender, pola perilaku terhadap risiko (*risk attituded*), *mental accounting* (akuntansi mental), terlalu percaya diri, dan sikap ketakutan atau tamak yang semuanya dimiliki oleh manajer (Nagy and Obenberger, 1994). Selain itu, terdapat faktor psikologis yang memengaruhi keputusan seorang investor (Bakar & Yi, 2016).

Menurut Nahartyo and Utami (2016) menegaskan bahwa seseorang seringkali

berperilaku tidak rasional dan membuat perkiraan-perkiraan yang keliru ketika dia mengambil sebuah keputusan. Prilaku tidak rasional ini seringkali disebabkan oleh beberapa hal yang melekat dalam diri individu, oleh karena itu pada penelitian ini focus untuk mengambil dua hal; *mental accounting* dan *self efficacy* dianggap sebagai mewakili *behavioral finance* dalam pengambilan keputusan investasi mesin produksi. *Mental accounting* adalah suatu prilaku kognitif manusia yang digunakan untuk membuat kategori serta mengevaluasi situasi ketika terdapat dua atau lebih kemungkinan hasil, khususnya bagaimana mengkombinasikan kemungkinan-kemungkinan dari hasil tersebut (Thaler, 1985). Sedangkan *self efficacy* dikenalkan pertama kali oleh Bandura (1978) adalah *judgement* seseorang terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam mencapai tingkatan kerja yang diinginkan atau ditentukan, selanjutnya akan mempengaruhi tindakan.

*Mental accounting* merupakan bagaimana seseorang memperlakukan keuangannya dalam pos-pos tertentu. *Mental accounting* berfokus pada bagaimana seseorang seharusnya menyikapi dan mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Fenomena *mental accounting* yang dikenalkan Thaler (1985) ide dasarnya berpijak pada teori prospek yang dikembangkan oleh Kahneman & Tversky (1979). Lebih dari itu, *mental accounting* dapat didefinisikan sebagai prilaku seseorang dalam menggolongkan atau membuat kategori pemasukan dan pengeluaran keuangannya.

Nagy & Obenberger (1994) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi menjadi dua hal, yaitu faktor ekonomi dan faktor *behavior finance*. Salah satu representasi dari *behavior finance* adalah *mental accounting*. *Mental accounting* merupakan suatu prilaku kognitif manusia yang digunakan untuk membuat kategori serta mengevaluasi situasi ketika terdapat dua atau lebih kemungkinan hasil, khususnya bagaimana mengkombinasikan kemungkinan-kemungkinan dari hasil tersebut (Thaler, 1985).

Psikologi kognitif berupa *mental accounting* ini memang dapat dikaitkan dengan berbagai hal dalam pengambilan keputusan, kegiatan rumah tangga, dan investasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Thaler (1985) tidak ditemukan *mental accounting*, dan kasus Kahneman & Tversky (1984) juga tidak ditemukan *mental accounting*.

Berdasarkan beberapa uraian penelitian tersebut, maka peneliti menyusun hipotesis berupa,  $H_1$ : Manajer yang berada dalam kondisi *mental accounting* cenderung akan melakukan investasi mesin produksi.

Faktor internal berupa *overconfidence*, *emotion*, *mental accounting*, *experience* merupakan bagian dari psikologi kognitif yang banyak digunakan dalam penelitian *behavioral accounting*. Bertujuan untuk menguji faktor internal terhadap *risk perception* dan *expected return perception* yang menemukan hasil bahwa pengaruh faktor internal signifikan yaitu *overconfidence*, *emotion*, *mental accounting*, dan *experience* terhadap *risk perception* (Rengku, 2012). *Self efficacy* juga merupakan representasi dari *behavior finance*. *Self efficacy* dikenalkan pertama kali oleh Bandura (1978) yang menyatakan bahwa *self efficacy* adalah *judgement* seseorang terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam mencapai tingkatan kerja yang diinginkan atau ditentukan, selanjutnya akan mempengaruhi tindakan.

Pada kondisi *self efficacy* yang tinggi, subyek cenderung akan melakukan eskalasi komitmen (Whyte dkk, 1997; Whyte & Saks, 2007). Sedangkan sebaliknya, pada kondisi *self efficacy* yang rendah subyek cenderung tidak melakukan eskalasi komitmen. Hal yang sama juga ditemukan oleh Montford and Goldsmith (2016), bahwa keyakinan diri yang tinggi berpengaruh terhadap pemilihan investasi yang berisiko. Lebih lanjut, ada dua variabel yang dibahas meliputi; *gender* dan *sel efficacy*, kedua variabel tersebut, dibuktikan terkandung hipotesisnya. Di mana perempuan lebih cenderung berhati-hati dalam memilih investasi berisiko, berbanding terbalik dengan laki-laki yang lebih berani dalam memilih investasi yang berisiko.

Biyanto (2001) menemukan bahwa pembingkai informasi anggaran berpengaruh terhadap pilihan keputusan investasi berisiko. Begitu juga dengan pengalaman, dapat dibuktikan bahwa pengalaman berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Sedangkan tanggung jawab terbukti tidak berpengaruh terhadap pilihan keputusan investasi berisiko. Sementara hal yang berbeda ditemukan oleh Montford and Goldsmith (2016), bahwa keyakinan diri yang tinggi berpengaruh terhadap pemilihan investasi yang berisiko.

Berdasarkan beberapa uraian penelitian di atas, maka peneliti menyusun hipotesis berupa,  $H_2$ : Manajer yang berada dalam kondisi *self efficacy* yang tinggi cenderung akan melakukan investasi mesin produksi.

Terdapat dua hal yang merepresentasi dari *behavior finance* adalah *mental accounting* dan *self efficacy*. *Mental accounting* merupakan suatu perilaku kognitif manusia yang digunakan untuk membuat kategori serta mengevaluasi situasi ketika terdapat dua atau lebih kemungkinan hasil, khususnya bagaimana mengkombinasikan kemungkinan-kemungkinan dari hasil tersebut (Thaler 1985). Sedangkan *self efficacy* menurut Bandura (1978) adalah *judgement* seseorang terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam mencapai tingkatan kerja yang diinginkan, selanjutnya akan mempengaruhi tindakan yang ia lakukan.

Rengku (2012) melakukan penelitian menggunakan faktor internal berupa *overconfidence*, *emotion*, *mental accounting*, *Experience* merupakan bagian dari psikologi kognitif yang banyak digunakan dalam penelitian *behavioral accounting*. Bertujuan untuk menguji faktor internal terhadap *risk perception* dan *expected return perception* yang menemukan hasil bahwa pengaruh faktor internal signifikan yaitu *overconfidence*, *emotion*, *mental accounting*, dan *experience* terhadap *risk perception*.

Berdasarkan beberapa uraian penelitian terdahulu di atas, maka peneliti menyusun hipotesis interaksi antara kedua variabel *mental accounting* dengan *self efficacy* sebagai berikut,  $H_3$ : Manajer yang berada dalam kondisi adanya *mental accounting* dan *self efficacy* yang tinggi cenderung akan melakukan investasi mesin produksi

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen yang digunakan pada penelitian ini dengan eksperimen tulen atau eksperimen randomisasi (Nahartyo

& Utami, 2016), dimana kondisi variabel dibawah kendali peneliti, variabel independen diberikan manipulasi yang selanjutnya akan diamati efek terhadap variabel independen.

Penelitian ini menguji pengaruh *mental accounting* dan *self efficacy* terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi dengan desain 2 x 2 *between-subject*, berarti bahwa eksperimen ini menggunakan dua level kondisi *mental accounting* (ada atau tidak ada), dan dua level kondisi *self efficacy* (tinggi atau rendah). Desain penelitian dapat ditunjukkan oleh Tabel 1.

**Tabel 1. Desain Penelitian**

<i>Self Efficacy</i>	<i>Mental Accounting</i>	
	Ada	Tidak ada
<i>Tinggi</i>	Grup 1	Grup 2
<i>Rendah</i>	Grup 3	Grup 4

Variabel dependen pada penelitian ini adalah pengambilan keputusan investasi mesin produksi, dan diukur menggunakan skala *likert* 1-10 dengan menunjukkan preferensi keyakinan subyek penelitian untuk melakukan atau tidak melakukan pengambilan keputusan investasi mesin produksi. Variabel independen pada penelitian ini adalah *mental accounting* dan *self efficacy*. Variabel *mental accounting* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, di mana peneliti memberikan angka 1 untuk kondisi terdapat *mental accounting* dan angka 2 untuk kondisi tidak terdapat *mental accounting*. Variabel *self efficacy* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, peneliti memberikan angka 2 untuk kondisi *self efficacy* yang rendah dan angka 1 untuk kondisi *self efficacy* yang tinggi.

Subyek penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Alasan peneliti memilih mahasiswa sebagai subyek penelitian adalah aspek yang diteliti berhubungan dengan aspek keprilakuan atau psikologisnya, yang diasumsikan tidak berbeda dengan para praktisi dalam suatu perusahaan, sehingga dianggap mampu sebagai subyek penelitian dalam tugas pengambilan keputusan investasi mesin produksi.

Pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan *Analysis of Variance* (ANOVA). Ghazali (2006) menjelaskan bahwa *analysis of variance* merupakan metode untuk menguji suatu hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. ANOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh utama (*main effect*) dan pengaruh interaksi (*interaction effect*) dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh utama adalah pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan pengaruh interaksi adalah pengaruh bersama antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2017 dan 02 Juni 2017. Pada pelaksanaannya penelitian eksperimen ini melibatkan 109 subjek penelitian, di mana 25 (22,9 %) data di antaranya tidak dapat diproses atau dianalisis lebih lanjut dengan alasan terdapat beberapa subjek penelitian yang tidak memberikan jawaban serta beberapa yang tidak lolos cek manipulasi. Sehingga jumlah subjek penelitian yang dapat dianalisis lebih lanjut sebanyak 84 (77,1 %), data penelitian sebagaimana dirangkum pada table 2 berikut ini.

Berdasarkan 84 subjek penelitian Table 2, data yang dapat dianalisis sebanyak 84 dengan nilai masing-masing respon keputusan investasi yang berbeda. Nilai respon tersebut menggunakan range antara 1-10 dengan tingkat keyakinan investasi oleh subjek penelitian.

**Tabel 2. Hasil Penelitian**

Subjek Penelitian	Jenis Kasus				Jumlah
	Grup 1	Grup 2	Grup 3	Grup 4	
Mahasiswa S1 Akuntansi	29	26	27	27	109
Data yang tidak dapat dianalisis	8	5	6	6	25
Data yang dapat dianalisis	21	21	21	21	84

Matriks eskperimen bertujuan untuk menunjukkan hasil penelitian pada masing-masing sel. Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pada grup 1, di mana 21 subjek penelitian memilih untuk melakukan investasi mesin produksi dengan nilai rata-rata 8,62 dan standar deviasi 0,8. Pada grup 2, 14 subjek penelitian memilih untuk melakukan investasi mesin produksi dan 7 subjek penelitian memilih untuk tidak melakukan investasi mesin produksi. Keduanya memiliki nilai rata-rata 6,14 dan standar deviasi 2,06. Sementara untuk nilai rata-rata kombinasi antara grup 1 dan 2 sebesar 7,4 dan standar deviasi 1,99.

Grup 3 juga ditunjukkan dalam Tabel 3, yaitu 12 subjek penelitian memilih untuk melakukan investasi mesin produksi dan 9 subjek penelitian memilih untuk tidak melakukan investasi mesin produksi dengan nilai rata-rata 5,8 dan standar deviasi 2,41. Pada grup 4, 4 subjek penelitian memilih untuk melakukan investasi mesin produksi dan 17 subjek penelitian memilih untuk tidak melakukan investasi mesin produksi dengan nilai rata-rata 4,52 dan standar deviasi 1,89. Sementara untuk nilai rata-rata kombinasi antara grup 3 dan 4 sebesar 5,14 dan standar deviasi 2,22.

Pada kombinasi antara grup 1 dan 3 menghasilkan nilai rata-rata 7,2 dan standar deviasi 2,29. Sedangkan pada kombinasi antara grup 2 dan 4 menghasilkan nilai rata-rata 5,33 dan standar deviasi 2,11.

Tabel 3. Matriks Eksperimen

Faktor dan level	Mental Accounting		Keterangan	
	Ada	Tidak ada		
Self Efficacy	Tinggi	Grup 1 N = 21 Mean = 8,6190 Std. Dev = 0,80475	Grup 2 N = 21 Mean = 6,1429 Std. Dev = 2,05635	Grup 1*2 N = 42 Mean = 7,3810 Std. Dev = 1,98718
	Rendah	Grup 3 N = 21 Mean = 5,7619 Std. Dev = 2,40634	Grup 4 N = 21 Mean = 4,5238 Std. Dev = 1,88730	Grup 3*4 N = 21 Mean = 5,1429 Std. Dev = 2,22592
Keterangan	Grup 1*3 N = 42 Mean = 7,1905 Std. Dev = 2,28717	Grup 2*4 N = 42 Mean = 5,3333 Std. Dev = 2,11460	N = 84 Mean = 6,62619 Std.Dev= 2,38024	

Pengujian hipotesis dilakukan melalui beberapa tahapan, untuk hipotesis 1 dan 2 dilakukan dengan menggunakan *One Way Anova*, hal ini dilakukan untuk menguji *main effect* dari variabel *mental accounting* dan *self efficacy* terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi secara sendiri-sendiri. Pada hipotesis 3 menggunakan *Two Way Anova* karena bertujuan untuk mengetahui *interaction effect* dari variabel *mental accounting* dan *self efficacy* terhadap pengambilan keputusan investasi secara bersama-sama. Hasil pengujian hipotesis 1, 2, dan 3 disajikan dalam tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Variabel Independen (X)	F	Signifikan	Keterangan
Mental accounting	20,361	0,000	H <sub>1</sub> tidak ditolak
Self Efficacy	29,572	0,000	H <sub>2</sub> tidak ditolak
Mental Acc*Self Eff	2,262	0,136	H <sub>3</sub> ditolak

Berdasarkan Tabel 4, pengujian H<sub>1</sub> dengan uji signifikansi, untuk H<sub>1</sub> nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel X<sub>1</sub> atau *Mental accounting* berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan investasi mesin produksi. Pengujian H<sub>2</sub> dengan uji signifikansi, untuk H<sub>2</sub> nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel X<sub>2</sub> atau *Self efficacy* berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan investasi mesin produksi. Pengujian untuk H<sub>3</sub> nilai signifikansi sebesar 0,136. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel X<sub>3</sub> atau *Mental accounting* dan *Self efficacy* bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan investasi mesin produksi.

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa manajer dalam kondisi *mental accounting* cenderung akan melakukan investasi mesin produksi. Kondisi *mental accounting* yang dialami oleh manajer ini mengharuskan memilih kredit pembiayaan mesin produksi daripada membelinya secara tunai. Kondisi tersebut juga membuat manajer meenganggap bahwa alternative terbaik adalah dengan membeli mesin produksi secara kredit, meskipun mengabaikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Alternatif tersebut juga mendukung rencana awal bahwa deposito yang dimiliki perusahaan akan digunakan sesuai rencana awal. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam kondisi *mental accounting*, manajer mengabaikan perbandingan tingkat suku bungan antara tabungan deposito yang dimiliki dengan bunga kredit. Sehingga demi kedua rencana awal perusahaan dan investasi mesin produksi tercapai, manajer memilih untuk investasi mesin produksi melalui pembiayaan kredit.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *mental accounting* merupakan salah satu representasi dari dua faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi, yaitu *behavior finance*. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung apa yang dikatakan Nagy & Obenberger (1994) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi menjadi dua hal, yaitu faktor ekonomi dan faktor *behavior finance*. Salah satu representasi dari *behavior finance* adalah *mental accounting*. Hasil ini juga mendukung pernyataan dari Thaler (1985), Seiler dkk (2012), dan Rengku (2012) bahwa *mental accounting* menjadi pertimbangan tersendiri dalam pengambilan keputusan investasi.

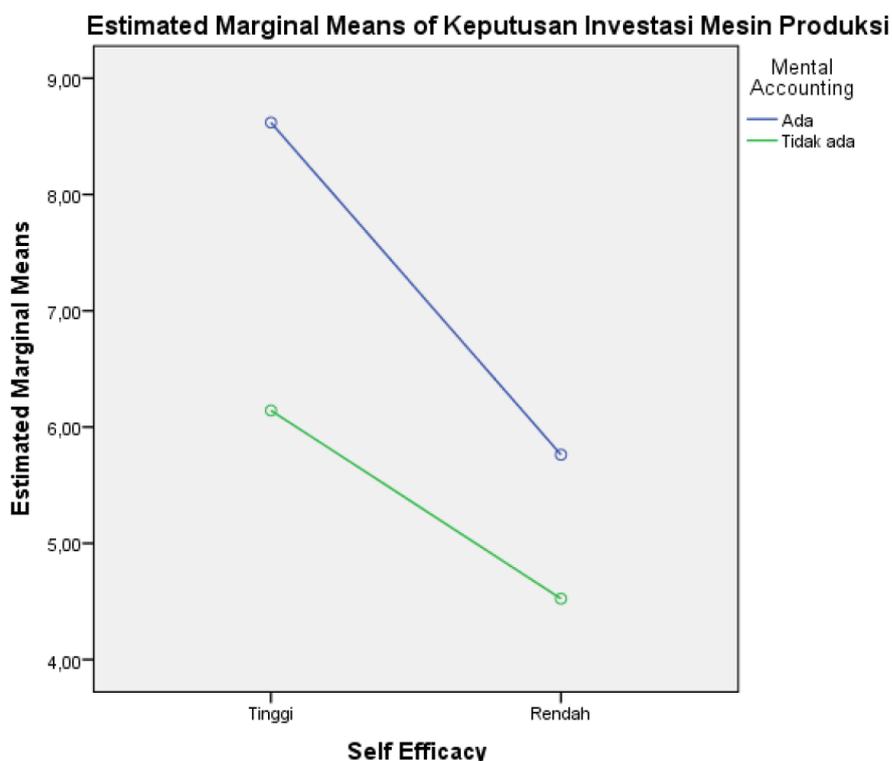
Di sisi lain hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewanti dkk (2018), dimana pertimbangan utama investor ialah return dan bukan *mental accounting*. Sementara hasil penelitian ini juga tidak mendukung penelitian Duxbury dkk. (2005) yang menetapkan penerapan umum *mental accounting* dengan investigasi beragam keputusan dalam kondisi yang bervariasi, sehingga pengaruh *mental accounting* tidak ada pada pengambilan keputusan individu.

Hipotesis 2 ( $H_2$ ) yang diajukan dalam penelitian ini adalah manajer dalam kondisi *self efficacy* tinggi akan cenderung melakukan investasi mesin produksi. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa manajer dalam kondisi *self efficacy* tinggi cenderung akan melakukan investasi mesin produksi. Salah satu representasi dari *behavior finance* adalah *self efficacy*. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan dari Bandura (1978), Eveline (2010), Reed dkk (2012), dan Farrell dkk (2016) bahwa *self efficacy* berpengaruh terhadap keputusan investasi. Penelitian eksperimen ini juga sesuai dengan temuan Whyte dkk (1997) mengenai *self efficacy* bahwa pada kondisi *self efficacy* yang tinggi, subyek cenderung akan melakukan investasi. Sedangkan sebaliknya, pada kondisi *self efficacy* yang rendah subyek cenderung tidak melakukan investasi. Hasil penelitian ini juga mendukung pernyataan yang sama ditemukan oleh Montford and Goldsmith (2016), bahwa keyakinan diri yang tinggi berpengaruh terhadap pemilihan investasi yang berisiko.

Hipotesis 3 ( $H_3$ ) yang diajukan dalam penelitian ini adalah manajer dalam kondisi ada *mental accounting* dan *self efficacy* yang tinggi akan cenderung melakukan investasi mesin produksi. Dengan demikian, Hipotesis nol ( $H_0$ ) adalah manajer dalam kondisi ada *mental accounting* dan *self efficacy* yang rendah cenderung tidak melakukan investasi mesin produksi. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,136. Nilai tersebut lebih besar daripada taraf signifikansi 5% atau ( $0,136 > 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 ( $H_3$ ) ditolak dan hipotesis nol ( $H_0$ ) tidak ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa manajer dalam kondisi ada *mental accounting* dan *self efficacy* yang tinggi cenderung tidak melakukan investasi mesin produksi.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi secara bersama-sama antara variabel *mental accounting* dan *self efficacy* terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi. Gambar 1 menyajikan hasil interaksi antara *mental accounting* dan *self efficacy*.

Gambar 1. Hasil Interaksi *Mental accounting* dan *Self efficacy*



Gambar 1 menunjukkan bahwa manajer dalam kondisi ada *mental accounting* cenderung meningkatkan preferensi untuk melakukan investasi mesin produksi ketika mendapat perlakuan dalam kondisi *self efficacy* yang tinggi. Manajer dalam kondisi ada *mental accounting* cenderung stabil preferensinya untuk melakukan investasi mesin produksi ketika mendapat perlakuan dalam kondisi *self efficacy* yang rendah. Selanjutnya, manajer dalam kondisi ada *mental accounting* cenderung stabil preferensinya untuk melakukan investasi mesin produksi ketika mendapat perlakuan dalam kondisi *self efficacy* yang rendah.

Sebaliknya, manajer dalam kondisi tidak ada *mental accounting* cenderung menurunkan preferensi untuk melakukan investasi mesin produksi ketika mendapat perlakuan *self efficacy* yang rendah.

Hal ini dikarenakan manajer lebih melihat tingkat *self efficacy* mereka daripada terdapat atau tidaknya *mental accounting*. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa variabel *mental accounting* tidak memperkuat *self efficacy* dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian, secara interaksi variabel *mental accounting* dan *self efficacy* tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *mental accounting* dan *self efficacy* terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *mental accounting* berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Di mana manajer dalam kondisi ada *mental accounting* cenderung akan melakukan investasi mesin produksi. *self efficacy* juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Di mana manajer dalam kondisi *self efficacy* yang tinggi cenderung akan melakukan investasi mesin produksi. Sementara *mental accounting* dan *self efficacy* secara interaksi tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *mental accounting* tidak terbukti dapat memperkuat hubungan antara *self efficacy* dengan pengambilan keputusan investasi mesin produksi.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat satu hipotesis yang tidak terbukti, disebabkan subjek penelitian lebih melihat pada *self efficacy* yang digunakan daripada ada atau tidaknya *mental accounting*. Peneliti eksperimen selanjutnya diharapkan agar dapat mengemas kondisi *mental accounting* dengan baik dan berdasarkan tiga kasus populer mengenai *mental accounting*. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat membuat kolaborasi variabel *mental accounting* dengan variabel lain, misalnya dengan variabel *gender*. Hal ini agar dapat mengetahui peran *mental accounting* dalam memperkuat atau tidaknya terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi.

## PUSTAKA ACUAN

- Bakar, S., & Yi, A. N. C. (2016). The Impact of Psychological Factors on Investors' Decision Making in Malaysian Stock Market: a Case of Klang Valley and Pahang. *Procedia Economics and Finance*, 35, 319-328. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)00040-X](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00040-X).
- Bandura, A. (1978). Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. *Advances in Behaviour Research and Therapy*, 1(4), 139-161.
- Biyanto, F. (2001). Hubungan Peningkatan Informasi Anggaran, Tanggung Jawab, Dan Pengalaman Terhadap Pilihan Keputusan Pada Investasi Berisiko. *Disertasi Tidak Dipublikasikan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Dewanti, P. W., Priantinah, D., & Kurniasari, W. A. (2018). Mental Accounting dalam Keputusan Investasi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 75-87. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i1.687>.
- Duxbury, D., Keasey, K., Zhang, H., & Chow, S. L. (2005). Mental Accounting and Decision Making: Evidence under Reverse Conditions Where Money Is Spent for Time Saved. *Journal of Economic Psychology*, 26(4) 567-580.
- Eveline, F. (2010). Pengaruh Adverse Selection, Pembungkahan Negatif, Dan Self Efficacy Terhadap Eskalasi Komitmen Proyek Investasi Yang Tidak Menguntungkan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 21(2), 181-198.
- Farrell, L., Fry, T. R. L., & Risse, L. (2016). The Significance of Financial Self-Efficacy in Explaining Women's Personal Finance Behaviour. *Journal of Economic Psychology*, 54, 85-99. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.07.001>.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 47(2), 363-391.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1984). Choices, Values, and Frames. *American Psychologist*, 39, 341-350.
- Montford, W., & Goldsmith, R. E. (2016). How Gender and Financial Self-Efficacy Influence Investment Risk Taking. *International Journal of Consumer Studies*, 40(1), 101-106.
- Nagy, R. A., & Obenberger, R. W. (1994). Factors Influencing Individual Investor Behavior. *Financial Analysts Journal*, 50(4), 63-68. <https://doi.org/10.2469/faj.v50.n4.63>
- Nahartyo, E., & Utami, I. (2016). *Panduan Praktis Riset Eksperimen*. Jakarta: Indeks.
- Porter, M. E. (1989). How Competitive Forces Shape Strategy. In Asch, D., & Bowman, C. (eds). *Readings in Strategic Management*. London: Palgrave.
- Reed, A. E., Mikels, J. A., & Löckenhoff, C. E. (2012). Choosing with Confidence: Self-Efficacy and Preferences for Choice. *Judgement and Decision Making*, 7(2), 173-180.
- Rengku, R. B. (2012). Faktor Internal Dan Pengaruhnya Terhadap Risk Perception dan Expected Return Perception. *Journal of Business & Banking (JBB)*, 2(2),185-198.
- Ritter, J. R. (2003). Behavioral Finance. *Pacific-Basin Finance Journal*, 11(4), 429-437. [https://doi.org/10.1016/S0927-538X\(03\)00048-9](https://doi.org/10.1016/S0927-538X(03)00048-9).
- Seiler, M. J., Siler, V. L., & Lane, M. A. (2012). Mental Accounting and False Reference Points in Real Estate Investment Decision Making. *Journal of Behavioral Finance*, 13(1), 17-26. <https://doi.org/10.1080/15427560.2012.653293>.
- Thaler, R. (1985). Mental Accounting and Consumer Choice. *Marketing Science*, 4(3), 199-214. <https://doi.org/10.1287/mksc.4.3.199>.
- Whyte, G., Saks, A. M., & Hook, S. (1997). When Success Breeds Failure: The Role of Self Efficacy in Escalating Commitment to a Losing Course of Action. *Journal of Organizational Behavior*, 18(5), 415-432.

Whyte, G., & Saks, A. M. (2007). The Effects of Self-Efficacy on Behavior in Escalation Situations. *Human Performance*, 20(1), 23-42. <https://doi.org/10.1080/08959280709336927>.

## **Pengujian Teori *Fraud Pentagon* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia**

**I Made Laut Mertha Jaya<sup>1\*</sup>, Ajeng Ayu Ambarwati Poerwono<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> STIE "BBANK" Yogyakarta

<sup>1</sup>mad.jaya@yahoo.com, <sup>2</sup>ajengayu81@gmail.com

<sup>\*</sup>Penulis Korespondensi

### **Abstract**

This study was to determine the effect of financial targets, financial stability, external pressure, ineffective monitoring, the nature of industry, change in auditors, rationalization, change of directors, and CEO's picture of fraudulent financial statements in mining companies in Indonesia. This study uses descriptive quantitative methods. Technique of collecting data through documentation. The data used in this study are secondary data in the form of annual reports or annual reports of mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2013-2017. Next, the data was tested using multiple linear regression methods. The results of the study found that the target Financial and Nature of industry had an effect on fraudulent financial statements. Meanwhile, Financial stability, External pressure, and Ineffective monitoring, Change in auditors, Rationalization, and Change of directors, and CEO's picture, have no effect on fraudulent financial statements in mining companies in Indonesia.

**Keywords:** fraud pentagon, fraud of financial statements

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *financial target*, *financial stability*, *external pressure*, *ineffective monitoring*, *nature of industry*, *change in auditor*, *rationalization*, pergantian direksi, dan *CEO's Picture* terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa *annual report* atau laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013–2017. Selanjutnya, data diuji menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa *Financial target* dan *Nature of industry* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, *Financial stability*, *External pressure*, dan *Ineffective monitoring*, *Change in auditor*, *Rationalization*, dan Pergantian direksi, dan *CEO's picture*, tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan pertambangan di Indonesia.

**Kata Kunci:** fraud pentagon, kecurangan laporan keuangan

## Pendahuluan

Kasus kecurangan laporan keuangan telah banyak terjadi dan diungkap, seperti kasus *Waste Management* di Amerika Serikat. Pada tahun 1998 *Waste Management* melaporkan laba palsu (*fake earning*) sebesar US\$1,7 miliar dan mengecilkan elemen tertentu dari beban pajaknya sebesar US\$190 juta. Selain itu, juga kasus Enron pada tahun 2011 yang melakukan penggelembungan laba saat perusahaan sedang mengalami kerugian, sehingga mengakibatkan pemegang saham kehilangan US\$74 miliar. Kasus ini juga menyeret Kantor Akuntan Publik ternama pada saat itu, yaitu KAP Arthur Andersen. Setahun kemudian kasus yang sama, yaitu penggelembungan aset sebesar US\$11 miliar oleh WorldCom sebuah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi di Amerika. Kasus ini mengakibatkan 30.000 karyawan kehilangan pekerjaan mereka, dan investor kehilangan \$180 miliar investasi mereka (Tuanakotta, 2013).

Kasus kecurangan yang serupa terjadi pula di Indonesia. Salah satunya yang terjadi pada perusahaan pertambangan, yaitu kasus PT. Timah. Perusahaan ini dituding melakukan manipulasi laporan keuangan dan juga diduga membuat laporan keuangan fiktif. Pada semester I-2015 laba operasi rugi sebesar Rp59 miliar dan juga mengalami penurunan laba, PT Timah juga mencatatkan peningkatan utang hampir 100 persen dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2013, utang perseroan hanya mencapai Rp 263 miliar. Namun, jumlah utang ini meningkat hingga Rp 2,3 triliun pada tahun 2015. Sehingga, laporan keuangan yang menyebutkan bahwa PT Timah telah berhasil melakukan kegiatan efisiensi dan strategi yang tepat dan membuahkan kinerja positif adalah kebohongan besar.

Selain itu, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) juga melaporkan dugaan manipulasi pelaporan penjualan tiga perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie kepada Direktorat Jenderal Pajak. ICW menduga terjadi rekayasa laporan yang dilakukan PT Bumi Resources Tbk dan anak usaha sejak 2003-2008, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar US\$ 620,49 juta. Hasil perhitungan ICW dengan menggunakan berbagai data primer termasuk laporan keuangan yang telah diaudit, menunjukkan laporan penjualan Bumi selama 2003-2008 lebih rendah US\$ 1,06 miliar dari yang sebenarnya. Akibatnya, selama itu pula diperkirakan kerugian negara dari kekurangan penerimaan Dana Hasil Produksi Batubara (royalti) mencapai US\$ 143,18 juta. Adapun kerugian negara dari kekurangan pembayaran pajak mencapai US\$ 477,29 juta.

Beberapa fenomena tersebut merupakan bukti bahwa tindakan kecurangan laba masih sering terjadi. Menurut Schipper (1989), Subramanyam & Wild (2010) menyatakan bahwa manajemen dapat menggunakan kebijakan dalam laporan keuangan untuk menurunkan dan menaikkan laba sesuai kepentingannya dengan tidak menyalahi prinsip prinsip akuntansi. Selain itu, fenomena tersebut memberikan indikasi bahwa perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia akan cenderung menggunakan metode akuntansi dalam menaikkan labanya, sehingga dapat lebih bersaing dengan sektor-sektor lainnya untuk menarik para investor.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* menurut Cressey (1953) bahwa kecurangan pelaporan keuangan terjadi selalu diikuti oleh tiga kondisi, yaitu tekanan, kesempatan, dan

rasionalisasi. Kemudian, Wolfe & Hermanson (2004) mengembangkannya dengan memunculkan *fraud diamond*, dimana pada teori ini menambahkan satu elemen kualitatif yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud*, yaitu kapabilitas (*capability*).

Beberapa penelitian mengenai *fraud* menemukan bahwa terdapat 4 *fraud risk factor* untuk mendeteksi *fraud* pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI pada 2010-2012 (Sihombing & Rahardjo, 2014). Namun, penelitian yang dilakukan Tessa & Harto (2016) menyebutkan terdapat lima faktor *fraud risk*, yaitu *pressure, opportunity, rationalization, competence, and arrogance* untuk mendeteksi *fraudulent financial reporting* pada perusahaan keuangan dan perbankan yang listing di BEI pada 2012-2014. Penelitian Aprilia (2017) menemukan bahwa variabel stabilitas keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, untuk variabel lainnya yaitu politisi CEO, frekuensi kemunculan gambar CEO, kebijakan hutang-piutang masih meragukan. Faktor terbatasnya akses informasi entitas, efektifitas pengawasan, pergantian ketua auditor internal, tekanan dari pihak eksternal, kepemilikan manajerial, pergantian kebijakan akuntansi perusahaan, dan opini audit tidak justru berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa secara empiris beberapa penelitian tersebut belum memberikan bukti yang lebih spesifik tentang pengaruhnya pengujian *fraud* pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan.

Oleh karenanya, penelitian ini akan menerapkan *Crowe's fraud pentagon theory*, karena teori ini merupakan teori terbaru yang sebelumnya belum banyak digunakan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan, terutama di Indonesia. Selain itu, indikator yang dipaparkan dalam teori ini lebih lengkap dibandingkan teori-teori sebelumnya, yaitu *fraud triangle* dan *fraud diamond*. Elemen-elemen dalam *Crowe's fraud pentagon theory* ini tidak dapat diteliti secara langsung, sehingga dalam penelitian ini menggunakan variabel proksi untuk setiap elemen-elemen *pentagon theory*.

Salah satu pengukuran untuk menilai tingkat laba yang diperoleh perusahaan ialah ROA (*Return On Asset*). Semakin besar ROA yang diperoleh, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset (Sihombing & Rahardjo, 2014). Carlson & Bathala (1997), Widyastuti (2009) membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki laba yang besar lebih mungkin melakukan manajemen laba daripada perusahaan yang memiliki laba yang kecil. Hal ini juga didukung oleh penelitian Sihombing & Rahardjo (2014) bahwa *financial target* berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: *Financial target* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan

Menurut SAS No. 99 menunjukkan bahwa seorang manajer menghadapi tekanan untuk melakukan kecurangan dan manipulasi laporan keuangan ketika stabilitas keuangan dan profitabilitas perusahaannya terancam kondisi ekonomi, industri, dan situasi lainnya. Skousen dkk (2009) mengindikasikan perusahaan yang mengalami pertumbuhan di bawah rata-rata industri, memungkinkan manajemen untuk manipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan prospek perusahaan. Sihombing & Rahardjo (2014) menunjukkan bahwa

*financial stability* terbukti berpengaruh terhadap *financial statement fraud*. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

H<sub>2</sub>: *Financial stability* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan

Perusahaan sering mengalami suatu tekanan dari pihak eksternal. Salah satu tekanan yang kerap kali dialami manajemen perusahaan adalah kebutuhan untuk mendapatkan tambahan utang atau sumber pembiayaan eksternal agar tetap kompetitif, termasuk pembiayaan riset dan pengeluaran pembangunan atau modal (Skousen dkk, 2009). Kebutuhan pembiayaan eksternal terkait dengan kas yang dihasilkan dari utang yang dalam penelitian ini diproksikan dengan *leverage ratio*. Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: *External pressure* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan

*Ineffective monitoring* merupakan kondisi dimana tidak adanya keefektifan sistem pengawasan internal yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya dominasi manajemen oleh satu orang atau kelompok kecil, tanpa kontrol kompensasi, tidak efektifnya pengawasan dewan direksi dan komite audit atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal atau sejenisnya (SAS No. 99). Dengan kurangnya kontrol dari pihak internal perusahaan menjadi kesempatan tersendiri bagi beberapa pihak untuk memanipulasi data pada laporan keuangan. Maka dari itu dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: *Ineffective monitoring* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan

*Nature of industry* merupakan kondisi ideal suatu perusahaan atau organisasi dalam industri. Salah satu bentuk *nature of industry* yaitu kondisi piutang perusahaan, dimana perusahaan yang dianggap memiliki kondisi ideal yaitu perusahaan yang memiliki piutang yang lebih sedikit. Skousen dkk (2009) berpendapat bahwa perusahaan yang baik akan menekan dan memperkecil jumlah piutang perusahaan serta memperbanyak penerimaan aliran kas perusahaan. Tingginya nilai piutang terhadap penjualan dalam suatu perusahaan menunjukkan bahwa akun piutang merupakan aset yang memiliki risiko manipulasi yang lebih tinggi (Dalnial dkk, 2014). Karena, jika sebuah perusahaan memiliki rasio piutang terhadap penjualan tinggi, maka hal ini memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan agar piutang tersebut terlihat lebih kecil. Sehingga, dalam penelitian ini *nature of industry* diproksikan dengan perubahan rasio piutang terhadap penjualan. Sihombing & Rahardjo (2014) menyatakan *nature of industry* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

H<sub>5</sub>: *Nature of industry* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan

*Change in auditor* atau pergantian auditor yang digunakan perusahaan dapat dianggap sebagai suatu bentuk untuk menghilangkan jejak *fraud (fraud trail)* yang ditemukan oleh auditor sebelumnya. Studi yang dilakukan oleh Stice (1991) dan St Pierre & Anderson (1984), Sihombing & Rahardjo (2014) menunjukkan bahwa perubahan auditor dapat terjadi karena alasan yang sah, risiko kegagalan audit dan litigasi berikutnya akan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Summer & Seewny (1998), Sihombing & Rahardjo (2014) berpendapat bahwa perubahan auditor tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap *financial statement fraud*. Argumen ini tidak didukung oleh SAS No.

99 atau Albrecht & Albrecht (2002), yang menyarankan perubahan auditor dikaitkan dengan *financial statement fraud*. Pergantian auditor dapat menjadi salah satu proksi dari *rationalization* (Skousen dkk, 2009). Atas dasar tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan:

H<sub>6</sub>: *Change in auditor* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan

Menurut Skousen dkk (2009), rasionalisasi memiliki penilaian subjektif bagi perusahaan, penilaian dan pengambilan keputusan yang subjektif tersebut tercermin dalam nilai akrual perusahaan. Nilai akrual bukan merupakan sebuah nilai yang riil, sehingga manajemen dapat memainkan akrual dalam perusahaan untuk mendapatkan nilai yang diharapkannya, sehingga akrual dapat dijadikan alasan oleh manajemen untuk membenarkan tindakan manipulasi yang dilakukannya. Maka dalam penelitian ini akan menggunakan proksi *Total Accrual to Total Assets* (TATA) sebagai proksi dari rasionalisasi, dimana *Total Accrual to Total Assets* merupakan rasio total akrual dalam sebuah perusahaan terhadap total aset. Perhitungan TATA ini menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Beneish (1999). Penelitian Sihombing & Rahardjo (2014) memberikan bukti bahwa *rationalization* yang diproksikan dengan TATA berpengaruh terhadap *financial statement fraud*. Rumusan hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>7</sub>: *Rationalization* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan

Menurut Tessa & Harto (2016) pergantian direksi dipilih sebagai variabel dari salah satu elemen dalam *Crowe's fraud pentagon theory, competence*. Pergantian direksi diindikasikan mampu menggambarkan kemampuan dalam melakukan manajemen stress. Wolfe & Hermanson (2004) berpendapat bahwa penipuan tidak akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat untuk melaksanakan setiap detail penipuan. *Competence*, artinya kemampuan seseorang dalam melakukan tindak kecurangan demi tercapainya tujuan tertentu. Pergantian direksi dapat menjadi suatu upaya perusahaan untuk memperbaiki kinerja direksi sebelumnya. Dengan melakukan perubahan susunan direksi ataupun perekrutan direksi baru yang dianggap lebih berkompeten dalam bidangnya, sehingga pergantian direksi juga mengindikasikan suatu kepentingan politik tertentu untuk menggantikan jajaran direksi sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut hipotesis yang dirumuskan:

H<sub>8</sub>: Pergantian direksi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

*CEO's picture* adalah foto CEO yang terpampang pada laporan tahunan perusahaan. Foto CEO yang terpampang dalam sebuah laporan tahunan perusahaan dapat merepresentasikan tingkat arogansi atau superioritas yang dimiliki CEO tersebut. Seorang CEO cenderung lebih ingin menunjukkan kepada semua orang akan status dan posisi yang dimilikinya dalam perusahaan karena mereka tidak ingin kehilangan status atau posisi tersebut (atau merasa tidak dianggap), hal ini sesuai dengan salah satu elemen yang dipaparkan oleh Crowe (2011). Tingkat arogansi yang tinggi dapat menimbulkan terjadinya *fraud* karena dengan arogansi dan superioritas yang dimiliki seorang CEO, membuat CEO merasa bahwa kontrol internal apapun tidak akan berlaku bagi dirinya karena status dan posisi yang dimiliki. Menurut Crowe (2011), juga terdapat kemungkinan bahwa CEO akan melakukan cara apapun untuk mempertahankan posisi dan kedudukan yang sekarang dimiliki. Atas dasar pemikiran tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis:

H<sub>9</sub>: *CEO's picture* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

## METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar (*listed*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *non-random* atau *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah: Pertama, perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berturut-turut periode 2013-2017. Kedua, perusahaan pertambangan yang tidak mengalami *delisting* selama periode penelitian. Ketiga, perusahaan pertambangan yang membuat dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama periode 2013-2017 yang dinyatakan dalam rupiah maupun dollar. Keempat, perusahaan pertambangan yang memiliki data lengkap berkaitan dengan variabel penelitian di dalam laporan keuangannya selama periode 2013-2017.

Variabel proksi yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian Sihombing & Rahardjo (2014), dan Tessa & Harto (2016) dengan alasan variabel-variabel tersebut terbukti sudah banyak diuji untuk menjelaskan *fraud risk factor* dalam teori *fraud*, sehingga reliabilitasnya lebih dapat dipercaya. Proksi tersebut antara lain; *Pressure* yang diproksikan dengan *financial target*, *financial stability*, dan *external pressure*; *Opportunity* yang diproksikan dengan *ineffective monitoring* dan *nature of industry*; *Rationalization* yang diproksikan dengan *change in auditor* dan *rationalization*; *Competence* yang diproksikan dengan pergantian direksi perusahaan; dan *Arrogance* yang diproksikan dengan *CEO's Picture*.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi linier berganda seperti di bawah ini.

$$DACC_{it} = \beta_0 + \beta_1 ROA_{it} + \beta_2 ACHANGE_{it} + \beta_3 LEV_{it} + \beta_4 BDOUT_{it} + \beta_5 Receivable_{it} + \beta_6 \Delta CPA_{it} + \beta_7 TATA_{it} + \beta_8 DCHANGE_{it}$$

Dimana:

DACC<sub>it</sub> : *Discretionary accruals* perubahan i pada tahun t

ROA : *Return on Assets*

ACHANGE : Rasio perubahan total aset

LEV : Rasio total kewajiban per total aset

BDOUT : Rasio dewan komisaris independen

RECEIVABLE: Rasio perubahan piutang

ΔCPA : Pergantian auditor independen

TATA : Rasio total akrual per total aset

DCHANGE : Pergantian Direksi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kriteria metode *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 27 perusahaan pertambangan selama 5 tahun. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data, dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DACC	115	-.1151	.1923	.0232	.07064
ROA	115	-.1627	.4883	.0400	.09209
ACHANGE	115	-.2876	9.4988	.1135	.90239
LEVERAGE	115	.0006	1.8977	.4615	.27327
BDOUT	115	.0000	3.0000	.9468	.72716
RECEIVABLE	115	-.7114	.8032	.0053	.14846
CHANGE IN AUDITOR	115	0	1	.10	.307
TATA	115	-1.0619	.4729	-.0172	.30071
COMPETENCE	115	0	1	.18	.388
CEO'S PICTURE	115	0	1	.96	.205
Valid N (listwise)	115				

Sumber: Data diolah.

Berdasarkan Tabel 1, jumlah datanya sebanyak 115 data. Hal ini disebabkan oleh adanya 20 data *outlier* yang harus penulis hapus dalam penelitian ini. Sehingga, dari total 206 sampel, diperoleh 115 data yang bebas dari data-data *outlier*. Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel dependen, yaitu *discretionary accrual* (DACC) memiliki rata-rata sebesar 0,0232. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan yang melakukan diskresioner akrual setiap tahunnya sebesar 0,0232 dari total akrual dalam laporan keuangan yang diterbitkan. Data ini menunjukkan bahwa rata-rata diskresioner akrual dalam laporan keuangan perusahaan pertambnagan masih rendah. Standar deviasi menunjukkan angka 0,07064, dimana angka ini lebih besar dari nilai rata-rata yang berarti bahwa penyebaran data tidak secara merata.

Variable *financial target* diukur menggunakan ROA, dimana dari total 115 perusahaan pertambangan memiliki ROA rata-rata 0,0400. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba bersih mencapai 0,0400 dari total aset yang dimiliki perusahaan. Standar deviasi ROA menunjukkan angka 0,09209 yang menunjukkan angka tersebut lebih besar dari angka rata-rata. Hal ini menggambarkan bahwa data tidak menyebar secara merata.

Variabel *financial stability* diukur menggunakan rasio perubahan total aset selama dua tahun. Rata-rata rasio perubahan aset (ACHANGE) dari 115 perusahaan pertambangan menunjukkan angka 0,1135. Hal ini berarti bahwa perubahan aset perusahaan memiliki kenaikan sebesar 11,35% dari total aset perusahaan setiap tahunnya. Standar deviasi menunjukkan angka 0,90719 lebih besar dari nilai rata-rata yang berarti bahwa data tidak menyebar secara merata.

Variabel *external pressure* yang diukur dengan rasio *leverage* perusahaan memiliki rata-rata sebesar 0,4615. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel penelitian ini rata-rata memiliki liabilitas lebih kecil dari total aset perusahaan. Standar deviasi *leverage* menunjukkan angka 0,27327. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang berarti bahwa tidak terjadi begitu banyak penyimpangan data pada penelitian ini.

Variabel *ineffective monitoring* diukur dengan menggunakan rasio dewan komisaris independen (BDOUT). Rasio dewan komisaris independen perusahaan sampel memiliki rata-rata senilai 0,9468. Artinya, rata-rata perusahaan sampel memiliki dewan komisaris independen sebesar 94,68% dari total dewan komisaris yang ada dalam perusahaan. Nilai rasio dewan komisaris independen tertinggi sebesar 0,30000. Hal ini menunjukkan bahwa 0,30000 dari total dewan komisaris perusahaan tersebut merupakan dewan komisaris independen. Standar deviasi menunjukkan angka 0,72716 (lebih kecil dari rata-rata), artinya data menyebar secara merata.

*Nature of industry* yang diukur menggunakan rasio perubahan piutang perusahaan (RECEIVABLE) memiliki rata-rata sebesar 0,0053. Hal ini berarti bahwa rata-rata piutang perusahaan sampel mengalami perubahan senilai 0,0053 dari perubahan penjualan perusahaan. Nilai rasio terkecil senilai -0,7114, yang berarti bahwa perusahaan mengalami penurunan piutang sebesar 71,14% dari perubahan penjualan tahun 2015. Sedangkan, nilai rasio terbesar diperoleh dengan nilai sebesar 0,8032 yang berarti bahwa perusahaan mengalami kenaikan piutang sebesar 80,32%. Standar deviasi sebesar 0,14846 yang menunjukkan nilai lebih besar dari rata-rata. Hal ini berarti bahwa data penelitian tidak menyebar secara merata.

*Change in auditor* atau pergantian auditor dari jumlah data 115 perusahaan memiliki rata-rata sebesar 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa dari total 115 perusahaan sampel memiliki frekuensi terjadi pergantian auditor eksternal senilai 10% dengan standar deviasi memiliki nilai yang cukup besar yaitu sebesar 0,307. Nilai terendah yaitu 0 dan nilai tertinggi yaitu 1 dimana dalam pengukuran variabel ini penulis menggunakan variabel *dummy*.

*Rationalization* yang diukur menggunakan rasio *Total Accrual to Total Assets* (TATA) memiliki rata-rata senilai -0,0172. Hal ini menunjukkan bahwa total akrual perusahaan sampel lebih kecil dari total aset yang dimiliki perusahaan. Standar deviasi TATA menunjukkan angka 0,3007 (lebih besar dari rata-rata), artinya data yang diperoleh tidak menyebar secara merata.

Variabel pergantian direksi diproksikan dengan *competence* (DCHANGE) dengan jumlah data 115 memiliki nilai terendah 0 dan nilai tertinggi 1 (menggunakan variabel *dummy*). Rata-rata pergantian direksi menunjukkan nilai sebesar 0,18 yang berarti bahwa *turn over* direksi dari data perusahaan yang terkumpul sebesar 18% dengan standar deviasi yang cukup besar senilai 0,388.

*CEO's Picture*, variabel pergantian direksi diproksikan dengan *arrogance* dengan jumlah data 115 memiliki nilai terendah 0 dan nilai tertinggi 1 (menggunakan variabel *dummy*). Rata-rata *CEO's picture* menunjukkan nilai sebesar 0,96 yang berarti bahwa mayoritas *annual report* perusahaan terdapat foto CEO sebesar 96% dengan standar deviasi yang senilai 0,205.

Selanjutnya, setelah melalui pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heterokedastisitas, multikolinieritas, dan auto korelasi. Pada tahapan ini, persamaan pada penelitian ini telah lulus pada tahap pengujian asumsi klasik. Selanjutnya akan diikuti dengan pengujian hipotesis menggunakan teknik regresi berganda. Analisis regresi berganda antara kecurangan laporan keuangan yang digunakan, yaitu *financial target*, *financial stability*, *external pressure*, *ineffective monitoring*, *nature of industry*, *change in auditor*, *rationalization*, dan pergantian direksi perusahaan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Regresi Berganda

	B	Std. Error	t-stat
1 (Constant)	.028	.025	1.120
ROA***	.216	.072	2.979
ACHANGE	.009	.007	1.213
LEVERAGE	.001	.026	.034
BDOUT	.006	.009	.697
RECEIVABLE**	.098	.043	2.271
CHANGE IN AUDITOR	-.022	.022	-.995
TATA	-.009	.024	-.371
COMPETENCE	-.014	.017	-.819
CEO'S PICTURE	-.019	.022	-.852

a. Dependent Variable: DACC

Sumber: Data diolah

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel *financial target* memiliki hasil uji dengan nilai t sebesar 2,979 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004. Hal ini disebabkan karena manajemen mengalami kesulitan dalam memperoleh target ROA yang akhirnya menjadi tekanan dan memicu terjadinya kecurangan laporan keuangan. Sehingga, dapat dikatakan secara parsial variabel *financial target* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel *financial stability* yang diproksikan dengan perubahan total aset (ACHANGE) memiliki hasil uji t yang menunjukkan nilai t sebesar 1,213 dengan tingkat signifikansi 0,228. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial *financial stability* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan rasio perubahan total aset tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan, sehingga tetap stabil dan tidak menjadi tekanan bagi manajemen. Hasil ini berbeda dengan temuan Bawekes dkk (2018) yang menunjukkan bahwa *financial stability* berpengaruh terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan.

Variabel *external pressure* memiliki hasil uji t dengan nilai 0,034 dengan signifikansi 0,973. Sehingga, secara parsial *external pressure* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat mengembalikan hutangnya, hal ini tidak menjadi tekanan bagi pihak manajemen. Hasil ini berbeda dengan temuan Yesiariani & Rahayu (2017) yang menunjukkan terdapat pengaruh antara tekanan eksternal terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

Tabel 2 menunjukkan bahwa *ineffective monitoring* memiliki hasil uji t dengan nilai 0,697 dan signifikansi 0,488. Secara parsial dapat dikatakan bahwa *ineffective monitoring* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Dikarenakan banyaknya jumlah dewan komisaris akan meningkatkan efektivitas dalam mengawasi perusahaan. Selain itu, Tabel 2 menggambarkan bahwa nilai uji t untuk variabel *nature of industry* 2,271 dengan signifikansi 0,025. Tingginya nilai piutang terhadap penjualan dalam suatu perusahaan menunjukkan bahwa piutang merupakan aset yang memiliki risiko manipulasi yang cukup tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel *nature of industry*

berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Temuan ini berbeda dengan penelitian Ijudien (2018) yang menemukan tidak ada pengaruh antara *nature of industry* dengan kecurangan laporan keuangan.

Hasil uji t dari variabel *change in auditor* pada Tabel 2 menunjukkan -0,995 dengan signifikansi 0,322. Secara parsial variabel *change in auditor* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan dikarenakan semakin sering melakukan pergantian auditor, maka semakin kecil dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Hasil ini sesuai dengan temuan Annisya dkk (2016) yang turut pula menemukan ketiadaan hubungan antara pergantian direksi dan penipuan laporan keuangan. Tabel 2 menggambarkan hasil uji t untuk variabel *rationalization* dengan nilai t -0,371 dan signifikansi 0,712. Secara parsial variabel *rationalization* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan manajemen tidak menggunakan total akrual untuk melakukan manajemen laba.

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai t dari variabel pergantian direksi (DCHANGE) adalah -0,819 dengan signifikansi 0,415. Hasil ini menunjukkan bahwa pergantian direksi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pergantian direksi bukan merupakan faktor pendorong terjadinya *fraud*, karena semakin perusahaan sering melakukan pergantian direksi maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba. Tabel 2 menunjukkan nilai t dari variabel *CEO's picture* sebesar -0,852 dengan signifikansi 0,396. Hasil ini menunjukkan bahwa *CEO's picture* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil ini berbeda dengan temuan Setiawati & Baningrum (2018), dimana *CEO's picture* berpengaruh dalam mendeteksi penipuan laporan keuangan.

**Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

R	R Square	Adj. R Square	Std. Er.of the Estimate
.382 <sup>a</sup>	.146	.072	.0680383

Sumber: Data diolah

Hasil pada Tabel 3 menunjukkan besarnya nilai *Adjusted R Square* adalah 0,072. Hal ini berarti bahwa 7,2% variasi DACC dapat dijelaskan oleh variasi kesembilan variabel independen *financial targets*, *financial stability*, *external pressure*, *ineffective monitoring*, *nature of industry*, *change in auditor*, *rationalization*, dan *competence*. Sedangkan, sisanya 92,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dijelaskan pada model penelitian ini.

**Tabel 4. Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.083	9	.009	1.988	.048 <sup>b</sup>
Residual	.486	105	.005		
Total	.569	114			

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji statistik F pada Tabel 4 diperoleh sebesar 1,988 dengan tingkat probabilitas (signifikan) sebesar 0,048. Hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen *financial target*, *financial stability*, *external pressure*, *ineffective monitoring*, *nature of industry*, *change in auditor*, *rationalization*, dan pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil empiris, dapat disimpulkan bahwa *Financial target* dan *Nature of industry* secara parsial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan ROA dan piutang menjadi peluang bagi manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, *Financial stability*, *External pressure*, *Ineffective monitoring*, *Change in auditor*, *Rationalization*, dan *CEO's picture* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan rasio perubahan total aset tidak berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Perubahan nilai *asset* yang lebih besar daripada nilai utang tidak juga menjadi sebuah tekanan bagi pihak manajemen perusahaan. Sehingga, banyaknya dewan komisaris independen bukanlah suatu faktor yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan suatu perusahaan. Selain itu, setiap pergantian auditor yang dilakukan perusahaan justru membuat perusahaan tidak mampu mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya, yaitu penelitian selanjutnya, dapat menggunakan metode kombinasi antara metode kuantitatif dengan kualitatif. Hal ini dikarenakan beberapa dari variabel yang terdapat dalam *fraud risk factor* tidak dapat dijelaskan secara spesifik oleh alat analisis metode kuantitatif. Penelitian selanjutnya, dapat menggunakan pengukuran lain sebagai alat ukur *fraudulent financial reporting*, karena tindak kecurangan telah mulai banyak beragam jenis caranya, sehingga dalam mendeteksinya pun harus mulai cermat.

## PUSTAKA ACUAN

- Albrecht W. S., & Albrecht C. O. (2002). Fraud Examination. *Journal Academic Ethic*, 7, 207-221.
- Annisya, M., Lindriansari., & Asmaranti, Y. (2016). Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Fraud Diamond. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 23(1), 72-89.
- Aprilia. (2017). Analisis Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish Model Pada Perusahaan yang Menerapkan ASEAN Corporate Governance Scorecard. *Jurnal Akuntansi Riset*, 6(1), 96-126.
- Bawekes, H. F., Simanjuntak, A. M. A., & Daat, S. C. (2018). Pengujian Fraud Pentagon Terhadap Fraudulent Financial Reporting: Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 13(1), 114-134
- Beneish, M. D. (1999). The Detection of Earnings Manipulation. *Financial Analysis Journal*, 55(5), 24-36.

- Carlson, S. J., & Bathala, C. T. (1997). Ownership Differences and Firm's Income Smoothing Behavior. *Journal of Business and Accounting*, 24(2), 179-196. <https://doi.org/10.1111/1468-5957.00101>.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money*. Montclair, New Jersey: Patterson Smith.
- Crowe, H. (2011). *Putting the Freud in Fraud: Why the Fraud Triangle Is No Longer Enough*. IN Howart, Crowe
- Dalnial, H., Kamaluddin, A., Sanusi, Z. M., & Khairuddin, K. S. (2014). Detecting Fraudulent Financial Reporting through Financial Statement Analysis. *Journal of Advanced Management Science*, 2(1), 17-22.
- Ijudien, D. (2018). Pengaruh Stabilitas Keuangan, Kondisi Industri, dan Tekanan Eksternal Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(1), 82-97.
- Schipper, K. (1989). Cometary Katherine on Earnings Management. *Accounting Horizon*, 3, 91-102.
- Setiawati, E., & Baningrum, R. M. (2018). Deteksi Fraudulent Financial Reporting Menggunakan Analisis Fraud Pentagon: Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Listed di BEI Tahun 2014-2016. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 91-106.
- Sihombing, K. S., & Rahardjo, S. N. (2014). Analisis Fraud Diamond dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1-12.
- Skousen, C. J., Smith K. R., & Wright, C. J. (2009). *Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of the Fraud Triangle and SAS No. 99*. Corporate Governance and Firm Performance Advance in Financial Economics, 13, 53-81.
- Stice, J. D. (1991). Using Financial and Market Information to Identify Preengagements Factors Associated with Lawsuits Against Auditors. *The Accounting Review*, 66(3), 516-533.
- St. Pierre, K., & Anderson, J. A. (1984). An Analysis of The Factors Associated With Lawsuits Against Public Accountants. *The Accounting Review*, 59(2), 242-263.
- Subramanyam, K. R., & Wild, J. J. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Sepuluh. Jakarta: Salemba Empat.
- Summers, S. L., & Sweeney, J. T. (1998). Fraudulently Misstated Financial Statements and Insider Trading: an Empirical Analysis. *The Accounting Review*, 73(1), 131-146.
- Tessa, G. C., & Harto, P. (2016). Fraudulent Financial Reporting: Pengujian Teori Fraud Pentagon pada sektor Keuangan dan Perbankan di Indonesia. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*, 1-21.
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyastuti, T. (2009). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba: Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal MAKSI*, 9(1), 30-41.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38-45.
- Yesiariani, M., & Rahayu, I. (2017). Deteksi Financial Statement Fraud: Pengujian Fraud Diamond. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(1), 49-60. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss1.art5>.

## **Tanggung Jawab Sosial Universitas dan Tata Kelola Universitas Terhadap Citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**

**Atiqah**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
atiqah@uinjkt.ac.id

### **Abstract**

This research aims to examine that University Social Responsibility (USR) and Good University Governance (GUG) influence toward image of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Indicator of USR include economic responsibilities, legal responsibilities, ethical responsibilities and philanthropic responsibilities. Indicator of GUG include transparation, accountability, responsibility, independency, fairness and participation. Indicator of Image include Reputation, Personality, ethical/value and corporate identity. Sample of this research include civitas academic of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta include student, lecturer and officer. Technic analysis data use multiple linear regression. Results of this research as partial provide evidence that University Social Responsibility influence toward image of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, and Good University Governance influence toward image of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Keywords:** university social responsibility, good university governance, university image

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tanggung jawab sosial universitas dan tata kelola universitas terhadap citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Indikator tanggung jawab sosial universitas terdiri dari tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etika dan dan tanggungjawab filantropi. Indikator tata kelola universitas terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, kewajiban dan partisipasi. Indikator citra terdiri dari reputasi, kepribadian, nilai etika dan identitas korporasi. Sampel penelitian meliputi sivitas akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mahasiswa, dosen dan karyawan. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial universitas berpengaruh terhadap citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan tata kelola universitas berpengaruh terhadap citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Kata Kunci:** tanggung jawab universitas, tata kelola universitas, citra universitas

## PENDAHULUAN

Konsep tanggung jawab sosial bukan hanya berbicara tentang aktivitas donasi dan sumbangan tetapi merupakan konsep yang lebih luas untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada terkait dengan masalah lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat. Perkembangan yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan antara pendidikan tinggi dengan institusi atau yang lebih kita kenal antara universitas dan masyarakat. Sebuah universitas adalah pilar inti dari masyarakat itu sendiri karena universitas mempunyai peran penting untuk membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial dari para penggunanya baik itu pengguna internal (dosen, karyawan dan mahasiswa) maupun pengguna eksternal misal masyarakat (Bokhari, 2017).

Universitas tidak bisa lepas dari Tridharma, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Universitas dituntut untuk memberikan kontribusi yang nyata dalam melaksanakan tanggung sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan hidup ekosistem disekitarnya. Suhayati (2011) menyatakan bahwa penerapan CSR secara tulus akan membuat masyarakat sekitar respek terhadap Universitas, citra akan meningkat dan efek positifnya akan lebih dikenal dan disukai masyarakat sehingga daya tarik calon mahasiswa untuk kuliah di universitas tersebut lebih tinggi. Dengan mempromosikan praktik pembangunan berkelanjutan di dunia pendidikan, universitas mampu menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik tanggung jawab sosial (Chen dkk, 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.05/2007 pasal 5, pola tata kelola merupakan peraturan internal universitas yang menetapkan bahwa organisasi dan tata laksana mencakup struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, ketersediaan dan pengembangan sumber daya manusia serta efisiensi biaya; akuntabilitas mencakup kebijakan mekanisme/ prosedur, media pertanggungjawaban, dan periodisasi pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan transparansi dengan menerapkan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kemudahan memperoleh informasi bagi yang membutuhkan.

Pada penelitian sebelumnya hanya menguji tanggungjawab sosial universitas yang berdampak terhadap pengguna luar seperti perusahaan dan masyarakat tanpa melihat efek untuk pengguna internal dan tanpa mempertimbangkan pengaruh tanggungjawab sosial terhadap citra untuk universitas itu sendiri dan pada penelitian sebelumnya juga hanya menguji pengaruh tata kelola universitas terhadap citra universitas, dan seperti kita ketahui tanggung jawab sosial sangat terkait erat dengan tata kelola universitas dimana bagian indikator dari tatakelola di dalamnya meliputi tanggung jawab yang dikenal dengan istilah TARIF (transparan, akuntabilitas, responsibiliti, independensi dan dan fairness) untuk itu maka peneliti ingin menguji pengaruh dari keduanya yaitu tanggung jawab sosial universitas dan tata kelola universitas terhadap citra universitas. Responden yang menjadi objek dari penelitian ini adalah sivitas akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu mahasiswa, dosen dan karyawan. UIN Syarif Hidayatullah menjadi objek penelitian karena seperti kita ketahui UIN Syarif Hidayatullah mempunyai visi dan misi untuk menjadi universitas kelas dunia, namun berdasarkan hasil webometris tahun 2019 UIN Syarif Hidayatullah masih berada di posisi urutan ke 45. Hal ini menjadi tanggungjawab bagi sivitas akademik UIN

Syarif Hidayatullah untuk meningkatkan citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui peningkatan tanggungjawab sosial dan tata kelola.

Dahan & Senol (2012) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial universitas merupakan salah satu upaya untuk bersaing di dunia pendidikan, karena hal itu merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan universitas untuk mendapatkan reputasi yang baik. Di Indonesia penelitian tentang tanggung jawab sosial universitas telah dilakukan oleh Daulay (2012) yang menyatakan bahwa universitas dapat melakukan tanggung jawab sosial melalui program pengabdian kepada masyarakat, tidak hanya dilakukan pada lokasi yang jauh. Tetapi juga harus difokuskan pada pembangunan di lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar berdasarkan prinsip *peacefull co-existence* (hidup berdampingan secara damai) dan *simbiosis mutualism* (hidup saling menguntungkan) antara perguruan tinggi dengan stakeholdernya termasuk masyarakat sekitar perguruan tinggi tersebut. Wijaya & Krismiyati (2016) menjelaskan program tanggung jawab sosial universitas merupakan bagian dari program *public relations* untuk mempertahankan eksistensi di tengah persaingan antar perguruan tinggi yang semakin ketat. Program ini juga berdampak pada berbagai hal diantaranya peningkatan terhadap citra sebuah perguruan tinggi.

Menurut Rusdianto & Kuncoro (2012) manfaat yang diperoleh dengan memaksimalkan fungsi dari perguruan tinggi adalah aspek Tri Dharma perguruan tinggi yang ada di kampus akan mampu menjadi penggerak utama bagi masyarakat di sekitar, khususnya *home industri* yang membutuhkan fasilitator. Dengan memaksimalkan fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi akan mempunyai dampak yang luas secara umum.

Menurut Subagyo (2014) bagi perguruan tinggi, bentuk tanggung jawab sosial secara formal tersirat dalam Tri dharma perguruan tinggi yang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat. Implementasi tanggung jawab sosial tidak hanya terbatas pada pihak internal (dosen, karyawan, mahasiswa), tetapi juga pada pihak eksternal (lingkungan, industri, dunia usaha/industri, pemerintah daerah). Implementasi tanggung jawab sosial akan berdampak pada meningkatnya citra Universitas di mata stakeholder. Selain itu, keberadaan perguruan tinggi berdampak pada tumbuhnya usaha sektor non formal di sekitar kampus, yang akibatnya sektor ekonomi daerah meningkat.

H1: Tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap citra

Wijatno (2009) menjelaskan pencapaian tata kelola universitas dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi dan keadilan. Pada prakteknya, keseluruhan prinsip tersebut harus diterapkan untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Wahab & Rahayu (2013) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan tata kelola universitas pada perguruan tinggi negeri yang berstatus BHMN di Jawa Barat masih rendah, gambaran mengenai citra perguruan tinggi negeri yang berstatus BHMN di Jawa Barat dinilai masih kurang baik, penerapan *Good University Governance* yang diterapkan oleh masing-masing perguruan tinggi berpengaruh positif terhadap citra.

Rosyid dkk (2013) menunjukkan bahwa dosen mempunyai persepsi yang berbeda terhadap tata kelola universitas dibandingkan dengan karyawan dan mahasiswa. Sumarni (2010) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa independensi merupakan salah satu agenda

bagi perguruan tinggi di Indonesia, sehingga konsekuensi logis adanya otonomi perguruan tinggi adalah tata kelola yang baik. Karakteristik tata kelola mengidealkan Undang – Undang No.9 Tahun 2009 tentang BHP yang memiliki karakteristik yang sama dengan good governance yaitu: otonomi, partisipasi, akuntabel, transparansi, responsif dan keadilan. BLU merupakan intermediate solution bagi perguruan tinggi untuk mengelola lembaga keuangan publik.

H2 : Tata kelola berpengaruh terhadap citra

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel secara acak sederhana. Sampel penelitian terdiri dari karyawan, dosen dan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jumlah responden dalam penelitian ada 242 responden yang terdiri dari 131 mahasiswa, 55 dosen, dan 56 karyawan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. *Adapun persamaan matematis yang diajukan ialah:*

$$\text{CITRA} = \beta_0 + \beta_1 \text{USR} + \beta_2 \text{GUG} + \varepsilon$$

dimana:

CITRA = Citra Perguruan Tinggi

USR = *University Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Universitas)

GUG = *Good University Governance* (Tata Kelola Universitas)

Variabel USR merupakan tanggung jawab sosial universitas. Dalam variabel ini peneliti menggunakan indikator Subagyo (2014) yaitu tanggung jawab universitas yang terdiri dari tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab pilanthropi. Variabel GUG merupakan tata kelola universitas. Dalam variabel ini peneliti menggunakan indikator Wahab & Rahayu (2013) yang diterapkan oleh perguruan tinggi dan disesuaikan dengan prinsip GCG yaitu berdasarkan pada TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilities, Independensi dan Fairness). Sedangkan variabel citra perguruan tinggi menggunakan indikator penelitian Wahab & Rahayu (2013) yang diukur dari dimensi reputasi, personaliti, nilai etis dan identitas corporate.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini telah memenuhi uji validitas dan uji reliabilitas serta uji asumsi klasik yang terdiri atas uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap indikator dari variabel tanggungjawab sosial universitas mempunyai hasil yang beragam terhadap total citra.

Berdasarkan Tabel 1, total indikator untuk tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*) berpengaruh terhadap citra universitas. Hal ini bermakna tanggung jawab ekonomi berpengaruh positif terhadap citra. Hal ini mengindikasikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini telah berupaya memberikan fasilitas ekonomi dengan strategi aktivitas usaha yang bertujuan untuk meningkatkan profit dengan adanya unit-unit usaha. Selain itu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selalu berupaya dinamis dengan membuka program studi yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Program studi yang ditawarkan UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta sudah memenuhi kualitas yang diharapkan. Sisi positif lainnya yang menjadi nilai tambah adalah program studi umum yang ditawarkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus berupaya untuk meningkatkan nilai keislaman di dalamnya. Hal-hal tersebut mengakibatkan peningkatan terhadap citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Tabel 1. Hasil Uji Parsial Indikator USR terhadap Citra**

		Koefisien	Std. Error	t-stat
1	(Constant)	22,927	2,741	8,365
	TEC	,891	,185	4,804
	TLR	-,051	,182	-,282
	TETHIC	,975	,214	4,558
	TPHIL	1,085	,168	6,441

Akan tetapi, tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*) menunjukkan hasil yang sebaliknya. Hal ini bermakna tanggung jawab hukum tidak berpengaruh terhadap citra. Hal ini mengindikasikan kurangnya penerapan norma dan hukum yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Norma dan hukum yang berlaku masih belum adil dirasakan jika ada pelanggaran sanksi baik itu oleh mahasiswa, dosen dan karyawan sehingga masih belum efektif untuk meningkatkan citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Untuk total indikator dari ethics/value menunjukkan nilai uji t sebesar 4,558 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini bermakna tanggung jawab nilai-nilai etika berpengaruh terhadap peningkatan citra. Hal ini mengindikasikan bahwa operasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah sesuai dengan etika dan sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selalu berusaha untuk menerapkan unsur kebenaran dalam setiap aktivitasnya. Para pemangku kepentingan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga terus berupaya mengutamakan keseimbangan (*tawazun*) dalam menentukan kebijakan baik itu untuk dosen, karyawan dan mahasiswa. Nilai-nilai etika ini juga menunjukkan bahwa adanya sikap-sikap Islami yang selalu melekat pada diri mahasiswa, dosen dan karyawan. Hal-hal tersebut membuat peningkatan citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal inipun yang kebanyakan dibaca oleh para pencari kerja atau perusahaan-perusahaan di Indonesia yang umumnya memilih mahasiswa UIN untuk dipekerjakan karena adanya nilai-nilai Islami yang melekat pada diri mahasiswa atau alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Untuk total skor indikator philanthropic responsibilities menunjukkan nilai uji t 6,441 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,005. Artinya tanggung jawab philanthropic berpengaruh positif terhadap citra. Hal ini mengindikasikan bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah berkomitmen menerapkan kebijakan CSR sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawabnya sesuai dengan visi dan misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, CSR UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui program pengabdian masyarakat merupakan bentuk itikad baik yang akan memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga selalu bersikap

amanah terhadap masyarakat dan menggunakan konsep ihsan yaitu beroperasi dengan mendapatkan ridho Allah SWT. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga telah merealisasikan CSR dalam berbagai bidang terutama bidang pendidikan melalui program kkn dan beasiswa. Hal-hal tersebut diatas membentuk peningkatan citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang semakin bagus.

**Tabel 2. Hasil Uji Parsial Indikator GUG terhadap Citra**

	Koefisien	Std. Error	t-stat
(Constant)	34,514	2,660	12,973
TTR	,236	,104	2,258
TAK	,409	,159	2,573
TRES	,007	,231	,030
TIND	1,039	,302	3,441
TFAIR	,313	,263	1,190
TPART	,388	,154	2,515

Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap indikator dari variabel Good University Governance mempunyai hasil yang beragam terhadap total CITRA. Berdasarkan Tabel 2 total indikator untuk transparansi berpengaruh terhadap citra universitas. Hasil uji t menunjukkan nilai 2,258 dengan signifikansi 0,025 dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan sikap transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra. Hal ini mengindikasikan bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus berupaya transparansi dalam memberikan kemudahan akses informasi secara tepat, jelas dan akurat sesuai dengan visi dan misi universitas sehingga dapat meningkatkan arus informasi melalui kerjasama berbagai pihak. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga berupaya untuk memberikan transparansi laporan program kerja dan kinerja universitas yang sedang dan telah dicapai mengenai kurikulum, silabus, jadwal kerja/kuliah, prosedur kerja, perkuliahan dan birokrasi fasilitas lain yang dapat dimanfaatkan. Akhirnya inipun berdampak pada bagaimana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus berupaya memberikan transparansi dalam menangani keluhan dosen, staff dan mahasiswa dan itu dapat teratasi dengan sikap transparansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam penyampaian setiap kebijakan yang diambil. Hal-hal tersebut sebagai bagian dari tata kelola universitas yang akan mewujudkan transparansi menuju peningkatan citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang semakin baik.

Untuk tata kelola universitas yang berasal dari total skor indikator akuntabilitas menunjukkan nilai uji t 2,573 dan nilai signifikansi 0,011 lebih kecil dari 0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator akuntabilitas berpengaruh positif terhadap citra. Hal ini mengindikasikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah berusaha untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi mahasiswa, karyawan dan dosen. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga telah berupaya menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil secara proporsional. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah memberikan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil lingkup audit internal. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus berupaya menjalankan program kerja sesuai RENSTRA sehingga dapat mempertahankan citra

yang baik di mata dosen, staff dan mahasiswa, hal inipun berakibat pada pelaksanaan visi, misi dan strategi program kerjanya. Hal-hal tersebut terus dilakukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta guna mencapai peningkatan citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang lebih baik.

Untuk tata kelola universitas yang berasal dari total skor indikator responsibilities menunjukkan nilai uji t 0,03 dan nilai signifikansi 0,976 lebih besar dari 0,05. Hasil ini memperlihatkan bahwa indikator responsibilities tidak berpengaruh terhadap citra. Hal ini mengindikasikan bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belum mampu untuk memanfaatkan dana sesuai dengan kehati-hatian. Selain itu juga masih adanya uraian tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas dari setiap pejabat struktural. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta harus terus belajar untuk membangun suasana akademik yang kondusif dalam mendukung proses pembelajaran sebagai bentuk tanggung jawab sebuah universitas. Pembelajaran demi pembelajaran harus terus diikuti sesuai perkembangannya untuk menuju peningkatan citra UIN yang lebih baik ke depannya.

Untuk tata kelola universitas yang berasal dari total skor indikator independensi menunjukkan nilai uji t 3,441 dan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini bermakna bahwa indikator independensi berpengaruh positif terhadap citra. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap organ universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan, tidak saling mendominasi atau saling melempar tanggung jawab satu sama lain. Pengelola perguruan tinggi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya berupaya untuk supaya terhindar dari interpersi dan dominasi dari pihak manapun sehingga dapat mengambil keputusan secara objektif. Hal ini terus berupaya dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mencapai peningkatan citra yang lebih baik dari tahun ke tahun.

Untuk tata kelola universitas yang berasal dari total skor indikator fairness menunjukkan nilai uji t 1,190 dan nilai signifikansi 0,235 lebih besar dari 0,05. Artinya indikator fairness tidak berpengaruh terhadap citra. Hal ini mengindikasikan bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belum mampu untuk memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada universitas. Selain itu belum mampu memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, mahasiswa, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa adanya diskriminasi. Hal itupun berdampak terhadap kurangnya penerapan *reward* dan *punishment* kesemua pihak tanpa adanya diskriminasi. Artinya indikator fairness ini tidak mampu untuk memberikan pengaruh terhadap peningkatan citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang lebih baik.

Untuk tata kelola universitas yang berasal dari total skor indikator partisipasi menunjukkan nilai uji t 2,515 dan nilai signifikansi 0,013 lebih kecil dari 0,05. Artinya indikator partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra. Hal ini mengindikasikan bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ikut berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi yang terbentuk pada forum untuk menampung aspirasi yang representatif, jelas dan terbuka sehingga pengambilan keputusannya melibatkan semua pihak baik itu dosen, staff dan mahasiswa dalam kegiatan intern terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal – hal tersebut turut membentuk peningkatan citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Tabel 3. Hasil Uji Statistik t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	24,029	2,737		8,781	,000
TUSR	,532	,066	,553	8,006	,000
TGUG	,116	,033	,245	3,557	,000

Berdasarkan Tabel 3, maka diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{CITRA} = 24,029 + 0,532 \text{ USR} + 0,116 \text{ GUG}$$

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi ada atau tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Jika probabilitas t lebih kecil dari 0,05 maka  $H_a$  diterima dan menolak  $H_0$ , sedangkan jika nilai probabilitas t lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$ . Berikut disajikan hasil uji statistik t yang dilakukan:

Hipotesis pertama meneliti mengenai pengaruh tanggungjawab sosial terhadap citra. Tabel 3 menunjukkan hasil bahwa variabel USR menunjukkan nilai t sebesar 8,006 dengan probabilitas tingkat signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang artinya USR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Citra dan hipotesis 1 diterima.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Suhayati (2011), Dahan & Senol (2012), Daulay (2012) dan Rusdianto & Kuncoro (2012) yang menyatakan bahwa penerapan CSR secara tulus akan membuat masyarakat sekitar respek terhadap Universitas, citra akan meningkat dan efek positifnya akan lebih dikenal dan disukai masyarakat sehingga daya tarik calon mahasiswa untuk kuliah di universitas tersebut lebih tinggi. Menurut Dahan & Senol (2012) USR merupakan salah satu upaya untuk bersaing didunia pendidikan, karena USR merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan perguruan tinggi untuk mendapatkan reputasi yang baik.

Suhayati (2011) menyatakan Universitas yang telah melaksanakan CSR menunjukkan universitas tersebut telah melaksanakan tanggung jawab sosial tidak hanya kepada pihak internal tetapi juga pihak eksternal. Dengan demikian universitas yang telah menyalurkan CSR, keberadaannya dibutuhkan oleh stake holder dan akan meningkatkan citra positifnya. Muljo dkk (2014) menyatakan bahwa terdapat 18 faktor yang memengaruhi penerapan prinsip tata kelola yang baik.

Menurut Rusdianto & Kuncoro (2012) manfaat yang diperoleh dengan memaksimalkan fungsi dari perguruan tinggi adalah aspek Tri Dharma perguruan tinggi yang ada di kampus akan mampu menjadi penggerak utama bagi masyarakat di sekitar, khususnya home industri yang membutuhkan fasilitator. Dengan memaksimalkan fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi akan mempunyai dampak yang luas secara umum.

Menurut Subagyo (2014) bagi perguruan tinggi, bentuk tanggung jawab sosial secara formal tersirat dalam Tri dharma perguruan tinggi yang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat. Implementasi tanggung jawab sosial Universitas Nusantara PGRI Kediri tidak hanya terbatas pada pihak internal (dosen, karyawan, mahasiswa), tetapi juga pada pihak eksternal (lingkungan, industri, dunia usaha/industri, pemerintah daerah).

Hipotesis kedua meneliti mengenai pengaruh tata kelola universitas terhadap Citra. Tabel 3 menunjukkan hasil bahwa variabel tata kelola universitas menunjukkan nilai t sebesar 3,557 dengan probabilitas tingkat signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang artinya GUG berpengaruh positif dan signifikan terhadap Citra dan hipotesis 2 diterima.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wahab & Rahayu (2013) yang menunjukkan bahwa penerapan tata kelola berpengaruh positif terhadap citra universitas. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sumarni (2010) yang menunjukkan bahwa Independensi merupakan salah satu agenda bagi perguruan tinggi di Indonesia, sehingga konsekuensi logis adanya otonomi perguruan tinggi adalah tata kelola yang baik atau dikenal dengan *good governance*. Karakteristik *good governance* mengidealkan Undang-undang No. 9 tahun 2009 tentang BHP yang memiliki karakteristik yang sama dengan *good governance*, yaitu: otonomi, partisipasi, akuntabel, transparansi, responsif dan keadilan. Kegiatan *USR* dapat memberikan dampak besar tetapi dalam jangka waktu yang lebih panjang karena target sasaran secara perlahan akan mengetahui kualitas dan kontribusi perguruan tinggi tersebut (Wijaya & Krismiyati, 2016). Satuan Pengawas Internal memiliki pengaruh positif dalam pencapaian *good university governance* (Puspitarini, 2012; Chen dkk, 2015; Lubis, 2018).

## SIMPULAN

Hasil regresi yang dilakukan telah menunjukkan bahwa tanggung jawab universitas berpengaruh positif terhadap Citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, hasil empiris telah menunjukkan pula bahwa tata kelola berpengaruh positif terhadap Citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Implikasi hasil penelitian ini ada dua yaitu untuk penelitian selanjutnya dan untuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis dapat memperluas ruang lingkup sampel penelitian yang tidak hanya melihat ruang lingkup internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Akan tetapi, turut pula memperluas kepada pihak eksternal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta menambah variabel yang dapat berpengaruh terhadap citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar hasil penelitiannya dapat lebih sempurna. Sedangkan untuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diharapkan senantiasa berusaha untuk mewujudkan diri sebagai universitas yang mempunyai tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap mahasiswa, dosen dan karyawan dan terlebih lagi terhadap masyarakat sekitar UIN Syarif Hidayatullah sebagai interaksi awal menuju universitas yang mandiri dan bertanggung jawab sosial sehingga dapat meningkatkan citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**PUSTAKA ACUAN**

- Bokhari, A. A. H. (2017). Universities Social Responsibilities (USR) and Sustainable Development: A Conceptual Framework. *International Journal of Economics and Management Studies*, 4(12), 1-9.
- Chen, S. H., Nasongkhla, J., & Donaldson, J. A. (2015). University Social Responsibility (USR): Identifying an Ethical Foundation within Higher Education Institutions. *TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 14(4), 165-172.
- Dahan, G. S., & Senol, I. (2012). Corporate Social Responsibility in Higher Education Institutions: Istanbul Bligi University Case. *American International Journal of Contemporary Research*, 2(3), 95-103.
- Daulay, P. (2012). Tanggung Jawab Sosial Universitas Terbuka dalam Pencapaian MDGs. *Proceeding Seminar Nasional FISIP UT*.
- Hadiwijaya, HY. (2013). Campus Social Responsibility (CSR) Universitas Brawijaya, Diskusi Kampus – CSR dan Kampus, 22 Desember
- Lubis, N. G., Wahyuni, E. D., & Zubaidah, S. (2018). Analisis Pengungkapan University Social Responsibility di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Jural Akademi Akuntansi*, 1(1), 54-63.
- Muljo, H. H., Wicaksono, A., & Riantono, I. W. (2014). Optimalisasi Penerapan Prinsip Good Governance Bidang Akademik dalam Upaya Mewujudkan Good University Governance. *Binus Business Review*, 5(1), 91-100.
- Puspitarini, N. D. (2012). Peran Satuan Pengawasan Intern dalam Pencapaian Good University Governance pada Perguruan Tinggi Berstatus PK BLU. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 1-5.
- Rosyid, A., Fakhrina, A., & Huda, M. (2014). Survei Atas Implementasi Good University Governance Studi Kasus STAIN Pekalongan. *Jurnal Penelitian*, 11(1), 172-188.
- Rusdianto, H., & Kuncoro. (2015). Opini Masyarakat Sekitar Kampus Universitas Muara Kudus terhadap Program CSR (Corporate Social Responsibility). *Proceeding Seminar Nasional Educational Wellbeing*
- Subagyo. (2014). Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perguruan Tinggi dan Dampaknya terhadap Citra Kampus di Universitas Nusantara Kediri PGRI Kediri. *Nusantara of Research*, 1(2), 101-110.
- Suhayati, E. (2010). Penerapan CSR untuk Meningkatkan Citra Universitas. *Majalah Ilmiah Unikom*, 7(2), 157-166.
- Sumarni, S. (2012). Good University Governance dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Program Studi PAI. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga
- Wahab, A. A., & Rahayu, S. (2013). Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good University Governance Terhadap Citra Serta Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing Perguruan Tinggi Negeri Pasca Perubahan Status Menjadi BHMN (Survei Pada Tiga Perguruan Tinggi Negeri Berstatus BHMN di Jawa Barat). *Jurnal Administrasi Pendidikan*, XVII(1), 154-173.
- Wijatno, S. (2009). *Pengelolaa Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif, dan Ekonomis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijaya, L. S., & Krismiati. (2016). Pertanggungjawaban Sosial Universitas: Implementasi Model Cycle Relations. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 195-210.

## **Variabel Fundamental Perusahaan Dalam Memprediksi Keputusan Hedging**

**Sofyan Hadinata\*, Diah Anggari Hardianti**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
sofyan.hadinata@uin-suka.ac.id

\*)Penulis Korespondensi

### **Abstract**

One of the major risks facing multinational companies in international trade is the risk of fluctuations in foreign exchange rates. The company makes an effort to reduce the impact of these risks through risk management using a hedging decision. This study aims to test empirically the effect of the company's fundamental variables in predicting hedgings decision. Fundamental variables in this study use financial ratios, namely profitability, leverage, liquidity and growth opportunities. The data in the study used panel data from 2014 to 2017. This study used data analysis techniques using logistic regression tests. Logistic regression test is used because the dependent variable uses dummy data, namely companies that do hedging are given a score of 1 and those who do not do hedging are given a score of 0. The results of the study show that the variable profitability, leverage, and growth opportunities have a positive effect on the hedging decision. The variable liquidity has a negative effect on the hedging decision.

**Keywords:** profitability, leverage, liquidity, growth opportunities, hedging decision

### **Abstrak**

Salah satu risiko besar yang dihadapi perusahaan multinasional dalam perdagangan internasional adalah risiko fluktuasi kurs valuta asing. Perusahaan melakukan usaha untuk mengurangi dampak dari risiko tersebut melalui manajemen risiko dengan menggunakan keputusan hedging. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh variabel fundamental perusahaan dalam memprediksi keputusan hedging. Variabel fundamental dalam penelitian ini menggunakan rasio keuangan yaitu profitabilitas, leverage, likuiditas, dan peluang pertumbuhan. Data dalam penelitian menggunakan data panel dari tahun 2014 sampai 2017. Penelitian ini menggunakan uji regresi logistik. Uji regresi logistik dilakukan karena variabel dependen menggunakan data dummy yaitu perusahaan yang melakukan hedging diberi skor 1 dan yang tidak melakukan hedging diberi skor 0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, leverage, dan peluang pertumbuhan berpengaruh positif terhadap keputusan hedging. Variabel likuiditas berpengaruh negatif terhadap keputusan hedging.

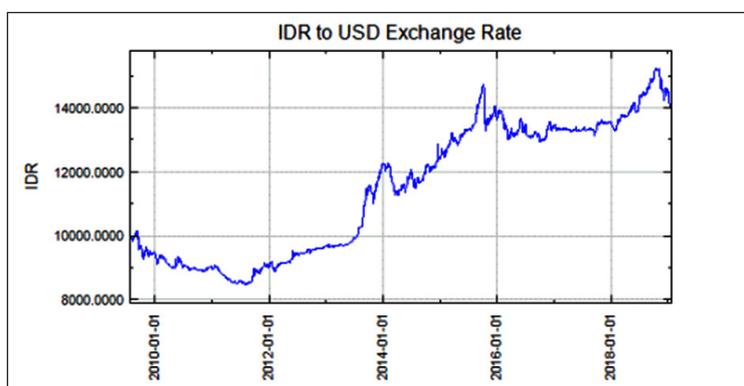
**Kata Kunci:** profitabilitas, leverage, peluang pertumbuhan, keputusan hedging

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi internasional yang pesat ditandai dengan adanya perdagangan antarnegara baik perdagangan barang dan atau modal. Perdagangan internasional melibatkan berbagai negara. Oleh karena itu, perdagangan internasional menyebabkan meningkatnya risiko usaha. Pada hakikatnya, sebuah perusahaan dalam melaksanakan aktivitas bisnis memiliki *return* dan risiko. Risiko harus diperhatikan dalam menentukan nilai antara risiko dan *return* untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Van Horne & Wachowicz, 1998).

Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (Brigham & Houston, 2010). Risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Risiko bisa datang kapan saja dan di mana saja, sehingga sulit dihindari. Jika risiko tersebut menimpa pada sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut bisa mengalami kerugian yang signifikan. Untuk mengelola dengan baik risiko-risiko tersebut, perusahaan membutuhkan manajemen risiko untuk mengelola dengan baik risiko-risiko tersebut. Manajemen risiko adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengelola risiko sehingga sebuah organisasi mampu bertahan bahkan mengoptimalkan risiko (Hanafi, 2016). Ketika perusahaan melakukan transaksi antarnegara, perusahaan memiliki risiko yang lebih besar. Risiko yang sering dihadapi oleh perusahaan yang melakukan perdagangan internasional adalah fluktuasi nilai tukar, suku bunga, juga harga komoditas yang dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan.

Gambar 1. Kurs Valuta Asing Dolar Amerika



Sumber: <https://www.sahamok.com/grafik-usd-vs-idr-rupiah/>

Fluktuasi mata uang asing yang tidak terduga akan berpengaruh pada penjualan perusahaan, harga, dan juga laba perusahaan. Ketika nilai mata uang rupiah melemah, maka hutang terhadap perusahaan di negara lain dengan mata uang internasional akan meningkat, karena nilai uang yang harus dibayar lebih tinggi. Hal tersebut menjadi risiko yang penting untuk diperhatikan bagi perusahaan yang melakukan perdagangan internasional. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar ini mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karena fluktuasi nilai tukar ini akan mempengaruhi jumlah hutang perusahaan. Semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, maka nilai hutang perusahaan akan meningkat. Perubahan nilai tukar mata uang asing yang diakibatkan fluktuasi kurs valuta asing dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 menunjukkan terjadinya fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar amerika dari tahun 2010 hingga 2018. Dari hal tersebut perusahaan yang melakukan transaksi bisnis antarnegara bisa mengalami kerugian akibat perubahan kurs, apabila transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Untuk meminimalisir kerugian pertukaran nilai mata uang tersebut, maka dibutuhkan manajemen risiko perubahan nilai kurs mata uang dengan menggunakan *hedging* atau lindung nilai (Beams dkk, 2018).

*Hedging* merupakan sebuah pengelolaan risiko yang pada dasarnya mentransfer risiko tersebut kepada pihak lain yang lebih bisa mengelola risiko lebih baik (Hanafi, 2016). Bank Indonesia menegaskan bahwa transaksi lindung nilai (*hedging*) penting untuk dilaksanakan (Abubakar & Handayani, 2016). Hal ini jika merujuk pada manfaat dari pelaksanaan lindung nilai bagi kepentingan makroekonomi yaitu mampu menjaga stabilitas nilai tukar, meminimalkan *sovereign risk* akibat risiko gagal bayar pinjaman luar negeri sektor swasta, menjaga integritas sektor keuangan Indonesia, menciptakan pasar valas domestik yang lebih sehat dan berkembang serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penggunaan *hedging* dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan pada faktor internal yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan *hedging*. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *hedging* adalah variabel fundamental yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Variabel fundamental menurut Beaver dkk (1970) merupakan variabel-variabel yang dianggap berhubungan dengan risiko, karena risiko dapat ditentukan menggunakan karakteristik pasar dan nilai-nilai fundamental suatu perusahaan. Nilai-nilai fundamental dalam suatu perusahaan dapat dilihat menggunakan rasio-rasio keuangan perusahaan. Melalui laporan keuangan suatu perusahaan maka, investor dapat mengetahui informasi yang penting bagi untuk mengambil keputusan investasi termasuk mengukur suatu rasio pada suatu perusahaan.

Horigan (1965) dalam Tuasikal (2001) menyatakan bahwa rasio keuangan berguna untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan, hasil operasi, kondisi keuangan perusahaan saat ini dan pada masa mendatang, serta sebagai pedoman bagi investor mengenai kinerja masa lalu dan masa mendatang. Variabel fundamental yang diangkat dalam penelitian ini adalah rasio keuangan yang terdiri dari rasio profitabilitas, *leverage*, rasio likuiditas dan peluang pertumbuhan. Peneliti menggunakan keempat variabel tersebut karena masing-masing variabel tersebut mewakili setiap rasio keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan. Beberapa penelitian terdahulu yang menghubungkan rasio *profitability* terhadap keputusan *hedging* pernah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Aretz dkk (2007), Klimczak (2008), dan Clark & Mefteh (2010) menunjukkan bahwa variabel *profitability* berpengaruh positif terhadap keputusan *hedging*. Namun, penelitian yang dilakukan Mnasri dkk (2013) menunjukkan hubungan antara *profitability* dengan keputusan *hedging* adalah negatif.

Ertugrul dkk (2008), Clark & Judge (2005), Wang & Lida (2011), Spano (2012), dan Ariani & Sudiartha (2017) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *leverage* terhadap kebijakan keputusan *hedging*. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dkk (2012), Shaari

dkk (2013), Widyagoca & Lestari (2016), dan Aritonang dkk (2018) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap keputusan *hedging*.

Sementara itu, penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh likuiditas terhadap keputusan *hedging* pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Ahmad dkk (2012), dan Chaundry dkk (2014) menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan *hedging*, hal ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widyagoca & Lestari (2016), Afza & Alam (2011) yang mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap keputusan *hedging*, yang berarti jika tingkat likuiditas meningkat maka probabilitas pengambilan keputusan *hedging* juga meningkat. Penelitian mengenai variabel *growth opportunities* terhadap keputusan *hedging* sudah diteliti oleh Nance & Smith (1993) dan Ahmad dkk (2012) yang menemukan hasil bahwa variabel *growth opportunities* berpengaruh positif terhadap keputusan *hedging*. Namun, hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Klimczak (2008), dan Ameer (2010) menemukan variabel *growth opportunities* berpengaruh negatif terhadap keputusan *hedging*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang belum konsisten, maka perlu ada pengujian lebih lanjut untuk melihat variasi hasil yang mungkin berbeda. Selain itu untuk membedakan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan sektor otomatis dan komponen, dan pertambangan batubara sebagai populasi dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan populasi tersebut karena perusahaan pertambangan batubara sering mengalami menghadapi perubahan harga batubara, sehingga ketika melakukan kegiatan ekspor impor pasti menghadapi masalah fluktuasi kurs valuta asing. Selain itu perusahaan otomatis dan komponen, dan pertambangan batubara lebih sering melakukan transaksi dengan pihak luar negeri, misalnya pengiriman bahan baku, pengiriman peralatan, dan sebagainya. Perbedaan lain dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menfokuskan faktor internal perusahaan saja yaitu dengan menggunakan variabel fundamental perusahaan. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *hedging* adalah variabel fundamental yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan.

Profitabilitas adalah alat ukur untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan sumber pendapatan yang dimiliki perusahaan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran kesehatan perusahaan. Untuk melangsungkan hidup suatu perusahaan, maka suatu perusahaan harus berada dalam kondisi yang menguntungkan. Selain itu, tingkat efisiensi dan efektifitas operasional suatu perusahaan juga digambarkan menggunakan rasio ini, sehingga rasio ini penting bagi perusahaan. Semakin besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba, maka semakin besar juga peluang perusahaan untuk melakukan *hedging*. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi cenderung lebih cepat untuk melakukan ekspansi bisnisnya, karena kondisi pasar internasional tidak terduga, maka setiap perubahan kecil yang terjadi dapat memicu kerugian yang besar terhadap perusahaan. Sebagai bentuk antisipasi kerugian di kemudian hari, maka perusahaan memutuskan untuk melakukan *hedging*.

Penelitian sebelumnya yang menggunakan profitabilitas dalam memprediksi keputusan *hedging* perusahaan telah dilakukan oleh Aretz dkk (2007), Klimczak (2008), dan Clark &

Mefteh (2010) yang menunjukkan bahwa variabel *profitability* berpengaruh positif terhadap keputusan *hedging*. Berdasarkan pada pemaparan tersebut, maka peneliti mengusulkan:

(H1): *Profitability* berpengaruh positif terhadap *keputusan hedging*.

Rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya. Secara umum, variabel *leverage* dalam penelitian sebelumnya diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* yang menggambarkan perbandingan antara total hutang dengan total modal mampu menggambarkan perbandingan antara hutang dan modal dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya. Semakin tinggi *debt to equity ratio (DER)* ini menunjukkan perusahaan semakin berisiko. Semakin tinggi *DER* pada sebuah perusahaan maka menunjukkan ketergantungan perusahaan terhadap hutang semakin tinggi, sehingga menunjukkan risiko gagal bayar yang tinggi pula. Dengan adanya risiko gagal bayar yang tinggi, maka keputusan perusahaan untuk melakukan *hedging* akan meningkat. Hasil penelitian terdahulu yang membuktikan adanya pengaruh positif antara *leverage* terhadap *keputusan hedging* telah dilakukan oleh Clark & Judge (2005), Ertugrul dkk (2008), Wang & Lida (2011), Spano (2012), Ariani & Sudiartha (2017), dan Kurniawan & Asandimitra (2018). Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka dapat dirumuskan:

(H2): *Leverage* berpengaruh positif terhadap *keputusan hedging*.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk merubah asetnya ke dalam bentuk tunai tanpa ada kesenjangan harga yang signifikan. Rasio ini membandingkan utang jangka pendek terhadap aset lancarnya. Rasio yang digunakan adalah *current ratio (CR)*. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan *hedging* di antaranya Bartram dkk (2009), Ameer (2010), Chaundry dkk (2014), serta Ariani & Sudiartha (2017). Semakin tinggi *current ratio* maka tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya semakin besar, sehingga keputusan untuk menerapkan kebijakan *hedging* semakin kecil. Hal ini dikarenakan risiko kesulitan keuangan yang muncul cenderung rendah. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat diajukan:

(H3): *Liquidity* berpengaruh negatif terhadap *keputusan hedging*.

Peluang pertumbuhan (*growth opportunities*) adalah suatu peluang yang menggambarkan pertumbuhan suatu perusahaan pada masa depan. Variabel *growth opportunities* sudah digunakan oleh penelitian terdahulu dalam memprediksi keputusan *hedging* suatu perusahaan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *growth opportunities* berpengaruh positif terhadap keputusan *hedging* (Nance dkk, 1993; Ameer, 2010; Ahmad dkk, 2012). Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi lebih akan membutuhkan dana yang lebih banyak di masa depan, baik dari dana internal maupun eksternal. Hal ini disebabkan karena kebutuhan investasinya untuk memenuhi kebutuhan dalam membiayai pertumbuhannya semakin meningkat (Nance dkk, 1993). *Hedging* dapat mengurangi biaya investasi sehingga mengurangi kemungkinan kesulitan keuangan dengan melindungi aliran masa depan arus kas dari perubahan nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas perusahaan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat dituliskan:

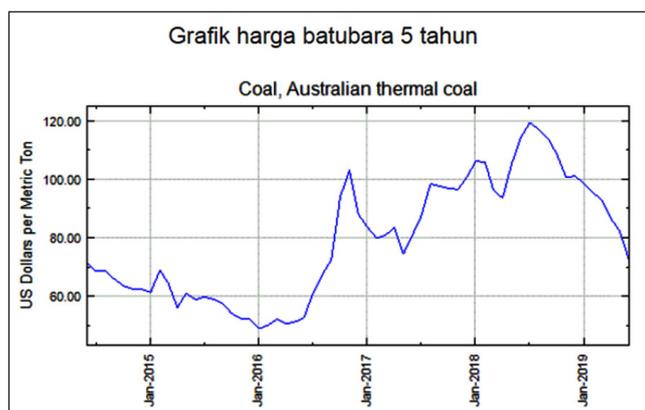
(H4): *Growth opportunities* berpengaruh positif terhadap *keputusan hedging*.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausalitas. Penelitian ini menggunakan Model Respon Dikotomis (MRD). Model ini diukur menggunakan variabel dummy. Nilai 1 digunakan untuk perusahaan yang melakukan hedging dengan instrumen derivatif, sementara nilai 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan *hedging* dengan instrumen derivatif. Populasi untuk penelitian ini adalah semua perusahaan *automotive and component* serta pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Adapun pemilihan perusahaan *automotive and component* dan pertambangan batubara sebagai populasi dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Banyaknya pesaing dalam industri tersebut, membuat perusahaan harus dapat meminimalisir risiko seefektif mungkin, mengingat konsumen dapat pindah ke produk lain dengan cepat. Hal tersebut membuat perusahaan banyak menggunakan sarana pengalihan risiko seperti lindung nilai atau *hedging*.
2. Peneliti juga memilih sektor pertambangan batubara sebagai perusahaan yang diteliti karena sering mengalami adanya fluktuasi harga batubara.

Gambar 2. Fluktuasi harga batubara



Sumber: [www.sahamok.co.id](http://www.sahamok.co.id)

3. Perusahaan yang ada di dalam populasi jenis perusahaan *automotive and component* dan pertambangan batubara lebih sering melakukan transaksi dengan pihak luar negeri, misalnya pengiriman bahan baku, pengiriman peralatan, dan sebagainya. Hal tersebut dibuktikan dengan data kemenperin yang menyebutkan bahwa sekitar 64% dari total industri di Indonesia masih mengandalkan bahan baku, bahan penolong, serta barang modal impor untuk mendukung proses produksi, menurut pejabat Kementerian Perindustrian. Karena itu, mayoritas industri rentan terhadap fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. "Jumlah tersebut berasal dari sembilan sektor industri yakni permesinan dan logam, otomotif, elektronik, kimia dasar, makanan dan minuman, pakan ternak, tekstil dan produk tekstil (TPT), barang kimia lain, serta pulp dan kertas," kata Anshari Bukhari, Sekjen Kementerian Perindustrian.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dari suatu populasi dengan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor *automotive and component* serta pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2017.
2. Perusahaan menyampaikan laporan keuangan secara kontinyu yang telah diaudit pada periode 2014-2017.
3. Perusahaan yang memiliki eksposur transaksi (memiliki utang dan piutang dalam mata uang asing) selama periode 2014-2017.
4. Perusahaan dengan equitas positif dari tahun 2014-2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. Hal ini karena variabelnya merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (nonmetrik) (Ghozali, 2018). Model regresi logistik juga dilakukan dengan memasukkan variabel dependen yang berupa kategori. Kategori 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan *hedging* dan kategori 1 untuk perusahaan yang melakukan *hedging*. Langkah pertama adalah menilai *overall fit model* terhadap data. Beberapa tes dilakukan untuk menilai hal ini. Cara pertama adalah melalui fungsi *likelihood*, yaitu membandingkan angka *-2 log likelihood* pada awal (*block 0*) dan angka *-2 log likelihood* pada *block 1*. Jika terjadi penurunan angka *-2 log likelihood* maka menunjukkan model regresi yang baik.

**Tabel 1. Block 0: Beginning Block Iteration History<sup>a,b,c</sup>**

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0 1	105,358	,000

Sumber: Data diolah (2019)

Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan perbandingan antara nilai *-2 log likelihood* pada blok awal dan angka *-2 log likelihood* pada blok akhir. Hasil perhitungan nilai *-2 log likelihood* terlihat bahwa nilai blok awal (*block 0*) adalah 105,358 dan nilai *-2 log likelihood* pada blok akhir (*block 1*) adalah 72,654 mengalami penurunan yang menunjukkan model regresi yang baik.

**Tabel 2. Block 1 : Method = Enter Iteration History<sup>a,b,c,d</sup>**

Iteration		-2 Log		Coefficients			
		likelihood	Constant	ROA	LEV	LIQ	GO
Step 1	1	78,505	-1,152	5,177	,313	-,161	,281
	2	73,717	-1,256	9,319	,413	-,427	,396
	3	72,699	-1,124	11,703	,445	-,678	,458
	4	72,654	-1,090	12,289	,457	-,746	,473
	5	72,654	-1,087	12,319	,458	-,750	,474
	6	72,654	-1,087	12,319	,458	-,750	,474

Sumber: Data diolah (2019)

Cara kedua adalah melalui Nagelkerke's R Square. Nagelkerke's R Square merupakan modifikasi dari koefisien Cox and Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai satu (1). Nilai Nagelkerke's R Square dapat diinterpretasikan seperti nilai *Rmultiple regression*. Tujuannya adalah mengetahui seberapa besar kombinasi variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.

**Tabel 3. Model Summary**

Step	-2 Log Likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	72,654 <sup>a</sup>	,350	,466

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai Nagelkerke's R Square sebesar 0,466. Hal ini menggambarkan bahwa model mempunyai kekuatan prediksi model sebesar 46,6% yang dijelaskan oleh empat variabel: *profitability*, *leverage*, *liquidity*, dan *growth opportunities*, sedangkan 53,4% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model.

Menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow's *Goodness of Fit Test* sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *goodnes fit model* tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai *Statistic Hosmer and Lemeshow Goodness of fit* lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

Tabel 4 menunjukkan bahwa besarnya nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit* sebesar 12,355 dengan probabilitas signifikansi 0,136 yang nilainya di atas 0,05 sehingga  $H_0$  diterima. Hal ini berarti model regresi layak dipakai untuk analisis selanjutnya.

**Tabel 4. Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	12,355	8	,136

Sumber: Data diolah (2019)

Setelah melakukan pengujian secara menyeluruh, maka selanjutnya melakukan uji signifikansi variabel independen secara individual. Uji signifikansi menggunakan uji statistika Wald untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen di dalam model regresi logistik. Uji Wald digunakan untuk menguji apakah masing-masing koefisien regresi logistik signifikan. Berdasarkan hasil dari uji Wald pada model Tabel 5 ditunjukkan bahwa terdapat 4 variabel independen (X) yaitu *profitability*, *leverage*, *liquidity*, dan *growth opportunities* yang berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *keputusan hedging* dengan taraf signifikansi sebesar 0,7% (0,007), 1,9% (0,019), 4,7% (0,047) dan 0,6% (0,006).

Tabel 5. Hasil Empiris

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I.for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 <sup>a</sup>	ROA	12,319	4,549	7,334	1	,007	223969,659	30,065	1668467757,860
	LEV	,458	,195	5,524	1	,019	1,580	1,079	2,314
	LIQ	-,750	,377	3,956	1	,047	,472	,226	,989
	GO	,474	,171	7,691	1	,006	1,606	1,149	2,246
	Constant	-1,087	,748	2,114	1	,146	,337		

a. Variable(s) entered on step 1: ROA, LEV, LIQ, GO.

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 5, maka persamaan logistik yang dapat terbentuk sebagai berikut:  
 $Hedging = -1,087 + 12,319(ROA) + 0,458(LEV) - 0,750(LIQ) + 0,474(GO)$

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik, variabel *profitability* yang diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)* mempunyai nilai Wald sebesar 12,319, berarti bahwa *profitability* berpengaruh positif terhadap *keputusan hedging* pada perusahaan *automotive and component* dan pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan analisis tersebut, maka hipotesis alternatif pertama yang diajukan diterima. Variabel *profitability* yang signifikan terhadap *keputusan hedging* ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula *keputusan hedging*. Semakin besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan maka semakin besar juga peluang perusahaan untuk melakukan *hedging*.

Perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi cenderung lebih cepat untuk melakukan ekspansi bisnisnya, karena kondisi pasar internasional tidak dapat diprediksi maka setiap perubahan kecil yang terjadi dapat memicu kerugian yang besar terhadap perusahaan yang melakukan transaksi dalam jumlah besar. Untuk mengantisipasi perusahaan dari risiko pasar yang tak terduga, maka perusahaan akan cenderung melakukan *hedging*. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya, *hedging* merupakan salah cara perusahaan dalam mengelola risiko dari kerugian yang terjadi di pasar internasional. Kerugian tersebut salah satunya adalah perubahan kurs mata uang asing. Oleh karena itu, walaupun tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan tinggi namun perusahaan harus tetap mengantisipasi risiko dengan melakukan *hedging*. Temuan hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aretz dkk (2007), Klimczak (2008), dan Clark & Mefteh (2010) yang menunjukkan bahwa variabel *profitability* berpengaruh positif terhadap *keputusan hedging*.

Pengujian dilakukan menggunakan analisis regresi logistik dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Hasil pengujian regresi logistik dapat dilihat bahwa variabel *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* mempunyai nilai Wald sebesar 0,458 dengan nilai signifikansi sebesar 0,019. Nilai signifikansi yang dihasilkan  $DER < 0,05$  berarti bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *keputusan hedging* pada perusahaan *automotive and component* dan pertambangan batubara. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis alternatif kedua yang diajukan diterima. Semakin tinggi DER pada sebuah perusahaan maka menunjukkan ketergantungan perusahaan terhadap hutang semakin tinggi. Hutang

yang semakin tinggi menunjukkan risiko gagal bayar yang tinggi pula. Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi cenderung akan melakukan *hedging*. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi nilai hutang perusahaan dari risiko fluktuasi mata uang yang akan menyebabkan tingkat hutang perusahaan semakin tinggi. Temuan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ertugrul dkk (2008), Clark & Judge (2005), Spano (2012), Wang & Lida (2011), dan Kurniawan dan Asandimitra (2018) yang menunjukkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap *keputusan hedging*.

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik, variabel *Liquidity* yang diproksikan dengan *Current Ratio* (CR) mempunyai nilai *Wald* sebesar -0,750 dengan nilai signifikansi sebesar 0,047. Nilai signifikansi yang dihasilkan  $CR < 0,05$  berarti bahwa *Liquidity* berpengaruh negatif terhadap *Keputusan hedging* pada perusahaan *automotive and component* dan pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis alternatif ketiga yang diajukan diterima. Semakin tinggi *current ratio* maka tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya semakin besar, sehingga keputusan untuk menerapkan kebijakan *hedging* semakin kecil. Hal ini dikarenakan risiko kesulitan keuangan yang muncul cenderung rendah. Risiko kesulitan keuangan yang cenderung rendah, mengakibatkan perusahaan cenderung tidak melakukan *hedging*. Temuan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ameer (2010), dan Chaundry dkk (2014) yang menunjukkan bahwa variabel *liquidity* berpengaruh negatif terhadap *keputusan hedging*.

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik, variabel *Growth Opportunities* yang diproksikan dengan *Market to Book Value* (MTBV) mempunyai nilai *Wald* sebesar 0,474, hal ini berarti bahwa *Growth Opportunities* berpengaruh positif terhadap *Keputusan hedging* pada perusahaan *automotive and component dan pertambangan batubara* di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang memiliki *growth opportunities* yang tinggi akan melakukan ekspansi, ketika melakukan ekspansi tentunya dana yang dikelola juga akan terus bertambah yang menyebabkan kemungkinan perusahaan melakukan transaksi hutang piutang. Transaksi utang piutang perusahaan yang meningkat akan mengakibatkan perusahaan untuk melakukan *hedging*. Temuan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nance dkk (1993), Ameer (2010), Ahmad dkk (2012), Putro (2012), dan Kussulistyanti & Mahfudz (2016) memperoleh hasil bahwa variabel peluang pertumbuhan (*growth opportunities*) berpengaruh positif terhadap *keputusan hedging*.

## SIMPULAN

Berdasarkan pada analisis data menggunakan uji regresi logistik diperoleh hasil penelitian bahwa variabel profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap kebijakan *hedging* pada perusahaan otomotif dan komponen, serta pertambangan batubara periode 2014-2017. Variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap *keputusan hedging* perusahaan sektor otomotif dan komponen dan pertambangan batubara. Variabel *liquidity* berpengaruh negatif terhadap *keputusan hedging* perusahaan sektor *automotive and component* dan pertambangan batubara. Adapun variabel *growth opportunities* yang diproksikan dengan *Market to Book Value* (MTBV) berpengaruh positif terhadap *keputusan hedging* pada perusahaan *automotive and component* dan pertambangan

batubara di Bursa Efek Indonesia. Adapun implikasi dari hasil penelitian ini tentunya bagi perusahaan yang melakukan transaksi antarnegara perlu mempertimbangkan faktor internal keuangan perusahaan, seperti profitabilitas, *leverage*, *liquidity*, dan *growth opportunity*, selain itu keadaan makro suatu negara yang mungkin juga memiliki dampak terhadap fluktuasi valuta asing di dalam pengambilan *keputusan hedging*.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu tidak menentukan instrumen derivatif yang digunakan untuk risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta tidak memisahkan sampel yang dominan menggunakan utang dengan kurs valuta asing dan utang yang didominasi oleh kurs lokal. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih spesifik lagi dalam menetapkan instrumen derivatif yang dapat digunakan oleh perusahaan serta memisahkan sampel. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang di luar penelitian yang dapat mempengaruhi *keputusan hedging*. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk menambahkan beberapa variabel yang mempengaruhi *keputusan hedging* seperti suku bunga, nilai perusahaan, *financial distress*, atau pajak.

## PUSTAKA ACUAN

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2016). Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*) Dalam Praktik Perbankan dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Kontrak Nasional. *Rechtidee*, 11(1), 84-101.
- Afza, T., & Alam, A. (2011). Determinants of Corporate Hedging Policies: A Case of Foreign Exchange and Interest Rate Derivative Usage. *African Journal of Business Management*, 5(14), 5792-5797.
- Ahmad, N., & Haris, B. (2012). Evidence From Malaysian Non-financial Companies. *Research Journal of Finance and Accounting*, 3(9), 79-87.
- Ameer, R. (2010). Determinants of Corporate Hedging Practices in Malaysia. *International Business Research*, 3(2), 1-11.
- Aretz, K., Bartram, S. M., & Dufey, G. (2007). Why Hedge? Rationales for Corporate Hedging and Value Implications. *Journal of Risk Finance*, 8(5), 434- 449.
- Ariani, N. N. N., & Sudhiarta, G. M. (2017). Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Keputusan *Hedging* Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(1), 347-374.
- Aritonang, E. W. R. Br., Daat, S. C., & Andrianti, H. N. (2018). Faktor-faktor dalam Pengambilan Keputusan Lindung Nilai (*Hedging*) pada Instrumen Derivatif Valuta Asing pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), 96-113.
- Bartram, S. M., Brown, G. W., & Fehle, F. R. (2009). International Evidence on Financial Derivatives Usage. *Journal Financial Management*, 38(1), 185-206.
- Beams, F. A. J. H. A., Bettinghaus, B., & Smith, K. A. (2018). *Advance Accounting Thirteenth Edition*. United Kingdom: Pearson.
- Beaver, W., Kettler, P., & Scholes, M. (1970). The Association Between Market Determined and Accounting Determined Risk Measures. *The Accounting Review*, 45(4), 654-682
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2010). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Edisi Kesebelas*. Jakarta: Salemba Empat.

- Chaundry, N., Mehmood, M. S., & Mehmood, A. (2014). Determinants of Corporate *Hedging* Policies and Derivatives Usage In Risk Management Practices of Non-financial Firms. *Wulfenia Journal*, 21(7), 293-310.
- Clark, E., & Judge, A. (2005). Motives for Corporate Hedging: Evidence from the UK. *Annals of Financial Economics (AFE)*, 1(1), 1-20.
- Clark, E., & Mefteh, S. (2010). Foreign Currency Derivatives Use, Firm Value and the Effect of the Exposure Profile: Evidence from France. *International Journal of Business*, 15(2), 183-196.
- Ertugrul, M., Sezer, Ö., & Sirmans, C F. (2008). Financial Leverage, CEO Compensation, and Corporate Hedging: Evidence from Real Estate Investment Trusts. *Journal Real Estate Finance Economic*, 36(1), 53-80.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, M. (2016). *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Klimczak, K. M. (2008). Corporate Hedging and Risk Management Theory: Evidence from Polish Listed Companies. *The Journal of Risk Finance*, 9(1), 20-39
- Kurniawan, D. P., & Nadia, A. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Instrumen Derivatif Sebagai Pengambilan Keputusan *Hedging* Pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2015. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 6(1), 1-11.
- Kussulistyanti, M. J. W. A., & Mahfudz. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan *Hedging* dengan Derivatif Valuta Asing (Studi Pada Perusahaan Non-Finansial yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2011-2014). *Diponegoro Journal of Management*, 5(3), 1-14.
- Mnasri, M., Dionne, G., & Gueiye, J. (2013). How do Firms Hedge Risks? Empirical Evidence from Oil and Gas Producers. *CIRRELT*, 25, 1-88
- Nance, D., Clifford, W., Smith, J., & Smithson, C. W. (1993). On the Determinants of Corporate *Hedging*. *The Journal of Finance*, 48(1), 267- 284.
- Putro, S. H. (2012). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Instrumen Derivatif sebagai Pengambilan Keputusan *Hedging*. *Diponegoro Business Review*, 1(1), 1-11.
- Shaari, N. A., Hasan, N. A., Palanimally, Y. R., & Haji, R. K. M. (2013). The Determinants of Derivative Usage: A Study on Malaysian Firms. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 5(2), 1-17.
- Spano, M. (2012). A Survey of The Theoretical Models of Corporate Hedging. *Departimento di Economia. Università degli Studi dell'Insubria Via Monte Generoso, 71, 21100 Varese, Italy*.
- Tuasikal A. (2001). Penggunaan Informasi Akuntansi untuk Memprediksi Return Saham: Studi terhadap Perusahaan Pemanufakturan dan Non Pemanufakturan. *Symposium Nasional Akuntansi IV*. Bandung.
- Van Horne, J. C., & Wachowicz, J. M. (1998). *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wang, X., & Fan, L. (2011). The Determinants of Corporate Hedging Policies. *International Journal of Business and Social Science*, 2(6), 29-38.
- Widyagoca, I. G. P. A., & Lestari, P. V. (2016). Pengaruh *Leverage, Growth Opportunities*, dan *Liquidity* Terhadap Pengambilan Keputusan *Hedging* PT. Indosat Tbk. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(2), 1282-1308.

## **Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia**

**Azizah Kartika Rahmawati<sup>1\*</sup>, S.R. Kartika Sari<sup>2</sup>, Herry Hermawan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Merdeka Madiun

<sup>1</sup>Azizahkartika@gmail.com, <sup>2</sup>syarifah@unmer-madiun.ac.id,

<sup>3</sup>heryhermawan@unmer-madiun.ac.id

<sup>\*</sup>Penulis Korespondensi

### **Abstract**

The purpose of this study was to determine the level of efficiency between conventional commercial banks and Islamic commercial banks. The sampling technique used in this study was purposive sampling by taking state-owned banks and Islamic commercial banks with the highest assets. Efficiency measurement in this study uses the Data Envelopment Analysis (DEA) method. The results of this study indicate that there are differences in efficiency between conventional commercial banks and Islamic commercial banks. Overall, each bank has an efficiency level of 93.67% (conventional commercial banks) and 99.99% (Islamic commercial banks). These results indicate that Islamic commercial banks are more efficient than conventional commercial banks.

**Keywords:** efficiency, data envelopment analysis, conventional banks, Islamic banks

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi antara bank umum konvensional dan bank umum syariah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan mengambil bank BUMN dan bank umum syariah yang memiliki aset tertinggi. Pengukuran efisiensi dalam penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Variabel input yang digunakan dalam penelitian adalah Aktiva Tetap, Simpanan, dan Biaya Tenaga Kerja, sedangkan variabel outputnya adalah Total Kredit dan Pendapatan Operasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efisiensi antara bank umum konvensional dan bank umum syariah selama periode 2013-2017. Secara keseluruhan masing-masing bank memperoleh tingkat efisiensi sebesar 93,67% (bank umum konvensional) dan 99,99% (bank umum syariah). Hasil tersebut menunjukkan bahwa bank umum syariah lebih efisien dibandingkan bank umum konvensional.

**Kata Kunci:** efisiensi, data envelopment analysis, bank konvensional, bank syariah

## PENDAHULUAN

Penilaian efisiensi bank menjadi sangat penting dengan kondisi seperti ini, karena efisiensi merupakan gambaran kinerja suatu bank sekaligus menjadi faktor yang harus diperhatikan bank untuk bertindak rasional dalam meminimumkan tingkat risiko yang dihadapi dalam menghadapi kegiatan operasinya. Analisis mengenai efisiensi menjadi sangat penting karena penghimpunan dan peyaluran pembiayaan yang ekspansif tanpa memperhatikan faktor efisiensi akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank yang bersangkutan (Muharam & Pusvitasari, 2007).

Efisiensi merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang optimal dengan tingkat input yang ada, atau mendapatkan tingkat input yang minimum dengan tingkat output tertentu. Dengan diidentifikasinya alokasi input dan output, dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab ketidakefisiensian.

Efisiensi merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tujuan utama dari *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan nilai efisiensi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul. Keberadaan *stakeholder* akan sangat mempengaruhi pola pikir dan persepsi manajemen terhadap kepentingan praktik akuntansi perusahaan (Chariri, 2007).

Untuk mengukur efisiensi perbankan tidak hanya dapat dilakukan dengan melihat perbandingan indikator kinerja perbankan dan rasio keuangan saja. Pengukuran efisiensi perbankan yang dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, seperti rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut ialah sangat sulit diinterpretasikan, karena pengurangan biaya belum tentu menandakan efisiensi. Pengurangan biaya sering kali berdampak pada kualitas produk dan jasa yang selanjutnya berdampak pada pendapatan. Sehingga terdapat beberapa metode lain yang digunakan dalam mengukur efisiensi yaitu metode non-parametrik dengan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan metode parametrik dengan *Stochastic Frontier Approach* (SFA). Kedua metode ini dianggap lebih baik daripada metode dengan menggunakan rasio keuangan.

Terdapat beberapa penelitian yang telah melakukan penelitian tingkat efisiensi bank syariah dengan bank konvensional. Ferrari dan Sudarsono (2011) dengan menggunakan DEA menemukan bahwa tingkat efisiensi di bank syariah cukup beragam. Bahkan pada aspek intermediari, bank konvensional justru menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih baik.

Ramly & Hakim (2017) dengan menggunakan DEA dua tahap, dimana tahap pertama menggunakan DEA untuk mengukur efisiensi masing-masing bank. Selanjutnya tahap kedua menggunakan uji t untuk membandingkan efisiensi diantara keduanya. Mereka menemukan bahwa terdapat perbedaan tingkat efisiensi antara bank konvensional dengan bank syariah. Namun, hasil berbeda didapat oleh Sunarsih (2017), dimana pada penelitiannya tidak

menemukan perbedaan tingkat efisiensi antara bank syariah dengan bank konvensional. Temuan Sunarsih menunjukkan bahwa baik bank syariah maupun bank konvensional memiliki tingkat efisiensi yang secara rerata sama.

Pambuko (2016) menggunakan DEA dua tahap, yaitu pada tahap pertama menggunakan DEA dan tahap kedua menggunakan regresi tobit. Penelitiannya menemukan bahwa bank syariah yang lebih kecil memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi dibandingkan bank syariah yang besar. Hasil ini serupa dengan temuan Cahyaningsih dkk (2017) dengan menggunakan alata analisis DEA menemukan bahwa bank syariah Mandiri memiliki tingkat efisiensi lebih rendah jika dibandingkan dengan bank syariah Bukopin dan bank BNI syariah. Hasil ini memberikan masukan bagi manajemen untuk mampu meningkatkan efisiensinya.

Alur proses transformasi variabel input yang dipilih menjadi bentuk output ini adalah seberapa besar fungsi bank dilihat dari seberapa besar jumlah simpanan yang mampu dihimpun oleh bank untuk disalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit, sehingga akan menghasilkan pendapatan operasonal dari hasil penyaluran kredit tersebut. Biaya Tenaga Kerja merupakan sumber daya input yang penting dalam menjalankan kegiatan operasional bank karena tenaga kerja sebagai pelaku kegiatan operasional bank. Pengukuran dalam efisiensi ini menghubungkan efisiensi terhadap tingkat produksi. Analisis ini selanjutnya akan menghasilkan perumusan *frontier* interaksi antara input dalam mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan (Purwanto, 2011)

Melihat pada berbagai temuan penelitian yang menunjukkan perbedaan hasil ketika melakukan perbandingan tingkat efisiensi antara bank syariah dengan bank konvensional, maka terlihat bahwa masih ada kesenjangan penelitian yang dapat diteliti lebih lanjut mengenai tingkat efisiensi di kedua bank tersebut. Sehingga, hal ini akan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam penelitian mengenai pengukuran tingkat efisiensi antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Oleh karenanya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur perbandingan efisiensi perbankan syariah dengan perbankan konvensional di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, maka akan dapat menganalisis tingkat perbandingan efisiensi perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia pada tahun 2013-2017.

## METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah dipublikasikan. Populasi dalam penelitian ini adalah bank konvensional dan bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2013-2017. Pengambilan sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang didasarkan pada kriteria yaitu: Pertama, bBank umum konvensional dan bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia yang berskala nasional selama periode pengamatan 2013-2017. Kedua, Bank umum konvensional dan bank umum syariah tersebut melaporkan laporan keuangan dan catatan atas laporan tahun 2013 sampai dengan 2017 secara berturut-turut. Ketiga, Bank umum konvensional dan bank umum syariah yang bermata uang rupiah (Rp.). Keempat, Bank umum konvensional dan bank umum syariah

yang sudah memenuhi syarat delisting. Kelima, Bank umum konvensional dan bank umum syariah yang tidak mengalami kerugian. Keenam, Bank umum konvensional dan bank umum syariah yang sudah diaudit. Ketujuh, merupakan Bank BUMN dan bank syariah yang memiliki asset tertinggi. Dengan demikian yang dianggap memenuhi kriteria di atas untuk dijadikan sampel Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel input meliputi: Aktiva Tetap, Simpanan, dan Biaya Tenaga Kerja serta variabel output: Total Kredit dan Pendapatan Operasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah metodologi non-parametrik, dengan metodologi yang dikenal dengan istilah *Data Envelopment Analysis* (DEA). DEA menghitung efisiensi teknis (*Technical Efficiency*) untuk seluruh unit. Skor efisiensi untuk setiap unit adalah relatif, tergantung pada tingkat efisiensi dari unit-unit lainnya di dalam sampel. Setiap unit dalam sampel dianggap memiliki tingkat efisiensi yang tidak negatif, dan nilainya antara 0 hingga 1, dimana satu menunjukkan efisiensi yang sempurna. Kemudian unit-unit yang memiliki nilai satu ini digunakan dalam membuat envelope untuk frontier efisiensi. Unit-unit lainnya yang ada di dalam envelope menunjukkan tingkat inefisiensi (Hadad dkk, 2003). Efisiensi teknik perbankan diukur dengan menghitung rasio antara output dan inputnya. DEA akan menghitung bank yang menggunakan input  $n$  untuk menghasilkan output  $m$  yang berbeda (Huda & Nasution, 2014).

$$h_s = \frac{\sum_{i=1}^m u_i y_{is}}{\sum_{j=1}^n v_j x_{js}}$$

Dimana:

$H_s$  = efisiensi bank  $s$

$M$  = output bank  $s$  yang diamati

$N$  = input bank  $s$  yang diamati

$Y_{is}$  = jumlah output  $i$  yang diproduksi oleh bank  $s$

$X_{js}$  = jumlah input  $j$  yang diproduksi oleh bank  $s$

$U_i$  = bobot output  $i$  yang dihasilkan oleh bank  $s$

$V_j$  = bobot input  $j$  yang digunakan oleh bank  $s$  dan  $i$  dihitung dari 1 ke  $m$  serta  $j$  hitung dari 1 ke  $n$

Persamaan diatas menunjukkan adanya penggunaan satu variabel input dan satu output. Rasio efisiensi ( $h_s$ ), kemudian dimaksimumkan dengan kendala sebagai berikut (Sutawijaya & Lestari, 2009):

$$\text{Memaksimumkan } h_s = \frac{\sum_{i=1}^m u_i y_{is}}{\sum_{j=1}^n v_j x_{js}} \leq 1; r = \dots, N$$

Dimana  $u_i$  dan  $v_j \geq 0$

$N$  mewakili jumlah bank dalam sampel dan  $r$  merupakan jenis bank yang dijadikan sampel dalam penelitian. Pertidaksamaan pertama menjelaskan bahwa adanya rasio untuk unik kegiatan ekonomi (UKE) lain tidak lebih dari 1, sementara pertidaksamaan kedua

berbobot positif. Angka rasio akan bervariasi antara 0 sampai dengan 1. Bank dikatakan efisien apabila memiliki angka rasio mendekati 1 atau 100 persen, begitu pula sebaliknya apabila mendekati 0 menunjukkan efisiensi bank yang semakin rendah. Pada DEA, setiap bank dapat menentukan bobotnya masing-masing dan menjamin bahwa pembobotannya yang dipilih akan menghasilkan ukuran kinerja yang terbaik (Sutawijaya & Lestari, 2009; Aini, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang disajikan pada Tabel 1 dapat dijelaskan: Pertama, nilai Aktiva Tetap bank umum konvensional memiliki nilai minimum sebesar 14,24% (Bank BTN tahun 2013), sedangkan nilai Aktiva Tetap bank umum konvensional maksimum sebesar 17,42% (Bank Mandiri tahun 2017). Mean Aktiva Tetap bank umum konvensional adalah sebesar 16,1558 dengan standart deviasi sebesar 0,91904. Kedua, nilai Simpanan bank umum konvensional memiliki nilai minimum sebesar 17,69% (Bank BTN tahun 2013), sedangkan nilai simpanan bank umum konvensional maksimum sebesar 20,55% (Bank BRI tahun 2017). Mean simpanan bank umum konvensional adalah sebesar 19,5525 dengan standart deviasi sebesar 1,01142. Ketiga, nilai Biaya Tenaga Kerja bank umum konvensional memiliki nilai minimum sebesar 14,05% (Bank BTN tahun 2014), sedangkan nilai Biaya Tenaga Kerja bank umum konvensional maksimum sebesar 16,83% (Bank BRI tahun 2017). Mean simpanan bank umum konvensional adalah sebesar 15,6758 dengan standart deviasi sebesar 0,92209. Keempat, nilai Total Kredit bank umum konvensional memiliki nilai minimum sebesar 18,60% (Bank BTN tahun 2013), sedangkan nilai Total Kredit bank umum konvensional maksimum sebesar 20,68% (Bank BRI tahun 2016). Mean simpanan bank umum konvensional adalah sebesar 19,9091 dengan standart deviasi sebesar 0,67075. Kelima, nilai Pendapatan Operasional bank umum konvensional memiliki nilai minimum sebesar 14,84% (Bank BRI tahun 2015), sedangkan nilai Pendapatan Operasional bank umum konvensional maksimum sebesar 18,36% (Bank BTN tahun 2017). Mean Pendapatan Operasional bank umum konvensional adalah sebesar 16,2992 dengan standart deviasi sebesar 0,69216.

**Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Bank Umum Konvensional**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Aktiva Tetap	20	14.24	17.42	16.1558	.91904
Simpanan	20	17.69	20.55	19.5525	1.01142
Biaya Tenaga Kerja	20	14.05	16.83	15.6758	.92209
Total Kredit	20	18.60	20.68	19.9091	.67075
Pendapatan Operasi	20	14.84	18.36	16.2992	.69216
Valid N (listwise)	20				

Sumber: hasil olahan data

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang disajikan pada tabel 2 dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, nilai Aktiva Tetap bank umum syariah memiliki nilai minimum sebesar 11,97% (Bank BNI syariah tahun 2013), sedangkan nilai Aktiva Tetap bank umum syariah maksimum sebesar 20,48% (Bank Mandiri Syariah tahun 2013). Mean Aktiva Tetap bank umum syariah adalah sebesar 14,1366 dengan standart deviasi sebesar 2,36479. Kedua, nilai Simpanan bank umum syariah memiliki nilai minimum sebesar 14,39% (Bank BNI syariah tahun 2013), sedangkan nilai Simpanan bank umum syariah maksimum sebesar 16,27% (Bank Mandiri Syariah tahun 2017). Mean Simpanan bank umum syariah adalah sebesar 15,4404 dengan standart deviasi sebesar 0.54175. Ketiga, nilai Biaya Tenaga Kerja bank umum syariah memiliki nilai minimum sebesar 10,42% (Bank BRI syariah tahun 2013), sedangkan nilai Biaya Tenaga Kerja bank umum syariah maksimum sebesar 14,29% (Bank Mandiri Syariah tahun 2017). Mean Biaya Tenaga Kerja bank umum syariah adalah sebesar 12,8781 dengan standart deviasi sebesar 1,31810.

**Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif Bank Umum Syariah**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AKTIVA TETAP	20	11.97	20.48	14.1366	2.36479
SIMPANAN	20	14.39	16.27	15.4404	.54175
BIAYA TENAGA KERJA	20	10.42	14.29	12.8781	1.31810
TOTAL KREDIT	20	15.40	17.84	16.6527	.70626
PEND. OPERASI	20	11.83	15.80	13.7566	1.53624
Valid N (listwise)	20				

Sumber: hasil olahan data

Keempat, nilai Total Kredit bank umum syariah memiliki nilai minimum sebesar 15,40% (Bank Muamalat tahun 2014), sedangkan nilai Total Kredit bank umum syariah maksimum sebesar 17,84% (Bank Muamalat tahun 2017). Mean Total Kredit bank umum syariah adalah sebesar 16,6527 dengan standart deviasi sebesar 0.70626. Kelima, nilai Pendapatan Operasional bank umum syariah memiliki nilai minimum sebesar 11,83% (Bank BNI syariah tahun 2015), sedangkan nilai Pendapatan Operasional bank umum syariah maksimum sebesar 15,80% (Bank Mandiri syariah tahun 2017). Mean Pendapatan Operasional bank umum syariah adalah sebesar 13,7566 dengan standart deviasi sebesar 1.53624.

Tabel 3 menunjukkan hasil analisis tingkat efisiensi menggunakan metode DEA *frontier* dengan variabel input berupa Aktiva Tetap, Simpanan dan Biaya Tenaga Kerja serta variabel output berupa Total Kredit dan Pendapatan Operasional menunjukkan bahwa rata-rata efisiensinya pada bank umum konvensional adalah sebesar 0,93674541 atau 93,67%. Nilai tersebut menunjukkan efisiensi relatif baik (nilai efisiensi mendekati 1 menunjukkan semakin efisien). Tingkat efisiensi pada bank umum konvensional yang tertinggi yaitu mencapai 0.98874985 atau 98,87% pada Bank BNI, sedangkan efisiensi terendah yaitu sebesar 0.87806106 atau 87,80% pada Bank BRI.

**Tabel 3. Hasil Analisis Efisiensi Metode DEA Bank Umum Konvensional**

No.	Nama Bank	Tingkat Efisiensi
1	BRI	0.87806106
2	Mandiri	0.90188193
3	BNI	0.98874985
4	BTN	0.97828880
Mean efisiensi:		0.93674541

Sumber: data sekunder yang diolah

Tabel 4 menunjukkan hasil analisis tingkat efisiensi menggunakan metode DEA *frontier* dengan variabel input berupa Aktiva Tetap, Simpanan dan Biaya Tenaga Kerja serta variabel output berupa Total Kredit dan Pendapatan Operasional menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi pada bank umum syariah khususnya bank syariah yang memiliki asset tertinggi adalah sebesar 0,9999039 atau 99,9%. Nilai tersebut menunjukkan efisiensi relatif baik (nilai efisiensi mendekati 1 menunjukkan semakin efisien). Tingkat efisiensi pada bank umum Syariah yang tertinggi yaitu mencapai 0.99999183 atau 99,91% pada Bank Mandiri syariah, sedangkan efisiensi terendah yaitu sebesar 0.99998930 atau 99,89% pada Bank BRI syariah.

**Tabel 4. Hasil Analisis Efisiensi Metode DEA Bank Umum Syariah**

No.	Nama Bank	Tingkat Efisiensi
1	Mandiri Syariah	0.99999183
2	Muamalat	0.99999087
3	BRI Syariah	0.99998930
4	BTN Syariah	0.99998958
Mean efisiensi:		0.99999039

Sumber: data sekunder yang diolah

Hasil analisis mendapatkan bahwa rata-rata efisiensi pada bank umum konvensional selama periode penelitian diperoleh sebesar 0,93674541 atau 93,67%, dan rata-rata efisiensi bank umum syariah diperoleh sebesar 0,9999039 atau 99,9%. Hasil tersebut menyatakan bahwa bank umum syariah lebih efisien dibandingkan dengan bank umum konvensional. Meskipun rata-rata efisiensi bank umum konvensional dinyatakan relatif baik, namun bank umum syariah memiliki nilai yang mendekati 100%, berbeda dengan bank umum konvensional yang hanya memiliki rata-rata 93,67%.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, antara bank umum konvensional dan bank umum syariah terdapat adanya perbedaan efisiensi. Bank umum syariah menunjukkan nilai efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan bank umum konvensional. Bank-bank besar seperti bank umum konvensional justru memiliki tingkat efisiensi yang kurang baik, sedangkan

bank-bank dengan kapasitas kecil seperti bank syariah justru memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Hal ini disebabkan karena output yang dikeluarkan pada bank konvensional relatif besar serta perubahan anggaran atau realisasi biaya yang dikeluarkan pada bank umum konvensional cenderung relatif tinggi dibandingkan bank umum syariah.

Ketidakefisienan output terjadi pada total kredit atau pembiayaan dan pendapatan. Pertama, jumlah pembiayaan lebih kecil dari target yang telah ditentukan, hal tersebut dapat terjadi karena adanya pemborosan anggaran yang dikeluarkan, sehingga dapat mempengaruhi target yang telah ditentukan, serta prinsip kehati-hatian oleh bank sebelum memberikan kredit. Namun kehati-hatian yang dilakukan oleh bank tidak menghambat target yang ditentukan. Cara agar tidak menghambat target yang ditentukan yaitu dengan menurunkan tingkat suku bunga kredit, hal ini dilakukan agar banyak masyarakat baik perorangan atau perseroan mengajukan pembiayaan, sehingga target pembiayaan dapat tercapai dalam pembangunan ekonomi. Kedua, jumlah pendapatan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, langkah yang digunakan yaitu dengan meningkatkan pendapatan bunga dan pendapatan operasional. Perbaikan kualitas SDM harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan operasional dan pendapatan operasional lainnya, karena hal ini berhubungan dengan produktivitas kerja dan kreativitas karyawan untuk menghasilkan output yang maksimal.

Industri perbankan syariah dinilai lebih efisien dibandingkan perbankan konvensional, dilihat dari sisi teknis operasional dan tahapan penjangkauan dana pihak ketiga (DPK) hingga penyaluran dana pembiayaan syariah bagi masyarakat. Salah satu bukti bahwa bank syariah lebih efisien ditunjukkan oleh rasio pembiayaan dibandingkan dana pihak ketiga, FDR perbankan syariah ternyata lebih tinggi dibandingkan rasio penyaluran kredit terhadap DPK (loan to deposit ratio, LDR) perbankan konvensional. Lebih tingginya efisiensi bank umum syariah yang disebabkan karena perbankan syariah memiliki porsi dana murah lebih sedikit dibandingkan perbankan konvensional, sedikitnya porsi dana murah pada perbankan syariah berdampak pada tingginya biaya dana (*cost of fund*) yang harus ditanggung. Selain itu, skala usaha bank syariah akan mampu menentukan tingkat efisiensi suatu perbankan. Edward & Anwar (2015) menemukan bahwa semakin besar skala usaha bank syariah, maka akan semakin efisiensi bank syariah tersebut.

Hasil analisis ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novandra (2017) bahwa terdapat perbedaan tingkat efisiensi antara bank umum konvensional dan bank umum syariah. Dengan metode *Data Envelopment Analysis* menunjukkan bahwa bank umum syariah lebih efisien dibandingkan dengan bank umum konvensional. Bank umum konvensional dikatakan kurang atau tidak efisien karena terdapat pemborosan penggunaan output, sehingga belum mampu memanfaatkan potensi kemampuan berproduksi yang dimiliki secara optimal.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat efisiensi antara perbankan konvensional dan perbankan syariah dengan pendekatan non-parametrik menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA). Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga

bank umum konvensional yang memiliki nilai rata-rata mendekati angka 1 atau dikatakan hampir memenuhi standar efisiensi, yaitu Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri. Sedangkan Bank BRI hanya memiliki tingkat efisiensi rendah. Hasil rata-rata efisiensi yang diperoleh bank umum konvensional menunjukkan bahwa bank tersebut dikatakan kurang efisien, karena rata-rata yang diperoleh kurang dari satu. Penyebab tidak atau kurangnya efisiensi pada bank umum konvensional karena anggaran atau realisasi biaya yang di keluarkan pada bank tersebut relatif besar.

Pada bank umum syariah hampir seluruhnya memiliki tingkat efisiensi yang baik. Hasil rata-rata yang diperoleh bank umum syariah menunjukkan bahwa bank tersebut dikatakan efisien, karena rata-rata yang diperoleh mendekati angka satu atau memenuhi standart efisiensi. Semakin besar anggaran yang dikeluarkan akan semakin tidak efisien begitupun sebaliknya. Jadi terdapat perbedaan efisiensi antara bank umum konvensional dan bank umum syariah, secara keseluruhan masing-masing memperoleh tingkat efisiensi yang berbeda, dimana bank umum syariah lebih tinggi dibandingkan bank umum konvensional. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bank umum syariah dikatakan lebih efisien dibandingkan bank umum konvensional.

## PUSTAKA ACUAN

- Aini, A. N. (2014). Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) (Periode tahun 2008-2012). *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Cahyaningsih, P., Purnomo, D., Harun., & Harmarini, M. I. (2017). Kinerja Beberapa Bank Syariah Berdasar Tingkat Efisiensi Melalui Pengukuran DEA. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, XII(2), 133-140.
- Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Edward, Y. M., & Anwar, Z. A. (2015). Analisis Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia (periode 2010-2013). *Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 12(1), 99-108.
- Ferrari, N., & Sudarsono, H. (2011). Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah dan Konvensional dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 1(2), 141-148.
- Hadad, M. D., Santoso, W., Mardanugraha, E., & Ilyas, D. (2003). Pendekatan Parametrik Efisiensi Perbankan Indonesia. *Working Paper*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2014). *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muharam, H., & Pusvitasari, R. (2007). Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (periode Tahun 2005). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(3), 80-166.
- Novandra, R. (2017). Analisis Perbandingan Efisiensi Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia: *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 22(2), 183-193.
- Pambuko, Z. B. (2016). Determinan Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia: Two Stages Data Envelopment Analysis. *Cakrawala*, XI(2), 178-194.

- Purwanto, R. (2011). Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) (Periode 2006-2010). *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ramly, A. R., & Hakim, A. (2017). Pemodelan Efisiensi Bank di Indonesia: Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 7(2), 131-148.
- Sunarsih. (2017). Analisis Perbandingan Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 51(1), 225-290.
- Sutawijaya, A., & Lestari, E. P. (2009). Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pasca Krisis Ekonomi: Sebuah Studi Empiris Penerapan DEA. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 49-67. <https://doi.org/10.23917/jep.v10i1.808>.

## **Effect of Risk Based Bank Rating on Financial Performance of Sharia Commercial Banks**

**Diah Munawaroh<sup>1\*</sup>, Peny Cahaya Azwari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

<sup>1</sup>diahmunawaroh56@gmail.com, <sup>2</sup>penycahayaazwari\_uin@radenfatah.ac.id

<sup>\*</sup>Penulis Korespondensi

### **Abstract**

Risk Based Bank Rating (RBBR) is one of the assessments of the new health level of the bank in lieu of CAMELS in accordance in Bank Indonesia Regulation No. 13/1/PBI/ 2011. This study aims to examine the effect of Risk-Based Bank Ratings (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital) on Financial Performance (ROA). The method used is descriptive statistics, determination of regression models, classic assumption tests, multiple linear regression methods and hypothesis testing. The type of data in this study uses panel data. Based on the results of the study indicate that the ratio of NPF, GCG and CAR does not significantly influence ROA. While the ratio of FDR, BOPO and NOM has a significant effect on ROA.

**Keywords:** risk profile, good corporate governance, income, capital

### **Abstrak**

RBBR adalah salah satu penilaian tingkat kesehatan baru bank sebagai pengganti CAMELS sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Peringkat Bank Berbasis Risiko (Profil Risiko), Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Penghasilan dan Modal) tentang Kinerja Keuangan (ROA). Metode yang digunakan adalah statistik deskriptif, penentuan model regresi, uji asumsi klasik, metode regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data panel. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio NPF, GCG dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan rasio FDR, BOPO dan NOM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

**Kata Kunci:** profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik, pendapatan, modal

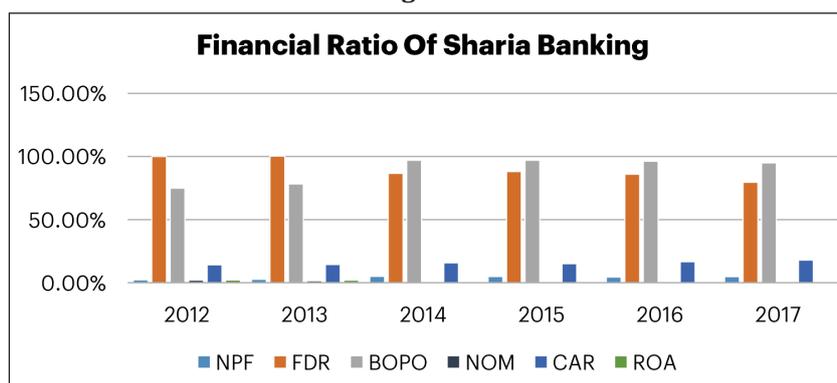
## INTRODUCTION

In today's modern world, the role of banks in advancing the economy of a country is enormous. Based on experience in the event of the global financial crisis, the need to increase the effectiveness of the application of Risk Management and Good Corporate Governance (GCG) needs to be able to identify problems early, carry out appropriate and fast corrective actions and banks are more resilient in facing financial crises. In connection with this matter, Bank Indonesia refined the method for assessing the soundness of commercial banks, namely by using the Risk Based Bank Rating (RBBR) risk approach both individually and on a consolidated basis, which included evaluating GCG factors (Hamdani, 2016).

The Risk Based Bank Rating (RBBR) method emerged from the background of global financial reform as a member of the G-20 to improve the supervision framework based on risk and assess the bank's soundness by increasing awareness of existing risk management (Dira, 2014). Assessment of bank soundness stated in Bank Indonesia Regulation No. 13/1/PBI/2011 as stipulated in Circular Letter No. 13/24/DPNP dated October 25, 2011 Bank Indonesia implemented an assessment of Bank Soundness using a risk approach (Risk Based Bank Rating / RBBR) both individually and on a consolidated basis which included an assessment of four factors, namely Risk Profile, Good Corporate Governance (GCG), Earnings, and Capital. This method is effective from January 1, 2012, namely assessing the Bank's Soundness at the end of December 2011 and on the effective date and revoking SE BI No. 6/23/DPNP dated 31 May 2004 concerning the Soundness Rating System of Commercial Banks using the CAMELS method (Sari 2016).

Measurement of financial performance can be done using financial statements as a basis for determining the measurement of financial performance (Sujarwani, 2017). The ratio used to measure and compare banking financial performance is Return On Equity (ROE) and Return On Assets (ROA) (Suhardjono, 2012). Both can be used to measure the amount of financial performance in the banking industry, but generally Return On Equity (ROE) only measures returns obtained from investment of the owner of the company (Siamat, 2007). While, Return On Assets (ROA) is to measure effectiveness in generate profits to utilize the total assets of the company. The greater the Return On Assets (ROA) of a bank, the greater the level of profit achieved by the bank and the better financial position in terms of assets (Martono, 2004). The ROA conditions in Sharia Commercial Banks obtained from Islamic Banking Statistics, ROA decreased and continued to decline until its peak in 2014 and increased again in 2015-2017 as the quality of Islamic banking has not improved and governance in Islamic banks still has to be improved. In this factor the financial ratios used for Risk Based Bank Rating, namely the ratio of NPF, FDR, Good Corporate Governance, NOM, BOPO, CAR and ROA as the dependent variable.

Figure 1



Source: Financial Services Authority (2018)

Figure 1 shows that financial ratios from year to year have changed. In 2012 and 2013 the ratio of Return on Assets (ROA) was in good condition at 2.14% and 2.00% while in 2014 the ROA ratio was in an unfavorable condition as much as 0.41% due to high non-performing financing so banks in obtaining profits declined from the asset side and increased again in 2015-2017. In 2012 and 2013 Non Performing Financing (NPF) was in very good condition at 2.22% and 2.62% while in 2014-2017 it was in good condition but needed better supervision for the following year if the amount of financing was problematic the bigger it shows that the level of risk financing at the bank is quite high, the bank is in a condition of financing problems. In 2012 and 2013 financing to Deposits Ratio (FDR) was in an unfavorable condition as 100.00% and 100.32% while in 2014-2017 the FDR was in good condition that was able to meet liquidity and profit Sharia banks would also increase.

In 2012-2013 the Operational Cost Ratio to Operational Income (BOPO) was in good condition at 74.94% and 78.21% while in 2014-2017 it was in an unfavorable condition, this indicates the amount of operational costs incurred bank so that it is not balanced with the bank's operating income. In 2012 and 2013 the ratio of Net Operating Margin (NOM) was in good condition at 2.04% and 1.49% while in 2014-2017 the NOM ratio was in an unfavorable condition so that the possibility of the bank in a troubled condition due to the large distribution financing to customers. In 2012-2017 the Capital Adequacy Ratio (CAR) ratio was in good condition and continued to increase so that the stronger the bank in bearing the risk of any risky financing.

The Indonesian Banking Development Institute (LPPI) conducted a survey related to the practice of good corporate governance in the banking industry, indicating that the implementation of GCG in the banking sector began to deteriorate when the proliferation of funds broke out or the practice of fraud that had occurred in banks. The challenge of GCG practices would be even greater when the banking industry begins to adopt digital technology in each of its products and services. This is due to the fact that during the 2011-2015 the banking industry did face a problem that was not mild due to the rampant practice of fraud that undermined several commercial banks. In LPPI research, banks are required to fill GCG assessments with self-assessment methods on 11 aspects that have

been determined by the financial authority. Based on the above phenomena, it can be concluded that not every empirical event is in accordance with existing theories.

Financial performance is an analysis conducted to see the extent to which a company has implemented it using the rules of financial implementation properly and correctly. Such as by making a financial report that meets the standards and conditions in SAK (Financial Accounting Standards) or GAAP (General Accepted Accounting Principle) and others (Fahmi, 2014) One ratio that is often used in measuring company performance is Return On Assets (ROA).

The evaluation of the factors of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks is an evaluation of the quality of bank management for the implementation of five principles of Good Corporate Governance, namely transparency, accountability, accountability, professionalism and fairness (Umam, 2016). Improving system control, internal control becomes a very important role for the quality of financial reporting on the principles of good governance (Afiah & Azwari, 2015).

Rentability is the ability of Islamic banks to generate profits each period (Ikit, 2018). Assessment is carried out by considering aspects of level, trend, structure, and stability by considering the performance of peer groups and management of bank earnings, both through quantitative and qualitative aspects analysis. One of the ratios used to measure earnings is Income Operating Costs Operational (BOPO) and Net Operating Margin (NOM).

Capital is an analysis used to measure the obligation to provide minimum capital of the bank and to fulfill long-term obligations or the ability of banks to fulfill obligations in the event of liquidity. In addition, in assessing capital adequacy, the Bank must also link capital adequacy with bank risk profiles. Anwar & Murwaningsari (2017), and Olaruntoba et al (2018) show that CAR has a positive impact on profitability.

In addition, including the most important thing in determining the bank's risk profile is the level of non-performing financing. Some of the research finds the relationship between NPF and ROA. Almunawwaroh & Marliana (2018), Pravasanti (2018), and Rachmat & Komariah (2017) show a negative impact of NPF to ROA. But, some of the research shows that NPF does not have an impact between NPF to ROA (Wibisono, 2017). This is different from the research of Yundi & Sudarsono (2018) showing that NPF has a positive influence on ROA.

Besides that, Hakim & Rafsanjanji (2016) shows that FDR does not have an effect on profitability (ROA). Pratiwi (2016) showed that GCG had a significant negative effect on ROA. But, Kumalasari and Pratikto (2018) show that GCG does not have an impact on ROA. Another important thing that affects the level of profitability is the level of efficiency. The level of efficiency in this case uses the BOPO ratio. Iskandar & Laila (2016) show that BOPO had an impact on ROA. There are some differences in results when looking at the effect of NOM on ROA. Ninggarwati (2015) show that NOM has a positive effect on ROA. Whereas Octaviani (2016) show that NOM has a negative effect on ROA.

This is reinforced by the existence of the research gap in previous studies. The previous researches show a different effect of the Risk Based Bank Rating financial ratio

variable. The aim of this research is to examine the effect of risk based bank rating on the profitability in Islamic commercial banks.

## METHOD

The form of research used is causal associative research with a quantitative approach. The data sources used in this study are secondary data in the form of financial statements from Islamic Commercial Banks for the period 2012-2017 obtained through annual reports published by Bank Indonesia (BI), the Financial Services Authority (OJK) and through the website of Islamic commercial banks. When collecting, the type of data in this study uses panel data (a combination of two time series data and cross section data) taken in the 2012-2017 period. The population used in this study is all Islamic Commercial Banks registered at the Bank Indonesia Directory for the period 2012-2017, which is 14 Islamic Banks. The sample selection in this study uses purposive sampling method; the Sharia Commercial Banks sampled in the study are Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Mandiri, BCA Syariah Bank, Bank BNI Syariah and BRI Syariah Bank. In conducting data analysis in this study, there are several forms of tests used, determination of regression models, classic assumption tests, multiple linear regression methods or ordinary least square and hypothesis testing.

This research using panel data regression. The equation from this research as follow:  
$$ROA_{it} = \alpha + \beta_1 NPF_{it} + \beta_2 FDR_{it} + \beta_3 GCG_{it} + \beta_4 BOPO_{it} + \beta_5 NOM_{it} + \beta_6 CAR_{it} + \varepsilon_{it}$$

## RESULT AND DISCUSSION

Chow Test show that the probability Chi-Square value is 0,000 <0,05, then H0 is rejected and Ha is accepted. It can conclude that the regression model chosen is the fixed effect model. Hausman Test show that the probability value is 0,000 <0,05, then H0 is rejected and Ha is accepted. It can conclude that the regression model chosen is the fixed effect model.

Normality shows that residual data is normally distributed. This is indicated by the Jarque-Bera value of 2.098 > 0.05 so it can be concluded that the residuals are normally distributed, which means that the classical assumptions about the normality test have been fulfilled. Multicollinearity test shows that the independent variable has an independent variable correlation above 0.90 so that it can be said that in this study free from multicorrelity test data. Auto-correlation Test shows that the Durbin-Watson chart shows that the value of dL = 1.291 and the value of dU = 1.822 so that the criteria for whether or not autocorrelation can be determined. The calculated DW value is 1.872 greater than 1.822 and smaller than 2.709, which means it is in the area with no autocorrelation. Heterocedasticity test show that the significant level of the independent variables NPF, FDR, GCG, BOPO, NOM and CAR is above 0.05. This shows that the regression model in this study did not occur heterocedasticity.

**Table 1. Ordinary Least Square Result**

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Stat
C	6.416004	3.059881	2.096815
NPF	-0.388210	0.273365	-1.420116
FDR	0.035254	0.025244	1.936519
GCG	0.470348	0.573212	0.820548
BOPO	-0.057268	0.012090	-4.736658
NOM	0.082182	0.421570	1.914943
CAR	0.032369	0.049679	1.551560
R-squared	0.670217	F-statistic	5.315242
Adjusted R-squared	0.544124	Prob	0.000044

Based on the estimation results on the model, the probability value is obtained are: First, constant value of 6.416 shows that if the independent variable is Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Good Corporate Governance (GCG), Operating Costs to Operating Income (BOPO), Net Operating Margin (NOM) and Capital Adequacy Ratio (CAR) value is 0, then the Return On Assets (ROA) value is 6.416. Second, the regression coefficient of Non Performing Financing (NPF) ratio of - 0.388 shows that every increase in the ratio of Non Performing Financing (NPF) to 1%, the Return On Assets (ROA) will decrease by 0.388. Third, the regression coefficient of Financing to Deposit Ratio (FDR) of 0.035 indicates that each increase in the Financing to Deposit Ratio (FDR) ratio of 1% will increase Return on Assets (ROA) by 0.035. Fourth, regression coefficient of Good Corporate Governance (GCG) ratio of 0.470 shows that every increase in the ratio of Good Corporate Governance (GCG) 1% then Return On Assets (ROA) will increase by 0.470. Fifth, the regression coefficient of the Operational Cost to Operational Revenue (BOPO) ratio of -0.057 indicates that each increase in the ratio of Operational Costs to Operational Income (BOPO) is 1%; the Return on Assets (ROA) will decrease by 0.057. Sixth, the regression coefficient of Net Operating Margin (NOM) ratio of 0.082 indicates that every increase in the ratio of Net Operating Margin (NOM) to 1%, the Return On Assets (ROA) will increase by 0.082. Seventh, the regression coefficient of Capital Adequacy Ratio (CAR) regression coefficient of 0.032 indicates that every increase in the Capital Adequacy Ratio (CAR) ratio of 1%, the Return On Assets (ROA) will increase by 0.032

Determinant Coefficient Test ( $R^2$ ) obtained  $R^2$  of 0.5441. This result means that the variable of ROA approximately 54.41% is influenced by the independent variables such as non performing financing (NPF), financing to deposit ratio (FDR), good corporate governance (GCG), operating costs on operating income (BOPO), net operating margin (NOM), and Capital Adequacy Ratio (CAR). The remaining 45.59% is influenced by other factors outside the variable model.

The F-Statistic test based on the estimation results on the model shows the F-Statistic value of 14.431 and the probability of 0.00. Probability of  $0.00 < \alpha = 5\%$ . So that it can be

seen that  $F$ -Statistics 5, 315 >  $F$  table 2.44 then  $H_0$  is rejected  $H_a$  accepted which means there is a significant influence between Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Good Corporate Governance (GCG), Operational Costs to Operating Income (BOPO), Net Operating Margin (NOM) and Capital Adequacy Ratio (CAR) together to the variable Return On Assets (ROA).

Based on the estimation results on the model, it is obtained the value of  $t$  count  $-1.420 < t$  table 1.681 with the probability of Non Performing Financing (NPF) of 0.164 >  $\alpha = 5\%$ . Then  $H_0$  is accepted and  $H_a$  is rejected which means that the Performing Financing (NPF) variable does not significantly influence Return On Assets (ROA). Based on the estimation of the model, the value of  $t$  arithmetic is 1.936 >  $t$  table 1.681 with the probability of Financing to Deposit Ratio (FDR) of 0.001 <  $\alpha = 5\%$ . Then  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted which means that the Financing to Deposit Ratio (FDR) variable has a significant effect on Return On Assets (ROA).

Based on the estimation results on the model, the value of  $t$  arithmetic is 0.820 <  $t$  table 1.681 with the probability of Good Corporate Governance (GCG), amounting to 0.417 >  $\alpha = 5\%$ . Then  $H_0$  is accepted and  $H_a$  is rejected which means that the variable Good Corporate Governance (GCG) does not have a significant effect on Return On Assets (ROA).

Based on the estimation of the model, the value of  $t$  count is  $-4.736 < t$  table 1.681 with the probability of Operational Costs to Operating Income (BOPO) of 0,000 <  $\alpha = 5\%$ . Then  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted which means that the Operating Cost variable on Operating Income (BOPO) has a significant negative effect on Return On Assets (ROA).

Based on the estimation results on the model, the calculated  $t$  value is 1.914 >  $t$  table 1.681 with the probability of Net Operating Margin (NOM) of 0.045 <  $\alpha = 5\%$ . Then  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted which means that the variable Net Operating Margin (NOM) has a significant effect on Return On Assets (ROA). Based on the estimation of the model, the value of  $t$  arithmetic is 1.551 <  $t$  table 1.681 with a probability of Capital Adequacy Ratio (CAR) of 0.519 >  $\alpha = 5\%$ . Then  $H_0$  is accepted and  $H_a$  is rejected which means that the variable Capital Adequacy Ratio (CAR) does not have a significant effect on Return On Assets (ROA).

According to the theory of Shariah Enterprise Theory, financial statements include vertical and horizontal accountability. Where vertical accountability is the responsibility of the company to God while horizontal accountability is divided into two types, namely direct stakeholders include customers and indirect employees and indirect stakeholders including community and nature. This balance value causes shariah enterprise theory not only to care about individual interests (in this case shareholders), but also other parties. Therefore, shariah enterprise theory has a great concern for broad stakeholders and in signal theory, information issued by management is a signal given to investors. Information received by investors can be a good signal or a bad signal. Information provided by management to investors through signals can be in the form of notes or descriptions for both past and future conditions, presenting information and financial statements of banking companies.

From financial reports issued by management, investors can analyze the company's

financial performance that can be obtained through signals from the management of the bank's company. In financial statements investors can see the financial condition of the bank company as a whole. One indicator of financial ratios seen by investors is the level of troubled financing that is borne by the bank. Non Performing Financing (NPF) is a ratio that measures the level of financing a problem faced by a Sharia Bank. The higher the ratio, the worse is the quality of Islamic Bank financing, which has the potential for bank losses. The higher the non-performing financing, the higher the number of debtors who are unwilling to fulfill their debt payment obligations

The first hypothesis is the Performing Financing (NPF) ratio that states that there is no significant influence on Return On Assets (ROA). NPF This is in line with the researchers conducted by Widyaningrum & Septiarini (2015) due to murabahah financing being the most widely used financing while non-lending financing is more prevalent in working capital financing using mudharabah contracts. Thus the first hypothesis states that Performing Financing (NPF) does not have a significant effect on Financial Performance (ROA) because if the NPF has a significant effect it will reduce financial performance (ROA) which causes any increase in the amount of problematic financing to cause a decline in financial performance (ROA) so that the financing given to customers is not balanced with the income obtained by the bank. Poor financing will cause difficulties in returning the financing if the amount of problematic financing is large enough, especially if the financing is done inadvertently and expansion in financing is not controlled so that the bank will bear greater risk, the risk is in the form of difficulties in returning financing by the debtor and if the amount is large enough it can affect financial performance (ROA). The research of Widyaningrum & Septiarini (2015), Widyawati (2017), Nurullaily (2016), and Roy (2018) that show NPF does not influence profitability (ROA) support these findings.

According to the theory of Shariah Enterprise Theory, financial statements include vertical and horizontal accountability. Where vertical accountability is the responsibility of the company to God, while horizontal accountability is divided into two types, namely direct stakeholders include customers and indirect employees and indirect stakeholders including community and nature. This balance value causes shariah enterprise theory not only to care about individual interests (in this case shareholders), but also other parties. Therefore, shariah enterprise theory has a great concern for broad stakeholders and in signal theory, information issued by management is a signal given to investors. Information received by investors can be a good signal or a bad signal. Information provided by management to investors through signals can be in the form of notes or descriptions for both past and future conditions, presenting information and financial statements of banking companies. From financial reports issued by management, investors can analyze the company's financial performance that can be obtained through signals from the management of the bank's company. In financial statements investors can see the financial condition of the bank company as a whole. One indicator of financial ratios seen by investors is the level of total financing provided by banks with third party funds.

Financing Deposit to Ratio (FDR) is a measure of liquidity that measures the amount of funds placed in the form of financing originating from funds collected by banks. The

higher the FDR where the current assets owned by the company are greater and the company's ability to meet its short-term obligations increases, the use of current debt will also increase. The second hypothesis is the Financing to Deposit Ratio (FDR) ratio that states that there is a significant positive effect on Financial Performance (ROA). This result is in line with the researchers conducted by Sabir et al (2012) because this is due to the distribution of financing to prospective customers with regard to the 5C principle. If FDR increases then the profit gained by the bank means that the bank is able meet liquidity well. These findings are supported by research by Riyadi & Yulianto (2014), Nurullaili (2016), Laeli & Yulianto (2016), and Yunita (2014) show that Financing to Deposit Ratio (FDR) has a significant effect on Return On Assets (ROA).

Good Corporate Governance (GCG) is an assessment of corporate governance that has been determined by Bank Indonesia in the form of an assessment of internal and external aspects. This assessment helps investors to understand the condition of the bank whether the bank can play bank functions properly. The main purpose of GCG is to increase added value for all interested parties. The smaller the composite value of GCG shows the better performance of the bank's Good Corporate Governance.

The third hypothesis is Good Corporate Governance (GCG) that states that there is no significant effect on Financial Performance (ROA). This is in line with by Iskandar & Laila (2016) that it does not an affect of bank returns with any other factors, such that the high and low GCG of a bank does not affect the profit earned by the bank. Thus the third hypothesis states that Good Corporate Governance (GCG) does not have a significant effect on financial performance (ROA). This indicates that the high or low quality of GCG implementation of a bank has no effect on financial performance due to unilateral assessment that makes the assessment results less objective and subjective because it is done from the bank itself. So, there is no relationship between self-assessment and financial performance (ROA). GCG implementation is one of the provisions that are increasingly emphasized in banking companies. This is because that management of investor funds can be managed properly and correctly by the management of the company will create added value for all stakeholders. Suciati (2015), Iskandar & Laila (2016), Setiawan (2017), and Suryani & Habibie (2017) that show that good corporate governance (GCG) does not affect return on asset (ROA) support these findings.

The BOPO ratio is used to measure the ability of bank management to control operating costs against operating income. The smaller the BOPO shows the more efficient the operational costs incurred by the bank so that the bank in the troubled condition gets smaller. The fourth hypothesis is the ratio of BOPO that states that there is a significant negative effect on Financial Performance (ROA). This result is in line with Dewi et al. (2015) that shows that if BOPO increases, which means efficiency decreases, the ROA obtained by banks also decreases. Thus the fourth hypothesis states that the BOPO has a significant effect on ROA. The negative sign indicate that the bank has not been able to carry out its operational activities efficiently so that it will result in a decrease in financial performance profits but is significant because the more efficient operational activities carried out by the bank the greater the financial performance. The higher the burden the

bank's operational costs are the responsibility of the bank. Generally, it will be charged to the income obtained from the financing allocation.

This condition occurs because it is caused by any increase in bank operational costs that are not followed by an increase in operating income which results in a lack of pre-tax profit resulting in a decline in financial performance (ROA). For bank management, this shows the importance of paying attention to operational cost control which is shown in the BOPO ratio to remain in accordance with the provisions stipulated by Bank of Indonesia. Widyawati (2017), Nurullaily (2016), Zulifah & Susilowibowo (2014), Suardana et al. (2018), Kusmayadi (2018), and Patni & Darma (2017) which show that the BOPO's ratio have a significant effect on Return On Assets (ROA) support these findings.

Net Operating Margin is used to analyze the company's performance in generating profits from company investments in the form of productive assets. The greater the NOM ratio, the more operational income derived from productive assets managed by the bank. The fifth hypothesis is the ratio of Net Operating Margin (NOM) that states that there is a significant positive effect on Financial Performance (ROA). This is in line with the researchers conducted by Sabir et al (2012) who showed that the increase in funding distribution to customers made bank revenues increase. The amount of NOM for operating income minus profit sharing funds minus operating costs is greater than the average earning assets. Thus, the fifth hypothesis states that Net Operating Margin (NOM) has a significant positive effect on Financial Performance (ROA) due to the relationship between net incomes to profit before tax so that the higher Net Operating Margin (NOM) will encourage increased financial performance (ROA). This condition occurs because each increase in bank net income is followed by an increase in average earning assets that results in pre-tax profit. The amount of NOM shows the ability of banks to manage the distribution of financing to customers and their operational costs to customers so that the quality of earning assets is maintained and able to make an increase in income. The findings are supported by research by Lindasari (2015), Roy (2018), Dinnuriah (2018), Astutik & Djazuli (2014), Al Parisi (2017), Ninggarwati (2015), and Yusuf (2017) shows that Net Operating Margin (NOM) has a significant effect on Return On Assets (ROA).

Capital Adequacy Ratio (CAR) is used to measure the capital adequacy of a bank to support assets that produce risk. The smaller the risk of a bank, the greater the profit obtained by the bank. The amount of the capital ratio is measured by the ratio of own capital to Risk Weighted Assets (RWA). Capital ratios are used to measure the capital adequacy of banks to support risk-bearing assets. Increased bank capital and increased financing distribution shows that banks are able to finance bank operations. These favorable conditions can contribute to financial performance (ROA). The sixth hypothesis is the Capital Adequacy Ratio (CAR) ratio that states that there is no significant negative effect on Financial Performance (ROA). This is in line with the researchers conducted by Iskandar & Laila (2016), this is because the capital owned by banks is only used as a provision from BI. Islamic banks are also considered not optimal in distributing financing to debtors.

Thus the sixth hypothesis states that the Capital Adequacy Ratio (CAR) has no significant effect on Financial Performance (ROA) because that the size of the capital

adequacy does not affect financial performance. (ROA). This happened because of Bank Indonesia regulations requiring a minimum CAR of 8% that resulted in Islamic Commercial Banks attempting to achieve CAR in accordance with the provisions. In addition this can also occur because there are other factors that affect the CAR ratio of Islamic banking companies, these factors include external factors and internal factors. External factors such as economic conditions are uncertain. These findings are supported by research by Julita (2011), Oloruntoba et al. (2018), Karunia (2013), Pratiwi & Wiagustini (2015), Widyaningrum & Septiarini (2015), Nihayah & Walyoto (2018), and Kusumartuti & Alam (2019) show that Capital Adequacy Ratio (CAR) is not have an impact on the profitability ratio that measured by Return On Assets (ROA).

## CONCLUSION

The results of the empirical test show that the ratio of NPF, GCG and BOPO has a negative effect on Financial Performance (ROA) while the FDR, NOM and CAR ratios have a positive effect on Financial Performance (ROA). This result implies that Islamic banks must be able to improve their internal conditions if they want to increase their level of profitability.

Further research can extend the observation period so that the number of research samples is also more so that it can improve data distribution better. Furthermore, in order to add other independent variables that is considered logical in determining the financial performance of the bank.

## REFERENSI

- Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2015). The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and its Impact on the Principles of Good Governance: a Research in District, City, and Provincial Government in South Sumatera. *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, 211, 811-818.
- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2018). Pengaruh CAR, NPF, dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Amwaluna*, 12(1), 1-18.
- Al Parisi, S. (2017). Determinan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Ikonomika*, 2(1), 41-52.
- Anwar, Y., & Murwaningsari, E. (2017). The Effect of Credit Risk and Capital Adequacy Ratio Upon Return on Asset. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 2(2), 23-38.
- Astutik, P., & Djazuli, A. (2014). Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut Risk Based Bank Rating Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(1), 1-12.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2001). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Dewi, L. E., Herawati, N. T., & Sulindawati, L. G. E. (2015). Analisis Pengaruh NIM, BOPO, LDR, dan NPL Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Swasta Nasional

- yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013). *E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1-11.
- Dinnuriah, N. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan NPF, FDR, NOM, BOPO, CAR Terhadap Return on Asset di Bank Syariah. *Tesis Tidak Dipublikasikan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Dira, A. K. (2014). Analisis Faktor Penentu Profitabilitas Bank di Indonesia dengan Metode Risk Based Bank Rating (Studi pada Bank-Bank Umum Go Public di Indonesia Periode 2008-2013). *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Fahmi, I. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Hakim, N., & Rafsanjani, H. (2016). Pengaruh Internal Capital Adequacy Ratio (CAR, Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dalam Peningkatan Profitabilitas Industri Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 14(1), 161-168.
- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ikit. (2018). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Iskandar, B. A., & Laila, N. (2016). Pengaruh Komponen Risk-Based Bank Rating Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2011-2014). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(3), 173-186.
- Jogiyanto. (2000). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPEE UGM.
- Julita. (2011). Pengaruh Non Performing Loan dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(1), 1-10.
- Karunia, C. (2013). Analisis Pengaruh Rasio Capital, Asset Quality dan Liquidity Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(1), 1-17.
- Kumalasari, D., & Pratikto, H. (2018). Good Corporate Governance Affects on Corporate Value Through Return on Equity and Return on Asset of Manufacture Company. *Proceeding of The First International Research Conference on Economics and Business*.
- Kusmayadi, D. (2018). Analysis of Effect of Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loan, BOPO, and Size on Return on Assets in Rural Banks at Indonesia. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 3(7), 786-795.
- Kusumastuti, W. I., & Alam, A. (2019). Analysis of Impact of CAR, BOPO, NPF on Profitability of Islamic Banks (Year 2015-2017). *Journal of Islamic Economics Law*, 2(1), 30-59.
- Laeli, A., & Yulianto, A. (2016). The Effect of Financial Health on Profitability with Islamic Corporate Governance as a Moderating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 5(3), 163-172.
- Lindasari, M. (2015). Analisis Pengaruh Variabel Spesifik Bank Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2010-2013). *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Martono. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nihayah, A.Z., & Walyoto, S. (2018). Identification of Non Performing Financing Alteration Measured by Microeconomic Variable Sharia Banking. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 1(1), 23-38.
- Ninggarwati, D. (2015). Pengaruh CAR, BOPO, NOM, NPF, dan FDR Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Semarang: Unissula.
- Nurullaili, S. (2016). Analysis of Influence Financial Ratios on Shariah Banking Performance in Indonesia: Empirical Study at Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, and Bank Mega Syariah. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 4(2), 135-159.
- Octaviany, N. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia. *Jurna Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN*, 5(1), 31-40.
- Oloruntoba, O., Adeyemi, A. Z., & Fasesin, O. O. (2018). Credit Risk Management and Its Influence on the Financial Performance of Banks: a Study of Selected Banks in Nigeria. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 2(2), 1-11.
- Patni, S. S., & Darma, G. S. (2017). Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio, Net Interest Margin, BOPO, Capital Adequacy Ratio, Return on Asset, and Return on Equity. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 14(2), 166-184.
- Pratiwi, A. (2016). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2010-2015). *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 55-76.
- Pratiwi, L. P. S. W., & Wiagustini, N. L. P. (2016). Pengaruh CAR, BOPO, NPL dan LDR Terhadap Profitabilitas. *E-Jurnal Manajemen*, 5(4), 2137-2166.
- Pravasanti, Y. A. (2018). Pengaruh NPF dan FDR Terhadap CAR dan Dampaknya Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(3), 148-159.
- Rachmat, A. B., & Komariah, E. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2015. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2(1), 17-34.
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 466-474.
- Roy, M. I. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Rasio Profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia. *Jurnal Banque Syar'i*, 4(2), 113-122.
- Sabir, M., Ali, M., & Habbe, A. H. (2012). Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Konvensional di Indonesia, *Jurnal Analisis*, 1(1), 79-86.
- Setiawan, A. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Return On Assets. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(2), 138-151.
- Siamat, D. (2007). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.

- Suardana, I. B. R., Astawa, I. N. D., & Martini, L. K. B. (2018). Influential Factors Towards Return on Assets and Profit Change. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(1), 105-116.
- Suciati, N. (2015). Analisis Pengaruh Risk Based Bank Rating (RBBR) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro.
- Suryani, Y., & Habibie, A. (2017). Analisis Pengaruh Rasio-rasio Risk Based Bank Rating Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI. *Kitabah*, 1(1), 46-68.
- Triyuwono, I. (2012). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibisono, M. Y., & Wahyuni, S. (2017). Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR, Terhadap ROA yang Dimediasi oleh NOM. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 17(1), 41-62.
- Widyaningrum, L., & Septiarini, D. F. (2015). Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014. *JESTT*, 2(12), 970-985.
- Widyawati, G. N. (2017). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Operational Efficiency Ratio (OER), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Net Operating Marging (NOM) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2015. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Yundi, N. F., & Sudarsono, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return on Asset (ROA) Bank Syariah di Indonesia. *Al-Amwal*, 10(1), 18-31.
- Yunita, I. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2009-2012). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 3(2), 143-160.
- Yusuf, M. (2017). Dampak Indikator Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 13(2), 141-151.
- Zulifiah, F., & Susilowibowo, J. (2014). Pengaruh Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(3), 759-770.

## **Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Environmental Disclosure**

**Eny Suprapti<sup>1\*</sup>, Farhan Achmad Fajari<sup>2</sup>, Achmad Syaiful Hidayat Anwar<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Malang

<sup>1</sup>e.suprapti@yahoo.com, <sup>2</sup>farhanach.fajari@gmail.com, <sup>3</sup>iepoel@yahoo.com

<sup>\*</sup>Penulis Korespondensi

### **Abstract**

Environmental problems become things that have not been considered for the companies. This Study aims to determine the effect good corporate governance to environmental disclosure. Good Corporate Governance is a system to controlling management, where GCG is proxied by the board of directors, board of commissioners, institutional ownership, managerial ownership, and audit committee. This reaserch use non financial companies listed on BEI. The research sample 30 companies. Measurement of environmental disclosure uses GRI – G4 index is 34 index. This study using multiple regression. Based on the results of the study found good corporate governance is proxied use board of directors and board commissioners there isn't effect on environmental disclosure. The results institutional ownership, managerial ownership, and audit committee effect on environemental disclosure.

**Keywords:** good corporate governance, environmental disclosure

### **Abstrak**

Masalah lingkungan menjadi hal yang belum dipertimbangkan bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap pengungkapan lingkungan. Good Corporate Governance adalah sistem untuk mengendalikan manajemen, di mana GCG diproksikan oleh dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Peneliti ini menggunakan perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI. Sampel penelitian 30 perusahaan. Pengukuran pengungkapan lingkungan menggunakan indeks GRI – G4 adalah 34 indeks. Penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda sebagai teknik analisis. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tata kelola perusahaan yang baik diproksi menggunakan dewan direksi dan dewan komisaris tidak berpengaruh pada pengungkapan lingkungan. Hasil kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

**Kata Kunci:** tata kelola yang baik, pengungkapan lingkungan

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan potensi kekayaan yang ada di laut dan darat yang sangat menjamin. Di dukung pula dengan kandungan yang ada di bawah daratan Indonesia. Indonesia juga memiliki hutan tropis ketiga terbesar yang ada di dunia. Di balik kekayaan Indonesia yang melimpah itu, terdapat permasalahan lingkungan yang terjadi (Oktafianti & Rizki 2013). Permasalahan ini disebabkan perubahan sikap dan perilaku manusia mulai dari konsumsi, produksi dan distribusi sumber daya dimana kualitas dan kuantitas dari eksistensi sumber daya alam malah cenderung menurun.

Perhatian perusahaan pada masalah lingkungan masih minim. Hal ini terbukti banyak perusahaan yang melakukan perusakan lingkungan tanpa diimbangi dengan perbaikan lingkungan. Seperti halnya PT. Lapindo Brantas akibat kebocoran pipa yang menyebabkan rumah warga sekitarnya terendam lumpur hingga sekarang, PT. Freeport Indonesia, penghasil emas terbesar di dunia tetapi menyebabkan tanah penggalan emas disana menjadi tandus dan tidak dapat digunakan kembali. Tahun 2018, PT. Rayon Utama diprotes oleh warga Sukoharjo akibat menghasilkan gas polusi berbahaya.

Ditambah rata-rata mengenai *environmental disclosure* yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti Ningsih (2017) sebesar 34%, Ariningtika (2013) sebesar 27%, Choiriyah (2010) sebesar 4,63%, dan Yusnita (2010) hanya sebesar 4%. Sebagian besar perusahaan belum menganggap pengungkapan lingkungan sebagai hal yang penting bagi perusahaan. Padahal Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan PJOK no. 51 tahun 2017 pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa LJK, Emiten, dan Perusahaan publik wajib menyusun laporan keberlanjutan. Peraturan sebelumnya yang telah mengatur mengenai lingkungan terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selain itu, Pasal 66 ayat 2c mewajibkan semua perseroan terbatas untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan. Dengan demikian, perusahaan akan melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, dalam rangka mendapatkan legitimasi dari para pemangku kepentingan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas perusahaan.

Menurut Owusu & Frimpong (2012) pengungkapan lingkungan dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi resiko yang berguna untuk menilai kepatuhan dan mengetahui cara penghematan biaya. Perusahaan yang memberikan informasi lingkungan lebih banyak akan membangun citra yang positif bagi masyarakat sehingga akan berkontribusi positif bagi kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan sekitar (Solikhah and Winarsih 2016). Meskipun pengungkapan lingkungan masih dianggap pengungkapan sukarela tetapi manfaat bagi perusahaan yang melakukannya sangat besar dan mampu menjadi *image* perusahaan yang baik di mata *stakeholders*.

*Good corporate governance* sendiri berperan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh *stakeholders* terhadap manajemen agar perusahaan mampu meningkatkan transparansi,

akuntabilitas, dan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan. Pengawasan yang dilakukan diwakilkan dari dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan managerial dan komite audit. Penelitian yang menghubungkan GCG dan CRS telah dilakukan oleh Indriani (2015); Oktafianti & Rizki (2013); Yusran dkk (2018). Hasil penelitian menunjukkan hasil yang belum konsisten, dimana hasil penelitian Indriani (2015) menunjukkan ada pengaruh negatif antara proporsi dewan terhadap CSR. Sementara temuan Yusran dkk (2018) kontradiktif dengan temuan Indriani (2015). Disamping itu, proksi GCG yang digunakan dalam penelitian sebelumnya masih beragam antara satu sampai 4 elemen GCG. Sebagai suatu sistem kelengkapan komponen GCG penting untuk dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang memiliki keterkaitan satu sama lain dalam penentuan luas pengungkapan CSR.

Oleh karena penelitian dengan menggunakan 5 komponen sebagai proksi GCG penting dilakukan guna memperluas penjelasan hubungan GCG dengan pengungkapan CSR. Lebih jauh, penggunaan indikator pengungkapan CSR yang lebih luas melalui GRI G4 menjadi salah satu pengembangan penelitian sebelumnya. Adapun komponen GCG yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah dewan direksi, proporsi dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit.

Masalah keagenan terjadi antara *principals* dan *agents* yang menyebabkan kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principals*. Untuk mengurangi tindakan manajemen yang tidak sesuai harapan prinsipal diperlukan *good corporate governance* dengan meningkatkan proporsi dewan direksi. Dewan direksi berperan sebagai pengambil keputusan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dkk (2018); Trireksani & Djajadikerta (2016) menjelaskan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Semakin banyak jumlah direksi maka semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR. Hasil ini menunjukkan pentingnya jumlah dewan direksi yang mencukupi, sehingga mereka mampu memberikan tambahan masukan pelaksanaan CSR. Dengan adanya dewan direksi akan menentukan apakah perusahaan akan melaporkan pengungkapan lingkungannya secara banyak maupun sedikit. Sehingga perusahaan tersebut akan melaporkan pengungkapan lingkungannya. Semakin banyak dewan direksi didalam perusahaan, maka semakin luas pengungkapan lingkungan yang dilakukan karena dewan direksi akan membuat keputusan kepada manajemen untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang luas.

#### H1. Dewan direksi berpengaruh terhadap Environmental Disclosure

Permasalahan tentang *agency cost* dapat dikurangi dengan menunjuk dewan komisaris yang berperan sebagai pengawas perusahaan antara dewan direksi dengan pemilik saham. Penelitian yang dilakukan oleh Agustia (2017) mengatakan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. Semakin banyak jumlah dewan komisaris maka pengungkapan lingkungan semakin dilakukan oleh manajemen karena adanya pengawasan yang lebih baik sehingga dapat menunjukkan bahwa *image* perusahaan semakin baik pula. Dari penjelasan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif terhadap *environmental disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan.

Hal ini mengindikasikan bahwa peran dan tanggung jawab dewan komisaris pada perusahaan telah berfungsi sebagaimana mestinya dan dewan komisaris mempunyai peran penting dalam pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Dewan komisaris memiliki peran penting sebagai pengawasan yang dimana mampu menentukan pengungkapan lingkungan perusahaan. Semakin banyak dewan komisaris diperusahaan, maka pengawasan yang dilakukannya pun semakin ketat sehingga membuat manajemen akan mengungkapkan lingkungan sebanyak-banyak karena mampu menjadi perusahaan tersebut baik dimata *stakeholders*.

### H2. Dewan komisaris berpengaruh terhadap Environmental Disclosure

Permasalahan mengenai *agency cost* di kurangi dengan menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan institusional akan melakukan pengawasan yang meningkat. Novitaningrum & Amboningtyas (2017) melakukan penelitian dengan hasil membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *sustainability report*. Hasil ini menjelaskan bahwa perusahaan sahamnya dimiliki oleh institusi yang lebih besar cenderung memberikan dukungan pada perusahaan melakukan pengungkapan *sustainability report*. Listyaningsih dkk (2018) menyatakan bahwa:

*“The result is institutional ownership which positively influences corporate social responsibility disclosure. It can be explained that the greater the institutional ownership, the greater the oversight of management. Institutional ownership may require companies to increase corporate social responsibility disclosure, as large institutional ownership is better in monitoring management performance.”*

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intensif. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* yang dimana semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar juga pengawasan yang dilakukan sehingga perusahaan akan mengungkapkannya. semakin banyak kepemilikan institusional maka semakin ketat pengawasan yang dilakukan oleh institusi lain terhadap perusahaan sehingga mampu menjadikan keputusan investasi yang tepat bagi institusi yang lainnya.

### H3. Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Environmental Disclosure

Permasalahan tentang *agency cost* dapat teratasi dengan meningkatkan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dkk (2017) mengatakan bahwa hasil penelitian terbukti bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *corporate social responsibility*, dapat diartikan bahwa semakin rendah proporsi kepemilikan saham manajerial, maka justru semakin menambah tingginya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Hal tersebut dilakukan perusahaan karena ingin menunjukkan image perusahaan di mata investor. Namun penelitian yang dilakukan oleh Listyaningsih dkk (2018) penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa:

*“this study found that managerial ownership positively affects corporate social responsibility disclosure. This can be explained by the increase of share ownership by managers, so it is expected that managers will act in harmony with the interests of stakeholders so that they are careful in making decisions as well as forming responsibility to the shareholders and the surrounding community.”*

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktafianti & Rizki (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai koefisien pengaruh yang bertanda positif yang berarti semakin meningkat kepemilikan manajerial maka semakin tinggi pengungkapan informasi lingkungan. Kepemilikan manajer yang semakin besar di dalam perusahaan membuat manajer lebih memikirkan kepentingan dan kesejahteraan pemegang saham. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Manager perusahaan merasa memiliki perusahaan tersebut dengan memiliki saham perusahaan sehingga manager akan semaksimal mungkin untuk mengungkapkan lingkungan perusahaan yang dimana akan meningkatkan citra perusahaan dengan begitu saham perusahaan akan meningkat.

#### H4. *Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Environmental Disclosure*

Permasalahan mengenai *agency cost* membutuhkan pengawasan bersama dengan dewan komisaris dalam proses pengungkapan informasi. Dalam Surat Edaran Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang "Komite Audit" menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite audit. Indriani (2015) menyatakan bahwa komite audit secara parsial berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Jadi, semakin banyak jumlah komite audit maka tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan semakin tinggi. Karena komite audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian perusahaan sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan maka akan menambah efektifitas pengawasan termasuk praktik dan Pengungkapan lingkungan perusahaan.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariningtika (2013), dan Yusran dkk (2018) bahwa komite audit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen yaitu *corporate social responsibility disclosure* pada sektor manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode tahun 2011-2016. Semakin ada komite audit diperusahaan maka semakin besar pula pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja manajemn dalam pengungkapan lingkungan.

#### H5. *Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Environmental Disclosure*

## **METODE**

Berdasarkan masalah penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian asosiatif dan studi empiris. Dimana penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara variable independen dan variable dependen. Sedangkan penelitian studi empiris merupakan penelitian yang berdasarkan data-data eksperimental hasil pengamatan, pengalam serta uji coba dan eror.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan *sample* menggunakan metode *purposive sampling*, berikut penentuan sample yang digunakan; Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan tahunan (*Annual Report*) pada tahun 2017, Perusahaan yang tidak menerbitkan *sustainability report* sesuai dengan indeks GRI pada tahun 2017 pada web perusahaan masing masing, dan Tidak memiliki data lengkap terkait dengan variable-variable yang di gunakan dalam penelitian. Jumlah sampel penelitian yang digunakan adalah 30 perusahaan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ialah dengan regresi linier berganda. Adapun persamaan matematikanya ialah:

$$ED = \alpha + \beta_1 \text{DIRSIZE} + \beta_2 \text{KOMSIZE} + \beta_3 \text{INSTOWN} + \beta_4 \text{MANOWN} + \beta_5 \text{KOMAUD} + \varepsilon$$

Dimana:

- ED = Environmental disclosure  
 DIRSIZE = Dewan Direksi  
 KOMSIZE = Proporsi dewan komisaris  
 INSTOWN = Kepemilikan Institusional  
 MANOWN = Kepemilikan manajerial  
 KOMAUD = komite audit

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan non keuangan dinilai cocok untuk digunakan dalam penelitian dikarenakan dalam aktivitas perusahaannya memberikan dampak kepada lingkungan. Perusahaan non keuangan yaitu perusahaan terdiri dari pertanian sebanyak 5 perusahaan, sektor pertambangan sebanyak 8 perusahaan, sektor industri dasar dan kimia sebanyak 7 perusahaan, sektor aneka industri sebanyak 3 perusahaan, sektor industri barang konsumsi sebanyak 3 perusahaan, sektor properti dan konstruksi bangunan sebanyak 1 perusahaan dan sektor jasa sebanyak 3 perusahaan.

**Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif**

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Environmental Disclosure	30	.06	.76	.3136	.19511
Dewan Direksi	30	3	10	6.07	1.856
Dewan Komisaris	30	3	11	6.10	1.989
Kepemilikan Institusional	30	.02	1.00	.6061	.42266
Kepemilikan Manajerial	30	.00	.10	.0129	.02488
Komite Audit	30	2	5	3.37	.669
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 1 dengan nilai N atau sample sebanyak 30 perusahaan, pengungkapan lingkungan paling sedikit perusahaan hanya melakukan 0,06 dan paling banyak sebesar 0,76 serta memiliki rata-rata pengungkapan dari 30 sample sebesar 0,31 saja, yang artinya banyak perusahaan yang belum memaksimalkan dalam pengungkapan lingkungannya. Untuk dewan direksi paling sedikit 3 orang dan paling banyak 11 orang memiliki rata 6 orang dari perusahaan yang diteliti. Dewan komisaris paling sedikit pada perusahaan sample hanya 3 orang dan yang paling banyak 11 orang yang memiliki rata-rata sebesar 6,1. Kepemilikan institusional paling minimum 0,02 dan paling maksimum sebanyak 1,00 dan memiliki rata-rata sebesar 0,60. Kepemilikan managerial memiliki nilai minimum

0,00 dan nilai maksimum 0,1 dan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,129 sedangkan untuk komite audit memiliki nilai minum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5 dan memiliki rata-rata sebesar 3,37.

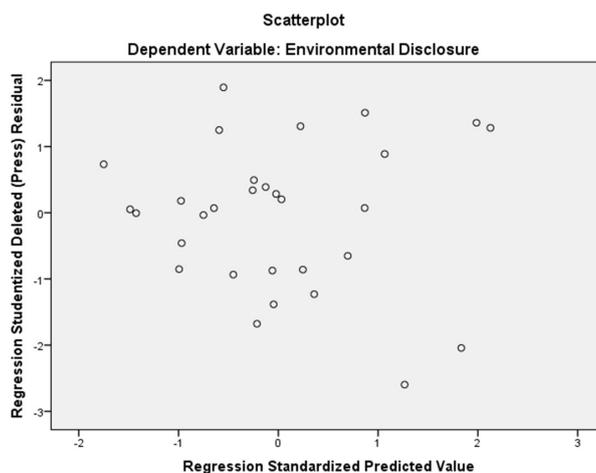
**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Dewan direksi	.727	1.376	Tidak ada multikolinearitas
Dewan Komisaris	.825	1.212	Tidak ada multikolinearitas
Kepemilikan Institusional	.742	1.348	Tidak ada multikolinearitas
Kepemilikan Manajerial	.921	1.085	Tidak ada multikolinearitas
Komite Audit	.837	1.195	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* lebih kecil dari 10 atau memiliki nilai *Tolerance* sebesar lebih dari 0,10. Oleh karenanya, dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

**Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas**



Berdasarkan Gambar 1 terlihat jelas bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y maupun sumbu X. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dan layak untuk digunakan pengujian hipotesis.

**Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adj. R Square	Std. Error of the Estimate
1	.701 <sup>a</sup>	.492	.386	.15294

Sumber: Data diolah

Berdasarkan pengolahan yang telah dilakukan diperoleh nilai *Adjusted R square* sebesar 0,386 atau 38,6 % (Lihat Tabel 3). Hal ini berarti bahwa ED dipengaruhi oleh variabel bebas dalam penelitian ini hanya sebesar 61,4 % dan sisanya sebesar 61,4 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

**Tabel 4. Hasil Uji Simultan**

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.543	5	.109	4.640	.004 <sup>b</sup>
	Residual	.561	24	.023		
	Total	1.104	29			

Sumber: Data diolah

Tabel 4 menunjukkan hasil yang signifikan pada  $\alpha = 0,05$  yaitu sebesar 0,004 artinya nilai signifikansi  $< 0,05$ . Nilai sig F 0,004  $< 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen *environmental disclosure*.

**Tabel 5. Hasil Uji Parsial**

Model	Koef	Std. Error	t
(Constant)	-.231	.184	-1.254
Dewan direksi	.013	.018	.723
Dewan Komisaris	-.007	.016	-.421
Kepemilikan Institusional	.205	.078	2.624**
Kepemilikan Manajerial	4.038	1.189	3.395***
Komite Audit	.098	.046	2.113

Sumber: Data diolah

Hasil penelitian pada Tabel 5 menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure* karena berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikan sebesar 0,476 atau sig. t  $> 5\%$  ( $0,476 > 0,050$ ). Semakin banyak dewan direksi belum tentu berdampak besar kecilnya pada pengungkapan lingkungan sehingga dewan direksi bisa saja melakukan suatu tindakan penyimpangan dari harapan *stakeholders* dalam menginginkan pengungkapan lingkungan yang luas atau kemungkinan dewan direksi lebih mengutamakan mencari laba yang sebanyak-banyaknya dengan mendorong manajemen tanpa mempedulikan lingkungan sekitarnya. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Nasir dkk (2014), Wulanda (2017) yang menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Temuan ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Trireksani & Djajadikerta (2016), Setiawan dkk (2018) yang menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure* karena berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikan sebesar diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,677 atau  $\text{sig } t > 5\%$  ( $0,677 > 0,05$ ). Dengan adanya dewan komisaris tidak menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan lingkungan. Dewan komisaris sebagai wakil dari *stakeholders* tidak melakukan pengawasan terhadap manajemen terkait pengungkapan lingkungan karena manajemen telah melakukan tanggungjawab perusahaan tentang lingkungan. Semakin banyak dewan komisaris maka tidak menentukan pengungkapan lingkungan perusahaan, karena dewan komisaris tidak menjalankan perannya sebagai pengawasan terhadap manajemen terkait pengungkapan lingkungan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2014) yang menunjukkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* karena kebijakan *corporate social responsibility* merupakan langkah strategis dari manajemen bukan dari dewan komisaris dan dewan komisaris tidak terlibat langsung terhadap kebijakan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap *environmental disclosure* dengan memiliki nilai signifikan karena berdasarkan hasil uji t diperoleh dan nilai signifikansi sebesar 0,015 atau  $\text{sig } t < 5\%$  ( $0,015 < 0,05$ ). Kepemilikan institusional mampu juga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan sukarela terutama pengungkapan lingkungan karena tanggungjawab investor dalam implementasi GCG. Semakin banyak kepemilikan institusional dalam perusahaan maka pengawasan yang dilakukan lebih baik terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan sehingga mampu meningkatkan keputusan investasi institusional dalam pengungkapan terhadap lingkungan. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Yulianto (2015), Sari & Rani (2015) dan Listyaningsih dkk (2018) menemukannya adanya hubungan positif antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hal ini mendukung teori keagenan yang dimana dengan kepemilikan institusional diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen secara efektif sehingga akan mengurangi biaya agen yang akan dikeluarkan oleh perusahaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kepemilikan manajerial dengan *environmental disclosure* dengan memiliki nilai signifikan karena berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,02  $\text{sig } t < 5\%$  ( $0,02 < 0,05$ ) sehingga nilai signifikan  $< 0,05$ . Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan manajemen. Tidak semua manajemen yang bekerja pada perusahaan akan memiliki saham terhadap perusahaan. Kepemilikan manajerial ini mendukung teori yang digunakan yaitu teori keagenan, dimana dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen mereka akan turut serta dalam pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dari keputusan-keputusan tersebut terutama mengenai pengungkapan lingkungan. Pengawasan yang dilakukan oleh manajemen yang memiliki saham di perusahaan akan mengurangi *agency cost* yang dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin banyak kepemilikan oleh manajerial maka akan meningkat pula kepedulian perusahaan terhadap lingkungan karena manager perusahaan merasa memiliki perusahaan

dan lebih memikirkan kesejahteraan dan kepentingan pemegang saham sehingga mampu meningkatkan *image* perusahaan terkait lingkungan. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhaningsih & Utama (2013), Oktafianti & Rizki (2013), dan Listyaningsih dkk (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan dan memiliki nilai signifikan karena berdasarkan hasil uji t diperoleh dan nilai signifikansi sebesar  $0,045 \text{ sig } t < 5\% (0,045 < 0,05)$  sehingga nilai signifikan  $< 0,05$ . Hal ini mendukung teori *agency* yang dimana dengan adanya komite audit maka akan menambah pengawasan dan pengendalian secara efektif dalam praktik pengungkapan lingkungan. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Untoro (2010), Aniktia & Khafid (2015), Indriani (2015) menemukan adanya hubungan positif antara komite audit terhadap pengungkapan sukarela termasuk pengungkapan lingkungan. Komite Audit mampu digunakan sebagai media komunikasi *stakeholders* untuk mendorong manajemen dalam melakukan pengungkapan lingkungan. Dengan adanya komite audit di dalam perusahaan, maka perusahaan akan mengungkapkan lingkungan perusahaannya secara luas. Semakin besar komite audit, maka akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang diharapkan.

Dari model penelitian yang dilakukan ini, elemen *good corporate governance* yang berpengaruh terhadap *environmental disclosure* adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit. Pihak *stakeholders* menginginkan perusahaan untuk melakukan aktivitas terhadap lingkungan sehingga adanya pengungkapan lingkungan. Kepemilikan institusional dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat karena adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak dari luar perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan manajerial berupa manager memiliki saham pada perusahaan sehingga manager turut andil dalam pengambilan keputusan. Komite audit melakukan pengawasan untuk perusahaan agar mengungkapkan lingkungan sebanyak – banyaknya.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap *environmental disclosure*. Penelitian ini membuktikan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* telah sesuai dengan teori keagenan, dimana perusahaan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit yang tinggi dapat mampu menjamin terlaksananya pengawasan serta mendorong pihak manajemen dalam mengungkapkan *environmental disclosure* secara transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas. Sedangkan *good corporate governance* dengan diproksikan dewan direksi dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure* dikarenakan fungsi dari masing-masing belum berjalan dengan baik.

Tidak semua perusahaan dalam sampel ini memiliki laporan keberlanjutan atau *sustainability report* serta baru berlakunya peraturan mengenai kewajiban untuk melakukan

laporan keberlanjutan, Terdapat perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan lingkungan sesuai dengan indeks GRI-G4, Terdapat perusahaan yang tidak memiliki variabel yang diteliti dalam penelitian ini seperti tidak ada informasi mengenai kepemilikan manajerial maupun institusional dalam perusahaan secara lengkap.

Penelitian yang dilakukan ini hanya menggunakan 5 proksi *Good Corporate Governance* sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah proksi *Good Corporate Governance* yang ada didalam perusahaan serta diharapkan penelitian yang selanjutnya mengambil sampel perusahaan terbaru karena pada tahun penelitian ini belum sepenuhnya perusahaan memiliki laporan keberlanjutan sehingga sampel penelitian selanjutnya semakin banyak.

## PUSTAKA ACUAN

- Agustia, D. (2017). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Dewan Komisaris Terhadap Corporate Social Responsibility Dan Reaksi Pasar. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 17(3), 376-385.
- Aniktia, R., & Khafid, M. (2015). Pengaruh Mekaniseme Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Accounting Analysis Journal*, 4(3), 1-10.
- Ariningtika, P. (2013). Pengaruh Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Choiriyah, U. M. I. (2010). Information Gap Pengungkapan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Indriani, R. (2015). Pengaruh Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
- Listyaningsih, E., Dewi, R., & Baiti, N. (2018). The Effect Of Good Corporate Governance On Corporate Social Responsibility Disclosure On Jakarta Islamic Index. *Indonesian Journal of Business And Entrepreneurship*, 4(3), 273-280.
- Nasir, A., Ilham, E., & Utara, V. I. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, 22(1), 1-18.
- Ningsih, R. F. (2017). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Manajemen Laba Terhadap Enviromental Disclosure. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 1-10.
- Novitaningrum, F., & Amboningtyas, D. (2017). Analysis Of Good Corporate Governance Principles (Institutional Ownership, Managerial Ownership, Independent Commissioners, And Audit Committee) To Disclosure Sustainability Report Through Roa As Moderating Variables (Study On Manufacturing Companies Of Various Industries Sectors Listed on IDX period Year 2011-2016). *Journal of Management*, 3(3), 470-477.
- Nugroho, M. N., & Yulianto, A. (2015). Pengaruh Profitabilitas Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan CSR Perusahaan Terdaftar Jii 2011-2013. *Accounting Analysis Journal*, 4(1), 1-12.

- Oktafianti, D., & Rizki, A. (2013). Pengaruh Kepemilikan Manajerial , Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Corporate Environmental Disclosure Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dalam Laporan Tahunan (Studi Pada Perusahaan Peserta Proper 2011-2013 ). *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Owusu, C. A., & Frimpong, S. (2012). Corporate Social And Environmental Auditing : Perceived Responsibility Or Regulatory Requirement?. *Research Journal of Finance and Accounting*, 3(4), 47–57.
- Pratama, Y. A., Amboningtyas, D., & Yulianeu. (2017). The Influence Of Good Corporate Governance And Financial Leverage To Profitability With Corporate Social Responsibility As Intervening Variable (Case Study On Manufacturing Companies Listed On Bei Period 2012-2016). *Journal of Management*, 3 (3), 450-460.
- Ramdhaningsih, A., & Utama, I. M. K. (2013). Pengaruh Indikator Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 3(2), 382-394.
- Sari, W. N., & Rani, P. (2015). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Return on assets (ROA) dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan FE Budi Luhur*, 4(1), 1–20.
- Setiawan, D., Hapsari, R. T., & Wibawa, A. (2018). Dampak Karakteristik Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia. *Mix: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(1), 1-15.
- Solikhah, B., & Winarsih, A. M. (2016). Pengaruh Liputan Media, Kepekaan Industri, Dan Struktur Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 13(1), 1–22.
- Suratno, Ignatius Bondan. 2006. "Pengaruh Environmental Performance Terhadap Environmental Disclosure Dan Economic Performance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Periode 2001-2004)." *Simposium Nasional Akuntansi IX (Padang)*.
- Trireksani, T., & Djajadikerta, H. G. (2016). Corporate Governance And Environmental Disclosure In The Indonesian Mining Industry. *Australasian Accounting, Business And Finance Journal*, 10(1), 18-28.
- Untoro, D. A. (2010). Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Di Indonesia. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Wulanda, R. D. P. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Publikasi Sustainability Report (Studi Empiris Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014). *JOM Fekon*, 4(1), 120–32.
- Yusnita, T. C. (2010). Corporate Governance, Environmental Performance, Dan Environmental Disclosure Di Indonesia. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Yusran, I. A., Kristanti, F. T., & Aminah, W. (2018). Pengaruh Indikator Good Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure ( Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011- 2016). *e-Proceeding of Manajemen*, 5(1): 621–27.

## **Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang**

**Suluh Hendrawan<sup>1</sup>, Nur Anisah<sup>2</sup>, Lina Nasihatun Nafidah<sup>3\*</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Department of Accounting, STIE PGRI Dewantara

<sup>1</sup>kanggehendra@gmail.com, <sup>2</sup>nur.anisah.stie.dw@gmail.com, <sup>3</sup>lina85.akstiedw@gmail.com

<sup>\*</sup>Penulis Korespondensi

### **Abstract**

The implementation of non-cash transactions in local governments is the government's step in the struggle for the public interest. This study discusses how to implement non-cash transactions in local government in an effort to realize good governance. With qualitative case studies obtained, the data in this study were collected by in-depth interviews. The results of this study prove that accountability, approval and administrative order have been successfully completed in the implementation of non-cash transactions. However, the efficiency of the use of the budget has not been able to optimize. Besides that, at the level of strategy, the system and structure are already running well. Factors of ability, human resources and leadership style that need to be considered in order to be successful in supporting good governance management strategies.

**Keywords:** non-cash transaction, good government governance

### **Abstrak**

Implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah merupakan langkah pemerintah dalam berjuang untuk kinerja yang baik dan efektif demi kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi transaksi non-tunai dalam pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Dengan pendekatan kualitatif - case study, data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan depth-interview. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi serta tertib administrasi sudah berhasil dicapai dalam implementasi transaksi non-tunai. Akan tetapi efisiensi dari penggunaan anggaran belum mampu tercapai. Namun demikian, pada tataran strategi, sistem dan struktur sudah berjalan dengan baik. Faktor kemampuan, sumber daya manusia serta gaya kepemimpinan yang perlu diperhatikan secara berkelanjutan agar dalam keberhasilan strategi pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik.

**Kata Kunci:** transaksi non-tunai, tata kelola pemerintah

## PENDAHULUAN

Implementasi transaksi non-tunai pada pemerintahan merupakan sebagai salah satu wujud dalam mencapai akuntabilitas transparansi dalam tata kelola pemerintah yang baik (Utari, 2016). Transaksi non-tunai juga merupakan langkah yang paling efektif untuk mengurangi adanya kecurangan (Sobko, 2014). Implementasi transaksi non cash sudah banyak diimplementasikan di beberapa negara maju dan berkembang dalam mengurangi adanya praktik money laundry (Moshi, 2012). Perkembangan teknologi saat ini telah memengaruhi sistem pembayaran, mulai dari tunai beralih menjadi non-tunai (Lukmanulhakim dkk, 2016). Perubahan sistem pembayaran berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Wulandari, 2019).

Penelitian terhadap transaksi non-tunai sudah mulai banyak berkembang. Utari (2016), menemukan hasil secara empiris bahwa dengan penerapan transaksi non-tunai pemerintah daerah DKI-Jakarta dapat mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola. Berdasarkan penelitian empiris transaksi-non-tunai juga mampu mengurangi adanya praktik kecurangan pada organisasi (Sobko, 2014). Pada temuan penelitian lainnya menyatakan bahwa tingkat konsumsi dipengaruhi oleh transaksi non-tunai (Nelasari & Cahyono, 2018). Berdasarkan kesenjangan dalam hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan transaksi non-tunai dalam mencapai tata kelola pemerintah yang baik.

Dengan menggunakan model dari Witcher & Chau (2010) yang telah mengembangkan model 7S pada akhir 1970-an untuk menganalisa organisasi dan efektivitasnya serta membantu mengatasi kesulitan-kesulitan perubahan organisasi. Model 7-S McKinsey merupakan kerangka yang banyak didiskusikan untuk melihat saling keterkaitan antara formulasi dan implementasi strategi. Kerangka 7S dari McKinsey atau yang lebih dikenal dengan McKinsey 7S Framework adalah sebuah model manajemen untuk melihat seberapa efektif organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Faktor faktor dalam organisasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi organisasi terdiri dari hard skill yang berupa strategi, struktur dan sistem. Berikutnya berupa soft skill yang terdiri dari kemampuan, sumber daya manusia serta gaya kepemimpinan dalam membangun nilai-nilai dalam organisasi.

*Indonesia Governance Index (IGI)* merupakan rapor tata kelola pemerintah daerah di Indonesia yang dilakukan oleh Kemitraan. Terdapat 6 (enam) prinsip IGI diantaranya prinsip transparansi, keadilan, partisipasi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Pada tahun 2012 Provinsi Jawa Timur menempati urutan terbaik kedua dengan nilai index 6,43 ([www.kemitraan.or.id/igi](http://www.kemitraan.or.id/igi)).

Berdasarkan data laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pemerintah Daerah Jombang merupakan salah satu pemerintah daerah diprovinsi Jawa timur yang memperoleh opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" selama lima tahun berturut-turut dari 2012-2013 ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

Pencapaian tersebut sebagai wujud dari pencapaian tata kelola pemerintah yang baik.

Dalam proses perbaikan berkelanjutan pemerintah daerah Jombang juga ikut serta dalam implementasi non-tunai dalam pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 900/2958/415.44/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non-tunai. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi strategi yang dapat meningkatkan efisiensi serta transparansi sebagai wujud dari pencapaian tata kelola yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi transaksi non-tunai dalam pemerintah daerah dalam mewujudkan pencapaian tata kelola pemerintah yang baik.

Suatu bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa penyajian laporan keuangan yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan keuangan tersebut diperiksa dan diawasi oleh badan pemerintah yang bertugas sebagai pengawas dan pemantau keuangan agar keuangan negara tetap terkontrol dengan baik serta dapat menjamin keandalan informasi-informasi yang disajikan. Laporan Keuangan Pemerintah ini selanjutnya dipublikasikan kepada rakyat sebagai pengguna laporan keuangan serta sebagai pemilik dana tersebut.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat dari masyarakat. Dalam rangka menjalankan amanah dalam undang-undang tersebut Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 memerintahkan percepatan implementasi transaksi non-tunai dipemerintah daerah sebagai sebagai pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian dilanjutkan dengan Surat Edaran Menteri dalam Negeri No. 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah merupakan langkah pemerintah dalam berjuang untuk kinerja yang baik dan efektif demi kepentingan publik.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi transaksi non-tunai dalam pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah merupakan formulasi dan implementasi strategi. Oleh karenanya, penelitian ini akan berkontribusi dalam menyempurnakan kebijakan mengenai transaksi non-tunai di institusi pemerintah.

## METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *post-positivistme* dengan model penelitian *case study* (Basuki, 2016; Neuman, 2014; Syahrudin, 2016). Dengan menggunakan Model 7-S McKinsey, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam penerapan transaksi non-tunai (*non-cash*) sebagai formulasi dan implementasi strategi dalam mencapai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan sebagai tata kelola pemerintah yang baik.

Model 7-S McKinsey merupakan kerangka untuk melihat saling keterkaitan antara formulasi dan implementasi strategi. Kerangka 7S dari McKinsey (*McKinsey 7S Framework*) adalah sebuah model manajemen untuk melihat seberapa efektif organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Dari kerangka tersebut di atas menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi organisasi adalah Strategi, Sistem, Struktur, Sumber Daya Manusia, Keahlian, *Shared Values*, dan Gaya kepemimpinan. Keberhasilan implementasi transaksi non-tunai pada aktivitas pemerintahan daerah menunjukkan akuntabilitas dan transparansi sebagai faktor tata kelola pemerintah yang baik bisa terwujud.

Informan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan informasi, dengan melalui wawancara secara mendalam dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) diharapkan dapat diperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan strategi analisis *Illustrative Method*, yakni model analisis yang mengambil konsep dan memperlakukan sebagai kotak kosong untuk diisi dengan deskripsi secara empiris (Neuman, 2014).

Data penelitian dikumpulkan melalui interview baik tertulis maupun elektronik, baik di lokasi pemerintahan maupun di luar pemerintahan dengan pertemuan formal maupun non-formal misalnya *Forum Group Discussion* (FGD). Selain melakukan interview secara mendalam kami juga melakukan observasi ditempat serta analisis data dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan transaksi non-tunai pada Pemerintah Kabupaten Jombang dimulai pada tahun 2018, ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 900/2958/415.44/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non-tunai. Perubahan yang paling mendasar dari adanya peraturan tersebut ini adalah pembatasan uang tunai yang dipegang oleh Bendahara serta ditiadakannya Uang Panjar bagi pelaksana kegiatan. Batas maksimal uang tunai yang boleh disimpan bendahara adalah 5 juta per hari. Uang Panjar adalah uang yang diserahkan oleh Bendahara kepada pelaksana kegiatan sebagai uang muka untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan adanya transaksi non-tunai maka pihak penerima akan langsung menerima dana sesuai dengan haknya, langsung tanpa ada perantara dari pihak manapun. Kondisi ini terjadi karena Bendahara akan melakukan transfer Uang Persediaan langsung kepada Pihak III atau penerima. Transparansi dapat dilihat dengan kesesuaian antara bukti pembayaran dengan jumlah transfer yang dilakukan oleh bendahara.

*"...Uang Persediaan yang ada di rekening Bendahara akan langsung ditoken kepada pihak Ketiga kapanpun dan dimanapun asalkan bukti pembayaran misalnya nota atau kuitansi sudah diserahkan kepada Bendahara." (BPKAD)*

Dalam penghematan pengeluaran belum langsung terlihat dengan adanya implementasi transaksi non-tunai. Penghematan pengeluaran hanya terjadi pada saat adanya selisih lelang akibat penawaran yang lebih rendah daripada pagu belanja yang ditetapkan di APBD. Padahal dalam mewujudkan *good governance*, pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada

di negara salah satunya adalah keuangan, baik dalam pelaporan maupun dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Ristanti *et.al* (2014) menyatakan salah satu bentuk tata kelola pemerintah yang baik adalah pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

*“Nampaknya belum ada pengaruh yang signifikan antara APBD dengan pelaksanaan non-tunai. Penghematan paling besar karena adanya selisih lebih antara penawaran lelang terendah dengan pagu anggaran yang ditetapkan. Kalau dibandingkan dengan penghematan yang ada di Jakarta, itu karena pembelian BBM yang di non-tunai. Kalo di Jombang kan sudah lama kita pakai sistem kupon yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan harian”. (BPKAD 1)*

Apabila diamati dari pelaksanaan transaksi non-tunai dibandingkan dengan pelaksanaan transaksi secara tunai maka yang berbeda hanyalah cara pembayarannya. Penyiapan dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan adalah sama. Padahal seharusnya penerapan Less Cash Society telah terbukti efektif dalam pembayaran sistem dengan indikator seperti keamanan efisiensi dan ekspansi (Aslinawati dkk, 2016). Dengan adanya transaksi non-tunai maka Bendahara “dipaksa” untuk melakukan token apabila transfer kepada Pihak III/penerima. Hal ini dikarenakan jumlah uang maksimal yang dipegang bendahara hanya 5 juta per hari. Konsekuensi dari token adalah kelebihan atau kekurangan transfer kepada penerima tidak bisa diserahkan atau diterima oleh Bendahara secara tunai melainkan harus disetor melalui rekening Bank. Segala rekaman mutasi inilah yang harus dipantau oleh bendahara melalui pencatatan BKU yang sesuai. Karena apabila terlewat satu atau dua transaksi saja yang terlewat maka akan membongkar pencatatan yang ada di BKU.

*“Saat ini Bendahara dituntut lebih terampil dan cermat di dalam pekerjaannya. Karena tidak hanya menatausahakan transaksi keuangan saja namun juga melakukan transfer melalui token. Dan dua pekerjaan ini harus sinkron dan pas karena bila tidak maka akan menyusahkan Bendahara itu sendiri” (BPKAD 2).*

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan transaksi non-tunai maka perlu diperhatikan factor-faktor yang dapat mendukungnya. Analisa faktor pendukung dilakukan berdasarkan Kerangka 7 S yang dibahas berikut ini:

## Strategi

Strategi pelaksanaan non-tunai adalah dengan menggunakan tahapan tahun 2018 sebagai tahap permulaan. Pada tahap permulaan ini berisi tujuan pengenalan dan pelatihan bagi Bendahara dan pelaksana kegiatan. Bendahara diharapkan memiliki keahlian dan ketrampilan yang lebih di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penguasaan ketrampilan bendahara tidak hanya pada pencatatan BKU namun juga ketrampilan transfer dan rekonsiliasi. Pun demikian dengan pelaksana kegiatan agar lebih berfokus pada kesuksesan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada tahap permulaan ini, juga menjadi ajang pengenalan bagi Pihak Ketiga selaku penyedia barang dan jasa. Bahwasanya pembayaran atas penyediaan barang dan jasa tidak lagi dilakukan melalui uang tunai namun melalui rekening bank sehingga pihak ketiga diharuskan membuka rekening Bank.

*“Untuk tahun 2018 ini merupakan tahap uji coba. Pasti ada kendala dan masalah di sana-sini. Kita tidak bisa kaku untuk menyikapi ini karena Mendagri pun memberi*

*kelonggaran tahapan pelaksanaan transaksi non-tunai. Untuk tahap awal ini kita berlakukan 5 juta rupiah untuk pembatasan uang tunai, nanti di tahun mendatang akan kita persempit lagi dan tahun-tahun mendatang malah mungkin nol rupiah. Soalnya kita juga bergantung kesiapan masyarakat, tidak bisa dipungkiri masyarakat awam lebih menyukai memegang uang tunai..."*

## Sistem

Sistem penatausahaan transaksi non-tunai merupakan bagian dari penatausahaan keuangan secara keseluruhan. Di dalam Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Keuangan telah diatur mulai dari penyiapan Laporan Pertanggungjawaban, batas waktu penyampaian laporan, hingga laporan-laporan yang harus disampaikan Bendahara kepada PPKD maupun Penggunaan Anggaran. Sistem penatausahaan transaksi non-tunai hanya berkonsentrasi terhadap tata cara pembayaran saja walaupun tidak dipungkiri memberi dampak yang luas pada sistem kerja bendahara.

Paling tidak ada empat perubahan pada sistem kerja Bendahara yaitu hilangnya uang panjar digantikan dengan token transfer, pencatatan transaksi di BKU yang harus selalu mengikuti token transaksi, rekonsiliasi harian/ mingguan/ bulanan antara BKU dengan rekening bank dan pemanfaatan uang tunai yang dibatasi hanya 5 juta rupiah. Terhadap perubahan ini BPKAD 2 memberikan komentar sebagai berikut:

*"walaupun sebenarnya sepele namun tata cara pembayaran non-tunai ini dampaknya cukup luas. Kita sampai melakukan simulasi secara detail terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Jelas di awal-awal akan banyak pertanyaan dari Bendahara yang muaranya adalah... kok sekarang jadi sulit. Padahal kalau diperhatikan sebenarnya sama saja, rekonsiliasi kan memang sudah jadi makanan sehari-hari, hanya saja kalau dulu Bendahara dipermudah Uang Panjar, sekali dikirim ke pelaksanaan kegiatan ya sudah dikelola sendiri sama pelaksana kegiatan."*

## Struktur

Pelaksanaan non-tunai berfokus pada perubahan sistem pembayaran yang melibatkan bendahara sebagai pembayar dengan pihak ketiga atau penerima. Namun pada prakteknya transaksi non-tunai melibatkan berbagai unsur yang terlibat pengeluaran APBD. Salah satu unsur utama pelaksanaan APBD adalah PPTK (Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan). PPTK memiliki tugas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangannya dapat diselesaikan secara optimal sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya PPTK juga memiliki kewajiban untuk segera menyusun laporan pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dasar Bendahara untuk meminta Surat Permintaan Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

Koordinasi yang baik antara PPTK dengan Bendahara adalah faktor mutlak kelancaran transaksi non-tunai. PPTK yang terlambat menyelesaikan SPJ akan membuat kapasitas Uang Persediaan di Bendahara menjadi berkurang dan tidak optimal sehingga mengakibatkan terhambatnya pembayaran atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain. Inspektorat 1 memberi komentar sebagai berikut:

*"Jelas PPTK harus paham dan sadar akan perubahan yang mendasar ini. Hal ini memang tidak muda dan butuh waktu. Selain panjar yang sudah tidak ada, PPTK diharuskan untuk segera membuat SPJ atas kegiatan yang sudah selesai. Hal ini butuh pemahaman bersama, kita harus duduk bersama untuk membahas ini. Pelu diluruskan lagi mana tanggung jawab PPPTK, mana yang tanggungjawab Bendahara. Bila salah satu tidak jalan, jelas mengambat serapan APBD,"*

Pelaksanaan transaksi non-tunai di Pemkab Jombang pada dasarnya mengembalikan kedudukan dan tugas Bendahara dan PPTK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bendahara memilih tugas untuk menerima, menyimpan dan membayarkan dana APBD yang menjadi tugas dan kewenangannya. Sedangkan tugas PPTK adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik maupun non fisik yang menjadi tugas dan kewenangannya serta melaporkan secara tertulis pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

Pelaksanaan transaksi non-tunai juga memiliki keuntungan lain yaitu dalam hal pelaksanaan audit internal. Pelaksanaan audit internal tentang *cash opname* menjadi lebih mudah karena uang kas tunai yang dipegang oleh Bendahara karena maksimal hanya 5 juta rupiah. Pun demikian dengan pemeriksaan atas rekening Bendahara juga lebih mudah dan cepat. Auditor dapat melihat dan mengamati mutasi rekening bendahara beserta sisa saldo berjalan melalui fasilitas internet banking. Kemudian auditor tinggal mencocokkan Buku Kas Umum (BKU) pada SIMDA Keuangan dengan laporan dari internet Bank Jatim.

*"Sebenarnya non-tunai ini malah mempermudah tugas auditor. Mereka tinggal membandingkan internet banking dengan BKU, sewaktu-waktu. Kalau dulu kan harus bikin surat permintaan print mutasi rekening Bendahara. Dulu juga Bendahara bebas pegang uang, sekarang kan tinggal 5 Juta rupiah. Kalaupun ada perbedaan antara BKU dengan rekening, sepanjang masih bisa dijelaskan melalui rekonsiliasi kan tidak jadi masalah" (BPKAD 1).*

### **Sumber Daya Manusia (Staf) dan Keahlian**

Berdasarkan pengamatan pada beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), latar belakang yang dimiliki oleh Bendahara memang berbeda-beda. Hal inilah yang menjadikan transaksi non-tunai membutuhkan waktu dan tahapan yang cukup lama. Kemampuan bendahara sangat dibutuhkan manakala melakukan pencatatan transaksi non-tunai melalui aplikasi SIMDA Keuangan yang dikembangkan oleh BPKP. Pada dasarnya aplikasi ini digunakan untuk mempermudah Bendahara dalam melaksanakan tugasnya. Namun tetap saja dibutuhkan pemahaman yang cukup untuk mengoperasikannya khususnya untuk transaksi yang sifatnya tidak rutin, misalnya pengembalian belanja, pembayaran kekurangan tagihan maupun transaksi kompleks lainnya yang melibatkan kegiatan yang dilaksanakan lebih dari sehari.

Kemampuan Bendahara yang memiliki pengetahuan tentang akuntansi atau pembukuan diyakini dapat mempermudah tugasnya sehari-hari. Untuk bendahara yang kurang memiliki pemahaman akuntansi, BPKAD selaku koordinator pengelolaan keuangan secara rutin melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan bagi bendahara mengenai penatausahaan keuangan setiap tahunnya. Bimbingan teknis ini dilaksanakan setiap bulan Oktober.

Pelaksanaan bimbingan teknis ini memiliki tujuan selain meningkatkan pemahaman bendahara mengenai penatausahaan keuangan juga bertujuan sebagai ajang pelatihan bagi bendahara baru yang menggantikan bendahara lama karena pension atau mutasi.

*“Bintek ini sangat penting sebagai pembuka implementasi non-tunai. Kalau tidak salah kita sampai bikin bintek sampai 3 kali tentang non-tunai ini. Itu belum dihitung dengan pendampingan kecil-kecil yang sifatnya kelompok maupun permintaan OPD. Kalau di pmda kan suatu kebijakan baru pasti butuh waktu untuk sosialisasi sampai pelaksana (Bendahara) benar-benar paham. Tapi kita tetap mengadakan bintek di akhir tahun, kalau itu sifatnya evaluasi dan penyegaran. Kalau dikaitkan dengan transaksi non-tunai saya kira bintek yang selanjutnya tidak harus mengulang dari awal, hanya solusi atas masalah-masalah kecil yang belum sempat dibahas sekaligus ajang pembelajana bagi bendahara baru” (BPKAD 2).*

### **Gaya Kepemimpinan**

Sebagai salah satu bentuk organisasi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berada dalam satu hierarki yang dipimpin oleh Kepala OPD yang disebut juga dengan Pengguna Anggaran (PA). Memperhatikan tugas dan kewenangannya maka setiap Kepala OPD memiliki kontribusi yang penting bagi suksesnya pelaksanaan transaksi non-tunai. Transaksi non-tunai dapat dianggap sebagai budaya baru yang harus dilaksanakan, menggantikan budaya lama yang terbiasa dengan pembayaran tunai. Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya transaksi non-tunai ini mendapatkan tanggapan yang beragam dari Kepala OPD bentuknya berupa dukungan atau malah resistensi.

*“Kalau manut masing-masing Kepala OPD, transaksi non-tunai jelas tidak jalan. Tetap ini kan bentuk komitmen bersama yang dikomandoi oleh Bupati melalui Instruksi Bupati. Kalau Bupati saja sudah komitmen maka semua Kepala OPD juga harus begitu. Tinggal bagaimana komunikasi antara Kepala OPD, PPTK dan Bendahara. Sebaiknya Bendahara jangan ditinggal begitu saja saat melaksanakan tugasnya, Kepala OPD juga harus memberikan support dan dukungannya. Terlebih saat ada permasalahan di OPD nya terkait masalah transaksi non-tunai. Kan semua staf dan pejabat struktural harus mendukung keputusan yang dibuat oleh pimpinan OPD maka sudah barang tentu keputusan yang dibuat pimpinan haruslah adil dan berat sebelah. Gaya kepemimpinan yang baik harus selalu mengayomi anak buah dan dirasakan adil bagi seluruh bawahannya.” (BPKAD 1).*

Apabila memperhatikan tugas Pengguna Anggaran maka salah bentuknya adalah melakukan pengesahan atas permintaan pembayaran (SPM) yang dibuat oleh Bendahara serta pengesahan terhadap SPJ yang telah disusun oleh PPTK. Kepemimpinan yang baik dapat mengakomodir atas kedua pelaksanaan tugas ini. Bentuk dari kepemimpinan itu adalah selalu memberi arahan dan dukungan baik kepada Bendahara maupun PPTK agar selalu bersama-sama mengarah pada keberhasilan pencapaian tujuan khususnya dalam hal ini adalah kesuksesan pelaksanaan transaksi non-tunai.

Astuti (2018), Pelealu dkk (2018), dan Monginsidi dkk (2019) sistem transaksi non-tunai terdapat beberapa keuntungan yaitu penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel. Karena seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah, sehingga hal ini akan mengurangi tingkat kesalahan hitung. Penelitian yang dilakukan

oleh Septiani & Kusumastuti (2019), Dartawan & Sudiarta (2019) menunjukkan pula bahwa penerapan transaksi non-tunai ini dirasakan dapat meningkatkan perwujudan prinsip *good governance* terutama prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi.

## SIMPULAN

Pelaksanaan transaksi non-tunai telah dilaksanakan secara bertahap di Pemerintah Kabupaten Jombang mulai tahun 2018. Implementasi transaksi non-tunai di pemerintah daerah Jombang dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, hasil yang nampak dari implementasi transaksi non-tunai tersebut adalah tercapainya akuntabilitas, transparansi serta tertib administrasi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya transfer non-tunai yang dapat dipantau secara *real time* untuk kepentingan audit serta telah terciptanya kesesuaian antara pelaporan Buku Kas Umum dengan laporan rekening bank berdasarkan internet banking. Akan tetapi, pencapaian efisiensi belum dapat dicapai secara maksimal. Hal tersebut, disebabkan oleh adanya dominasi dalam sistem lelang dalam belanja serta diperlukannya penghematan belanja lainnya. Hasil penelitian ini berdampak pada penerapan kebijakan ke depan bahwa dalam implementasi transaksi non-tunai dalam pemerintahan daerah yang menjadi tantangan dalam pencapaian tata kelola yang baik. Diperlukan sebuah sinergitas dari berbagai pihak dalam pencapaian strategi pemerintahan daerah.

Sesuai dengan 7S Mc-Kinsey dalam keberhasilan implementasi transaksi non-tunai sangat dipengaruhi oleh strategi, sistem dan struktur yang diberlakukan pada tiap OPD. Strategi, sistem dan struktur merupakan pijakan awal dalam implementasi transaksi non-tunai. Tiga faktor tersebut sudah berjalan dengan baik dalam mendukung implementasi transaksi non-tunai. Sedangkan, faktor sumber daya manusia dan gaya kepemimpinan menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian yang berkelanjutan sebagai dasar dalam penciptaan nilai-nilai dalam organisasi sebagai wujud dari *shared value*. Hal tersebut, disebabkan oleh adanya sifat yang dinamis dan dipengaruhi oleh individu-individu pelaksana tugasnya masing-masing. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang model gaya kepemimpinan yang tepat dalam pengembangan sumber daya manusia agar tercipta *shared value* yang mampu mendorong tercapainya keberhasilan strategi dalam tata kelola pemerintah yang baik.

## PUSTAKA ACUAN

- Aslinawati, E., Wulandari, D., & Soseco, T. (2016). Public Perception of the Effectiveness of Less Cash Society. *International Review of Social Sciences*, 4(1), 7-12.
- Astuti, S. R. (2018). Analisis Implementasi Transaksi Non-Tunai dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Yogyakarta: STIE Widya Wiwaha.
- Basuki. (2016). *Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen Berbasis Studi Kasus*. Surabaya: AUP - Unair.
- Dartawan, K. A. D. P. N., & Sudiarta, I. K. (2019). Implementasi Transaksi Non Tunai di Sekretariat DPRD Provinsi Bali untuk Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Kertha Negara*, 7(7), 1-14.

- Lukmanulhakim, M., Djambak, S., & Yusuf, K. (2016). Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Velositas Uang di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 41-46.
- Monginsidi, E. C., Koleangan, R. A. M., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Implementasi Transaksi Non-Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(9), 1-16.
- Moshi, H. P. B. (2012). Implications of Cash-Dominated Transactions for Money Laundering. *Working Paper Institute For Security Studies*.
- Nelasari, P. R., & Cahyono, H. (2018). Pengaruh Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat di Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 1(3), 251-260.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. New Jersey: Pearson Education.
- Pelealu, A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 220-229.
- Utari, N. P. (2016). Analisis Pelaksanaan Transaksi Non-Tunai Berdasarkan Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Depok: Universitas Indonesia.
- Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Prosing Industrial Research Workshop and National Seminar*. <https://doi.org/10.35313/irwns.v10i1.1478>.
- Sobko, O. V. (2014). Fraud in Non-Cash Transactions : Methods , Tendencies and Threats. *World Applied Sciences Journal*, 29(6), 774-778. <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2014.29.06.13930>
- Syahrudin, T. A. G. Y. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Witche, B. J., & Chau, V. Sum. (2010). *Strategic Management: Principles and Practice*. New Jersey: Pearson Education.
- Wulandari, B. I. (2019). Pengaruh Nilai Transaksi Pembayaran Non -Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Periode 2014-2017). *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Surakarta: IAIN Surakarta.

## **Peningkatan Akuntabilitas Publik Melalui Sistem Informasi Akuntansi pada Pondok Pesantren Salafiyah**

**Dwi Sulistiani**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
dwisulistiani@pips.uin-malang.ac.id

### **Abstract**

This study aims to determine the cash out transactions that occur in the Sabilurrosyad Islamic boarding school, analyze the internal control system, then compile the AIS cash outflow chart for the Sabilurrosyad boarding school so that it can increase public accountability. The research method is descriptive qualitative method using case studies. The results of the study indicate that internal control is still not good as evidenced by the existence of multiple tasks. Understanding of risk is still not understood by the leaders of Islamic boarding schools, information and communication is unclear. Monitoring has been carried out with the existence of monthly and annual financial reports, but it has not been compiled according to the accounting standards that should be. The flow chart has not been created so that the results of this study are in the form of a cash flow chart AIS can be used by the Sabilurrosyad boarding school.

**Keywords:** accounting information system, boarding school, accountability

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transaksi kas keluar yang terjadi di pondok pesantren Sabilurrosyad, menganalisis sistem pengendalian intern, kemudian menyusun flow chart SIA kas keluar untuk pondok pesantren Sabilurrosyad sehingga bisa meningkatkan akuntabilitas publik. Metode penelitian adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern masih belum bagus terbukti dengan adanya perangkapan tugas. Pemahaman resiko masih belum dipahami oleh pimpinan pondok pesantren, informasi dan komunikasi belum jelas. Monitoring telah dilakukan dengan adanya laporan keuangan bulanan dan tahunan, tapi masih belum disusun sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya. Bagan alur dokumen (flow chart) belum dibuat sehingga hasil dari penelitian ini berupa flow chart SIA kas keluar bisa digunakan oleh pondok pesantren Sabilurrosyad.

**Kata Kunci:** sistem informasi akuntansi, pondok pesantren, akuntabilitas

## PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki akar sosio-historis cukup kuat di masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan pesantren menduduki salah satu posisi relatif sentral pada dunia pendidikan di Indonesia untuk dapat bertahan pada berbagai gelombang perubahan. Pesantren harus memiliki kekuatan dan kemampuan strategis dalam menghasilkan manusia berkualitas, mendorong dan mengarahkan umat Islam meningkatkan aspek ekonominya demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Rahim, 2013). Pondok pesantren merupakan salah satu organisasi sektor publik yang berarti dimiliki oleh masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk melayani masyarakat. Pondok pesantren salafiah merupakan jenis pondok pesantren klasik yang sudah sejak lama mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun terkesan klasik tapi ilmu-ilmu yang diajarkan disana masih sangat dibutuhkan oleh santri-santri di Indonesia oleh karena itu masih banyak peminatnya.

Sangat menarik untuk memadukan keklasikan pondok pesantren salafiah dengan sistem akuntansi yang modern. Pondok pesantren perlu untuk meningkatkan akuntabilitasnya baik dari dana yang masuk maupun yang keluar. Pertanggungjawaban pada masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren. Penelitian yang dilakukan oleh Salombe (2008), Larasati (2013), Harun (2013), Salupi dkk (2014), Nikmatuninayah (2014) dan Zamzami (2015) mengenai sistem informasi akuntansi (SIA) kas masuk dan keluar di yayasan menunjukkan bahwa sistem yang ada masih belum cukup efektif, terbukti dengan ada beberapa bagian dari sistem tersebut yang masih harus diperbaiki. Yayasan dan pondok pesantren juga masih belum menerapkan PSAK No. 45 dalam penyusunan laporan keuangannya. Masih belum efektifnya SIA di pondok pesantren salah satunya karena belum adanya aturan yang tegas bagi mereka untuk menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya.

Sejak buku pedoman pondok pesantren diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Ikatan Akuntans Indonesia (IAI) serta mulai diberlakukan sejak Mei 2018, pondok pesantren harus mulai untuk meningkatkan akuntabilitas publiknya dengan menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya. Berdasarkan fakta tersebut diatas penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana penerapan akuntansi khususnya SIA kas keluar pada pondok pesantren setelah dikeluarkannya aturan dari BI bahwa pondok pesantren diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya.

Salah satu pesantren yang mengintegrasikan dimensi pendidikan agama dan dimensi pendidikan masyarakat adalah Pondok Pesantren Sabilurrosyad Kota Malang. Pesantren ini memiliki santri laki-laki dan perempuan yang sudah cukup banyak. Pondok pesantren ini telah melakukan pencatatan kas masuk dan keluar, tetapi masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi yang seharusnya. Sistem informasi akuntansi (SIA) kas masuk dan keluar sudah ada tapi masih belum digambarkan dalam bagan alur diagram (*flowchart*), selain itu pengasuh pondok juga merasa sistem akuntansi yang ada masih perlu untuk diperbaiki. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan SIA kas keluar di pondok pesantren

salafiyah tapi juga memberikan solusi yaitu berupa rekomendasi berupa: rancangan formulir dan flow chart kas keluar yang diperlukan oleh pondok pesantren Sabilurrosyad Malang. Pandangan orang bahwa pondok pesantren salafiyah itu terkesan kuno dan tidak mengikuti perkembangan jaman itu salah. Dalam penelitian ini akan membuktikan bahwa pondok pesantren salafiyah pun mampu juga untuk menjalankan sisten informasi akuntansi yang sesuai sehingga akuntabilitas publiknya bisa meningkat.

Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat prosedur yang mempunyai tujuan menghasilkan informasi yang tepat dan berguna bagi semua pihak, informasi diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data yang dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. (Yusuf, 2009; Winarno, 2016). Teknik dalam sistem informasi akuntansi biasanya menggunakan *Flowchart* (bagan alur). Bagan alur (*flowchart*) inilah yang menunjukkan arus data dan tahapan operasi dari satu bagian ke bagian lain yang terdiri dari beberapa prosedur dalam sebuah sistem.

Menurut Mulyadi (2010) unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dirancang dengan merinci unsur organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan, serta unsur praktek yang sehat, unsur organisasi yaitu: pertama, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penyimpanan kas. Kedua, bagian kasa tidak boleh melaksanakan sendiri transaksi kas masuk dan keluar tanpa campur tangan fungsi lain.

Pengendalian intern merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh manajemen dan seluruh personil dalam suatu organisasi. Pengendalian intern didesain untuk menjamin tercapainya tujuan baik dalam operasional, pelaporan dan kepatuhan. Pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keinginan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal itu dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik baiknya. Berhasil tidaknya sistem pengendalian intern bergantung pada kompetensi dan kendala dari pada pelaksanaannya dan tidak terlepas dari berbagai keterbatasan.

Terdapat beberapa komponen pengendalian intern yang harus ada dalam pengendalian intern suatu organisasi, yaitu: 1) *Control environment* atau lingkungan pengendalian. Merupakan tanggung jawab manajemen puncak untuk menyatakan dengan jelas nilai-nilai integritas dan kegiatan tidak etis yang tidak dapat ditoleransi. 2) *Control activities* atau kegiatan pengendalian. Untuk mengurangi terjadinya kecurangan, manajemen harus merancang kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi resiko tertentu yang dihadapi perusahaan. 3) *Risk assessment* atau pemahaman risiko. Perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menciptakan resiko bisnis dan harus menentukan bagaimana caranya mengelola resiko tersebut. 4) *Information and communication* atau informasi dan komunikasi. Sistem pengendalian internal harus dikomunikasikan dan diinfokan kepada seluruh karyawan perusahaan dari atas hingga bawah. 5) *Monitoring* atau pemantauan. Sistem pengendalian internal harus dipantau secara berkala. Apabila terjadi kekurangan yang signifikan, harus segera dilaporkan kepada manajemen puncak

and ke dewan komisaris. Kelima komponen tersebut wajib ada dalam suatu organisasi dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan pengendalian intern yang baik.

Sistem informasi akuntansi harus berkembang sesuai kebutuhan informasi perusahaan dan perkembangan teknologi, untuk itu diperlukannya penyusunan kembali sistem akuntansi yang baru. Selanjutnya adalah desain/perancangan sistem. Terdapat tiga tahap dalam perancangan sistem akuntansi: pertama, melakukan evaluasi rancangan alternatif berdasarkan sistem yang diusulkan. Kedua, menyajikan spesifikasi rancangan yang rinci. Ketiga, menyajikan laporan rancangan sistem.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transaksi kas keluar yang terjadi di pondok pesantren Sabilurrosyad. Selain itu, penelitian ini turut pula akan menganalisis sistem pengendalian intern, kemudian menyusun flow chart SIA kas keluar untuk pondok pesantren Sabilurrosyad sehingga bisa meningkatkan akuntabilitas publik.

## METODE

Penelitian sistem akuntansi kas keluar ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Kota Malang, Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperlukan dalam menganalisis pengendalian intern, selanjutnya membuat rancangan SIA kas keluar untuk pondok pesantren Sabilurrosyad.

Data Primer, berupa observasi, wawancara dan *focus group discussion* (FGD). Observasi dilakukan dengan cara melihat secara langsung sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas di Pondok Pesantren Sabilurrosyad. Prosedur apa saja yang dilalui yang membentuk sistem akuntansi pengeluaran kas. Wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem informasi akuntansi kas masuk dan kas keluar. Wawancara dilakukan dengan ketua yayasan/ pondok pesantren, bagian keuangan, bendahara/ kasir, bagian akuntansi dan pihak-pihak lain yang terkait. Hasil wawancara tersebut kemudian dicatat secara lengkap untuk mendapatkan informasi baik tertulis ataupun lisan terkait prosedur dan arus formulir di Pondok Pesantren Sabilurrosyad.

Data Sekunder, berupa kepustakaan dan dokumentasi. Terdiri dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan sistem akuntansi pengeluaran kas, dan lain sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa struktur organisasi, formulir, faktur, kebijakan-kebijakan tertulis dan dokumen-dokumen lainnya yang ada di lapangan.

Metode triangulasi dilakukan dalam penelitian ini guna memeriksa keabsahan data yang didapat oleh peneliti selama pengambilan data berlangsung dengan memanfaatkan suatu data lain untuk dikonfirmasi kebenarannya (Moleong, 2010) Dalam menganalisis data dan menjawab masalah penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, survey Pendahuluan. Dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Sabilurrosyad. *Kedua*, Mendata semua transaksi yang terjadi di pondok pesantren terkait dengan kas masuk dan kas keluar. *Ketiga*, analisis. Pada tahap ini penggunaan literatur sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimanakah sistem informasi akuntansi kas keluar

yang efektif kemudian digabungkan hasil penelitian di lapangan akan bisa menghasilkan rancangan kas keluar yang sesuai untuk pondok pesantren Sabilurrosyad. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut kekurangan atau kelemahan dari sistem akan dapat dibuat rekomendasi untuk memperbaiki sistem yang sudah ada sebelumnya. *Keempat*, Perancangan. Tahap perancangan digunakan untuk membuat rancangan formulir dan menyusun flow chart (bagan alur dokumen) terkait SIA kas keluar baik secara naratif ataupun dalam bentuk gambar flow chart. *Kelima*, kesimpulan dan rekomendasi berupa rancangan sistem informasi akuntansi kas keluar yang efektif. Tahap ini dihasilkan berdasar penjabaran data penelitian beserta analisis sesuai dengan teori-teori dan literatur yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pondok Pesantren Sabilurrosyad memiliki beberapa departemen yang berada dalam satu Yayasan Sabilurrosyad, yaitu: SMPI Sabilurrosyad, SMAI Sabilurrosyad, Madrasah Diniyah, TPQ, BLK (Balai Latihan Kerja) dan Pondok Pesantren Putra. Penelitian untuk memilih SMPI Sabilurrosyad untuk menjadi contoh salah satu departemen di pondok pesantren Sabilurrosyad. Departemen ini menghasilkan surplus dalam pendanaannya sehingga bisa digunakan untuk membiayai departemen yang lain.

Transaksi kas keluar dilakukan dengan menggunakan mekanisme anggaran yang sudah setuju oleh kepala sekolah dan pengurus yayasan untuk tahun berikutnya. Anggaran disusun oleh tim manajemen sekolah yang terdiri dari : kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pengurus komite sekolah dan bendahara sekolah. Anggaran disusun dengan menggunakan dokumen Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam anggaran tersebut selain memuat anggaran pendapatan juga memuat anggaran belanja sekolah serta dana cadangan yang digunakan untuk pengeluaran yang tidak terduga. Laporan keuangan dilaporkan tiap bulan untuk manajemen sekolah dan tiap tahun untuk yayasan. Laporan keuangan terkait dengan BOS dan BOSDa sudah menggunakan prosedur dan bentuk laporan yang jelas berdasarkan aturan pemerintah terkait mekanisme pengajuan dan pelaporan dana BOS dan BOSDa untuk sekolah yang sudah memenuhi syarat.

Transaksi kas keluar terdiri dari: Belanja gaji, Belanja ATK, Belanja bahan (selain ATK), Belanja pemeliharaan, Belanja modal yang terdiri dari: Tanah, Gedung, Peralatan, Belanja perjanan/transportasi, Belanja konsumsi, Belanja listrik dan air, Belanja tendik (tenaga pendidik) dan Belanja lain-lain

Dana pondok pesantren diperoleh dari dana pemerintah dan dana bukan dari Pemerintah. Dana bukan dari pemerintah digunakan untuk pembelian, sewa dan untuk gaji karyawan. Kas bisa dikeluarkan untuk semua pembelian dan sewa yang sudah direncanakan sebelumnya dengan mengajukan proposal dan disetujui oleh ketua yayasan dan kepala sekolah. Bendahara menyimpan data proposal untuk kemudian membayarnya saat akan dilakukan pembelian atau sewa. Setelah selesai kegiatan, penanggungjawab kegiatan harus membuat laporan kegiatan untuk kemudian disimpan sebagai bukti oleh bendahara. Penggajian dilakukan untuk karyawan saja, sedangkan pengurus yayasan tidak memperoleh gaji. Besaran gaji ditentukan oleh lembaga tersebut sesuai dengan UMR.

Pengeluaran kas yang berasal dari dana BOS (dana pemerintah) hanya bisa digunakan untuk pengeluaran operasional yang sifatnya rutin seperti: perlengkapan, honorarium, pemeliharaan gedung, alat peraga, percetakan, fotocopy, konsumsi, dan pemeliharaan prasarana lainnya. Prosedur pembelian dan pengeluaran kas: Alat Tulis, alat peraga, percetakan, foto copy, konsumsi, pemeliharaan gedung dan prasarana lainnya. 1) Bagian TU mengecek kartu stok barang dan mengajukan pembelian saat persediaan sudah menipis. 2) Membuat daftar permintaan barang. 3) Menyerahkannya kepada bendahara.

Honorarium: 1) Pembayaran honorarium guru yang menjabat dan guru ekstra kulikuler didasarkan pada SK yang telah dikeluarkan oleh ketua yayasan dan kepala sekolah. 2) Waka Kurikulum membuat rencana anggaran terkait honorarium. 3) Waka kurikulum membuat rekap anggaran dan pengeluaran kas untuk honorarium berdasarkan SK yang telah ada.

Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar: 1) Kepala TU melakukan verifikasi terhadap BAP dan surat pesanan barang. 2) Melakukan pencocokan data faktur dengan BAP. 3) Jika sesuai kemudian membuat tanda terima faktur. 4) Menyerahkannya pada supplier. 5) Melakukan verifikasi terhadap bukti (menghitung ulang). 6) Mencatat dalam bukti kas keluar (BKK) sesuai besarnya tagihan. 7) Melakukan paraf pada BKK. 8) Membuat buku control anggaran unit dan mencatat BKK tersebut di buku itu. 9) Mengajukannya pada bagian bendahara, minta persetujuan kepala sekolah untuk bisa dikeluarkan uangnya. 10) Melakukan pembayaran oleh bendahara.

Pihak-pihak yang terlibat terkait pengendalian Internal menurut COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations*) adalah dewan komisaris, manajemen, dan pihak-pihak lainnya yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selain itu juga bahwa tanggung jawab untuk penetapan, penjagaan, dan pengawasan sistem Pengendalian Internal adalah tanggung jawab manajemen. Di pondok pesantren yang merupakan organisasi nirlaba, peran dewan komisaris digantikan oleh masyarakat, sedangkan manajemen dilakukan oleh pengurus pondok pesantren dan pengelolaan sekolah yang berada di bawah yayasan pondok pesantren tersebut.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan di pondok pesantren Sabilurrosyad khususnya di SMPI Sabilurrosyad dapat dipaparkan bahwa *lingkungan pengendalian* masih belum begitu bagus. Hal tersebut terbukti dengan adanya perangkapan tugas antara bagian kasir dan bagian accounting, kemudian perangkapan tugas bagian gudang dan bagian pembelian yang dilakukan oleh bagian pengadaan barang (Hasil wawancara dengan bendahara SMPI Sabilurrosyad).

*Kegiatan pengendalian* yang dilakukan adalah adanya approve/persetujuan dari pihak kepala sekolah untuk pengeluaran yang sifatnya tidak rutin, untuk pengeluaran rutin tidak perlu diapprove. Mengenai pemahaman resiko juga masih belum dipahami oleh pihak pengelola pondok pesantren. Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dapat dipaparkan bahwa mereka belum paham terkait resiko keuangan yang dihadapi baik itu kecurangan maupun kehilangan. Sistem di pondok pesantren masih mengandalkan kepercayaan yang tinggi kepada karyawannya yang itu memang menjadi ciri khas akuntansi di pondok pesantren.

*Informasi dan komunikasi* juga masih belum jelas, terbukti dengan bentuk laporan keuangan yang masih belum tau bagaimana menyusunnya, sehingga pengelola tidak tau bagaimana kinerja mereka dari tahun ke tahun terkait keuangan. Laporan keuangan yang kurang informatif tersebut sebenarnya akan dapat mengurangi nilai mereka saat ada akreditasi sekolah melakukan visitasi. Jenjang komunikasi sudah mulai terstruktur tapi ada kalanya komunikasi tersebut dipotong garis komunikasinya saat ada keperluan yang mendesak, apalagi saat pemilik pesantren yang menyuruhnya. Dalam garis komunikasi di pondok pesantren peran kyai menjadi sangat penting dan semua perkataannya adalah perintah yang harus dilakukan oleh santri dan pegawainya. Kharisma Kyai sebagai orang yang dapat dipercaya dan mempunyai pengetahuan yang tinggi menjadi pusat komunikasi di pondok pesantren.

*Monitoring* dilakukan oleh SMPI Sabilurrosyad dilakukan dengan adanya laporan keuangan bulanan yang diberikan bendahara pada kepala sekolah dan laporan keuangan tahunan yang diserahkan kepada pengurus pondok pesantren. Hanya saja setelah dilakukan pelaporan keuangan, hasilnya tidak digunakan untuk tindakan perbaikan atau mengukur kinerja organisasi agar bisa mencapai tujuan dan menjadi lebih baik lagi.

Masalah yang dihadapi di SMPI Sabilurrosyad adalah masih belum bisa menyusun laporan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk menyusun laporan keuangan di pondok pesantren yang dananya berasal dari dana sendiri (bukan dari bantuan pemerintah). Kendalanya adalah bahwa bendahara bukan memiliki kompetensi di bidang keuangan ataupun akuntansi sehingga belum begitu paham terkait penyusunan laporan keuangan serta mekanisme atau sistem yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan permasalahan dan kendala tersebut diperlukan sebuah rancangan sistem akuntansi khususnya kas masuk dan kas keluar yang bisa membantu menjadi acuan dalam transaksi kas masuk dan kas keluar di SMP ini.

Berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dianalisis bahwa transaksi kas masuk dan kas keluar di SMPI Sabilurrosyad dilakukan oleh satu orang bendahara baik itu kas masuk maupun untuk kas keluar. Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan juga dilakukan oleh bendahara tersebut, hal ini melanggar teori tentang pengendalian intern bahwa personil untuk kasir/bendahara tidak boleh merangkap sebagai pencatat/bagian akuntansi. Namun hal ini dalam kenyataannya tidak menimbulkan masalah baik pencurian atau kecurangan dikarenakan kepercayaan yang dibangun di pondok pesantren Sabilurrosyad sangat kuat sehingga semua pegawai menjaga amanah yang telah diberikan oleh kyai mereka. Hal inilah yang berbeda antara pengendalian intern di perusahaan dengan di pondok pesantren karena peran kyai sebagai pemimpin yang kharismatik sangatlah besar sehingga pegawainya selalu menjaga amanah meskipun tidak diawasi. Dilingkungan pondok pesantren dengan spiritualisme yang sangat tinggi merupakan pengendalian intern tersendiri, karena mereka takut pada Allah yang selalu mengawasi mereka.

Dalam standar akuntansi (SAK ETAP) mewajibkan untuk setiap entitas untuk melakukan pencatatan dengan system double entry. Sistem tersebut mengharuskan pencatatan atau jurnal dilakukan pada tiap transaksi dengan melakukan debit dan kredit pada rekening

yang bersangkutan. Satu transaksi harus melibatkan setidaknya satu rekening yang di debit dan satu rekening yang di kredit, sehingga terjadi keseimbangan antara debit dan kreditnya. Tabel 1 memperlihatkan contoh perbedaan sistem *single entry* dan *double entry*.

**Tabel 1. Sistem pencatatan single entry dan double entry**

Pencatatan <i>Single Entry</i>		Pencatatan <i>Double Entry</i>	
Pendapatan-SPP	Rp xxx	Kas	Rp xxx
		Pendapatan-SPP	Rp xxx
Perlengkapan	Rp xxx	Perlengkapan	Rp xxx
		Kas	Rp xxx

Sumber: Data Diolah 2018

Aset bertambah di sisi debit, pendapatan bertambah di sisi kredit, beban bertambah di sisi debit, sedangkan kewajiban dan aset neto bertambah di sisi kredit. Buku besar merupakan tahap selanjutnya setelah dilakukan jurnal, maka harus diposting ke buku besar tiap rekening yang ada sesuai dengan kode rekening diatas. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan keuangan yang sesuai untuk pondok pesantren, yang terdiri dari: Laporan posisi keuangan, Laporan aktivitas, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45. Tabel 2 menunjukkan rancangan catatan untuk Yayasan Pondok Pesantren Sabilurrosyad.

**Tabel 2. Rancangan Buku Kas**

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo

Dokumen yang digunakan oleh pondok pesantren Sabilurrosyad adalah dokumen transaksi (bukti kas keluar, nota, kwitansi, faktur, dll) serta dokumen buku catatan transaksi berupa buku jurnal dan buku besar. Tabel 3 merupakan rancangan dokumen yang bisa digunakan oleh Pondok Pesantren Sabilurrosyad.

**Tabel 3. Rancangan Buku Jurnal**

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit

Analisis pada catatan pertama untuk kas masuk dilakukan pada buku pembantu SPP yang dibuat oleh bendahara dimana buku pembantu tersebut membantu sekolah untuk mengetahui siapa santri yang sudah bayar SPP ataupun yang belum. Meskipun bentuk buku pembantu masih belum sesuai tapi cukup untuk memberikan informasi yang

dibutuhkan. Analisis pada catatan terakhir di SMPI Sabilurrosyad masih belum menyusun laporan keuangan, hal tersebut dikarenakan bendahara masih belum tau bagaimana bentuk laporan keuangan yang seharusnya. Oleh karena itu sangat diperlukan perancangan kode akun, formulir yang dibutuhkan, catatan yang harus dilakukan, bentuk laporan keuangan dan bagan alur dokumen (flowchart) terkait kas keluar yang dilakukan di SMPI ini. Tiap bukti transaksi yang terjadi baik itu kas masuk maupun kas keluar harus dicatat dalam buku jurnal yang terdiri dari tanggal, keterangan dan debit serta kredit yang menunjukkan posisi dalam logika akuntansi, hal ini sebagaimana terlihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Rancangan Buku Besar  
Nama Akun..... Kode Akun.....**

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
---------	------------	-------	--------	-------

Formulir kas keluar digunakan sebagai bukti intern terkait transaksi kas keluar dengan nomor urut tercetak yang nantinya akan dilampiri oleh bukti ekstern berupa nota, kwitansi, dll untuk kas keluar. Tabel 5 merupakan rancangan formulir kas keluar.

**Tabel 5. Rancangan Formulir Kas Keluar**

SMPI Sabilurrosyad Jl. Candi VI C No. 303 Karangbesuki Sukun Malang		Bukti Kas Keluar No. KK00000001	
Surat Perintah Membayar			
Uraian		Jumlah	
TOTAL			
Terbilang :			
Keterangan:			
Disetujui	Kasir	Menyetujui	Malang, Yang Menerima

Berdasarkan analisis yang dilakukan berikut ini rekomendasi rancangan SIA kas keluar untuk pondok pesantren Sabilurrosyad: Kas keluar untuk Pembelian atau Sewa. (a) Panitia Kegiatan. 1) Menyusun proposal kegiatan dan anggaran biaya. 2) Mengajukan permohonan pembelian atau sewa pada ketua yayasan. 3) Menyerahkan permohonan tersebut pada bendahara setelah mendapat persetujuan dari ketua yayasan. 4) Menerima uang dan bukti kwitansi pembelian atau sewa. 5) Menyusun pertanggungjawaban atas uang yang diterima. 6) Meyerahkan lembar pertanggungjawaban pada akunting. (b) Akunting. 1) Menerima kwitansi lembar 2 sebagai bukti kas keluar. 2) Melakukan pencatatan transaksi pada buku jurnal. 3) Melakukan posting ke buku besar. 4) Menerima laporan pertanggungjawaban

(LPJ) dan memeriksa kebenarannya.

Arsip LPJ. (a) Ketua yayasan. 1) Menerima proposal dari panitia kegiatan beserta RAB nya. 2) Mengecek proposal dan RAB. 3) Memberikan keputusan untuk menyetujui atau tidak proposal tersebut. 4) Menandatangani proposal jika menyetujuinya. (b) Bendahara yayasan. 1) Menerima proposal dan RAB yang telah disetujui oleh ketua yayasan. 2) Melakukan cek atas kebenaran proposal dan RAB. 3) Membuat kwitansi rangkap tiga untuk: panitia kegiatan, akuntan dan arsip. 4) Menyerahkan uang pada panitia kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui. 5) Menyerahkan kuitansi lembar 2 pada akunting untuk dicatat dalam jurnal.

Sistem kas keluar untuk penggajian: (a) Tata Usaha. 1) Melakukan cek daftar absen karyawan. 2) Menyusun daftar potongan baik yang rutin maupun tidak rutin. 3) Mengecek data perubahan gaji untuk disesuaikan. 4) Mencetak daftar gaji. 5) Mengajukan daftar gaji pada kepala sekolah untuk dicek dan disetujui. (b) Kepala sekolah: menerima daftar gaji, mengecek dan menyetujuinya. (c) Ketua yayasan. 1) Menerima surat pembayaran dan daftar gaji untuk disetujui. 2) Membuat surat kuasa pencairan dana untuk diberikan pada bendahara. (d) Akunting. 1) Menerima bukti pembayaran gaji dari bendahara. 2) Melakukan pencatatan dalam buku jurnal. 3) Melakukan posting ke buku besar. (e) Bendahara Yayasan. 1) Menerima surat kuasa pencairan dana dan bukti pembayaran gaji. 2) Menandatangani surat kuasa pencairan dana. 3) Membayar gaji secara tunai ataupun auto debet bank. 4) Menyerahkan bukti pembayaran pada bagian akunting untuk dicatat.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis transaksi dengan model COSO menemukan bahwa lingkungan pengendalian masih belum begitu bagus. Hal tersebut terbukti dengan adanya perangkapan tugas antara bagian kasir dan bagian *accounting*. Kemudian perangkapan tugas bagian gudang dan bagian pembelian yang dilakukan oleh bagian pengadaan barang. Kegiatan pengendalian perlu ditingkatkan dengan adanya persetujuan dari pihak kepala sekolah untuk pengeluaran yang sifatnya tidak rutin. Mengenai pemahaman resiko juga masih belum dipahami oleh pihak pengelola pondok pesantren. Pihak pengelola pondok pesantren Sabilurrosyad belum paham terkait resiko keuangan yang dihadapi baik itu kecurangan maupun kehilangan. Sistem di pondok pesantren masih mengandalkan kepercayaan yang tinggi kepada karyawannya yang itu memang menjadi ciri khas akuntansi di pondok pesantren. Monitoring dilakukan dengan adanya laporan keuangan bulanan yang diberikan bendahara pada kepala sekolah dan laporan keuangan tahunan yang diserahkan kepada pengurus pondok pesantren. Perancangan SIA kas keluar berupa catatan, formulir dan flowchart telah memperhatikan sistem pengendalian internal yang dibutuhkan oleh pondok pesantren Sabilurrosyad. Perancangan flowchart terdiri dari: flowchart prosedur aktivitas pembiayaan dan aktivitas pembiayaan gaji.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat direkomendasikan sebagai berikut: Pertama, transaksi-transaksi yang terjadi bisa lebih diperjelas dan dicatat secara tertib dalam formulir serta catatan yang ada. Kedua, adanya pemisahan tugas antara bagian kasir dan

bagian accounting serta bagian pembelian dan bagian gudang, struktur organisasi juga disesuaikan dengan kebutuhan. Ketiga, Perancangan SIA kas keluar memang diperlukan oleh pondok pesantren Sabilurrosyad untuk bisa lebih menertibkan administrasi keuangan disana. Perancangan bagan alur dokumen (flowchart) yang sudah dibuat bisa digunakan dalam kegiatan keuangan yang ada.

## PUSTAKA ACUAN

- Harun, L. (2013). Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Pada Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purosari Lampung. *Proceeding Konferensi Mahasiswa Sistem Informasi..*
- Larasati, I. (2013). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Muqimius Sunnah. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Yogyakarta: STIE MDP.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nikmatuniayah. (2014). Penerapan Teknologi Laporan Kuangan berdasarkan SAK ETAP dan PSAK 45 IAI pada Yayasan Daruttaqwa Kota Semarang. *Prosiding SNA PP: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*.
- Rahim, H. (2013). *Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pesantren*. Jakarta: Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Departemen Agama RI.
- Salombe, D. M. (2008). Analisis Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Sinode Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud (GMIST) di Kabupaten Sangehe. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Manado: Univeristas Samratulangi.
- Salupi, R., Halim, A., & Fauzan. (2014). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Pengeluaran Kas pada Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Al Kautsar Assofyanayah Blitar. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 1-10.
- Winarno, W. W. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Yusuf, H. (2009). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: STIE KPN.
- Zamzami, N. (2015). *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Yayasan Al-Inayah Purwosari Pasuruan*. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.



## **Studi Fenomenologis Tentang Implementasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Badan Hukum di Indonesia**

**Yusar Sagara<sup>1\*</sup>, Santi Yustini<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>1</sup>yusar.sagara@uinjkt.ac.id, <sup>2</sup>santi.yustini@uinjkt.ac.id

<sup>\*</sup>Penulis Korespondensi

### **Abstract**

This study examines the laws and regulations that form the legal basis of governance of state universities and their implications for academic and non-academic autonomy. The purpose of this study is to find answers to policies and practices of academic and non-academic governance and find alternative support of university management concepts and practices from the study of laws and regulations on higher education and legislation on state finance. Data analysis is using qualitative by studying the ideal concept (according to regulation, observation and documentation). The results of this study conclude that the governance of state universities in the context of academic autonomy is still too dominated by the government. In non-academic autonomy is also not yet fully implemented such as organizational structure, staffing, finance, and international cooperation.

**Keywords:** state university administration, academic Autonomy, non-academic autonomy

### **Abstrak**

Studi ini meneliti hukum dan peraturan yang membentuk dasar hukum tata kelola universitas negeri dan implikasinya bagi otonomi akademik dan non-akademik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban terhadap kebijakan dan praktik tata kelola akademik dan non-akademik dan menemukan dukungan alternatif dari konsep dan praktik manajemen universitas dari studi hukum dan peraturan tentang pendidikan tinggi dan undang-undang tentang keuangan negara. Analisis data menggunakan kualitatif dengan mempelajari konsep ideal (sesuai dengan regulasi, observasi dan dokumentasi). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola perguruan tinggi negeri dalam konteks otonomi akademik, masih terlalu didominasi oleh pemerintah. Dalam otonomi non-akademik juga belum sepenuhnya dilaksanakan seperti struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, dan kerjasama internasional.

**Kata Kunci:** administrasi universitas negeri, otonomi akademik, otonomi non-akademik

## PENDAHULUAN

Tata kelola pendidikan di Indonesia khususnya perguruan tinggi negeri selanjutnya disebut PTN semakin mendapat tantangan dalam menyikapi persaingan global di tingkat perdagangan dunia. Perguruan tinggi menghadapi permasalahan yang semakin kompleks dalam memasuki era globalisasi. Permasalahan yang dihadapi oleh perguruan tinggi semakin dinamis mulai dari model dan proses penerimaan mahasiswa baru, kecukupan sarana dan prasarana perkuliahan dan laboratorium, rasio dosen dan mahasiswa, kurikulum program studi, pembukaan program studi baru yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan industri, hasil-hasil penelitian yang belum diaplikasikan, kurang adanya kesinambungan hasil-hasil penelitian yang ditindaklanjuti melalui pengabdian kepada masyarakat, penulisan dan penerbitan karya ilmiah yang masih terbatas. Hal ini dibuktikan dengan data peringkat pendidikan dunia atau *World Education Ranking* yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh (OECD) menentukan, di posisi mana suatu negara maju dalam segi pendidikan. Indonesia menempati urutan ke 57 dari total 65 negara.

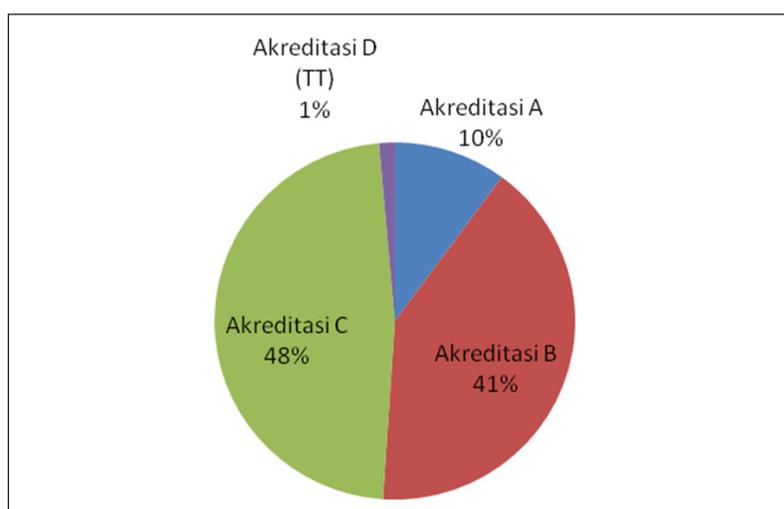
Hal senada diperkuat oleh data yang dilansir oleh kemenristekdikti pada tahun 2015 yang menunjukkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah. Dilihat dari rendahnya jumlah pendidikan tinggi di Indonesia yang terakreditasi "A". Dari total 18.264 pendidikan tinggi yang ada di Indonesia hanya 1.845 yang terakreditasi A, 7.480 terakreditasi B, 8.682 terakreditasi C dan masih terdapat 257 yang belum terakreditasi. Tabel 1 menunjukkan data per 31 Desember 2015.

**Tabel 1. Akreditasi Pendidikan Tinggi di Indonesia**

Jenjang	Akreditasi				Total Terakreditasi
	A	B	C	D (TT)*	
Vokasi	166	1.382	2.183	75	3.806
S1	1.106	4.748	5.898	175	11.927
S2	394	1.060	493	5	1.952
S3	140	213	69	2	424
Profesi	39	77	39	0	155
Spesialis	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.845</b>	<b>7.480</b>	<b>8.682</b>	<b>257</b>	<b>18.264</b>

Sumber: Lakip Kemenristekdikti, tahun 2015

Selanjutnya presentase pendidikan tinggi yang terakreditasi A, B, C dan D (tidak terakreditasi) disajikan dalam bentuk prosentase. Gambar 1 menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang terakreditasi C masih sangat tinggi yaitu 48% dibandingkan perguruan tinggi terakreditasi B sebesar 41% dan terakreditasi A sebesar 10% serta masih terdapat perguruan tinggi yang belum terakreditasi yaitu sebesar 10% dari total perguruan tinggi yang ada di Indonesia baik negeri maupun swasta serta jenjang vokasi, strata satu (S-1), strata dua (S-2), strata tiga (S-3), profesi dan spesialis.

**Gambar 1. Prosentase Akreditasi Perguruan Tinggi Di Indonesia**

Sumber : Lakip Kemenristekdikti, tahun 2015

*The United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 2013, juga melaporkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) Indonesia masih berada di urutan ke-121 dari 185 negara yang meliputi aspek tenaga kerja, kesehatan, dan pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan tinggi di Indonesia dapat dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2015 menapak 7,56 juta orang. Angka ini setara dengan 6,18 persen dari total 122,4 juta orang angkatan kerja. Sumarno (2011) menyatakan bahwa rendahnya mutu pendidikan tinggi di Indonesia disebabkan oleh rendahnya komitmen pemerintah terhadap pendidikan, kepemimpinan, dan belum diimplementasikannya tata kelola yang baik di pendidikan tinggi. Perguruan tinggi yang menerapkan tata kelola yang baik maka peningkatan dan kelangsungan hidupnya akan terjamin. Kualitas lulusan akan terjamin dengan adanya kepastian dapat lulus tepat waktu dan lulusan akan memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar.

Penelitian ini melakukan implementasi tata kelola perguruan tinggi dengan pendekatan fenomenologis. Tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini ialah menyusun konsep ideal mengenai tata kelola perguruan tinggi yang baik.

## **METODE**

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penekanan pada data sekunder, berupa review perpustakaan yang didukung oleh pandangan dan argumen dari para ahli dengan teknik wawancara langsung dengan Direktorat Pendidikan Tinggi, Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi, Anggota Senat PTBH (ITB, UGM, IPB, UI, UPI, USU, UNAIR, UNPAD, UNDIP, UNHAS, ITS). Analisis data menggunakan kualitatif dengan mempelajari konsep ideal (sesuai dengan regulasi, observasi dan dokumentasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kajian Filosofi Good University Governance

*Governance* dapat didefinisikan sebagai cara atau mekanisme yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk mengatur dan mengendalikan organisasi. UNDP (1997) mendefinisikan *governance* sebagai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada semua tingkatan. OECD (2004) menyatakan bahwa *governance* sebagai suatu cara kekuasaan yang dijalankan dan dikendalikan untuk mencapai tujuan dan bagaimana sumber daya yang ada di atur untuk kepentingan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa *governance* mempunyai tiga perspektif yaitu *economic governance* yang meliputi proses bagaimana sumber daya ekonomi diatur, dikelola dan dialokasikan secara benar, *political governance* yang berarti mengatur segala sesuatu untuk mencapai suatu tujuan dan *administratif governance* yang berarti bagaimana implementasi dari suatu kebijakan bisa berjalan sesuai dengan yang ditentukan. Dengan kata lain institusi dari *governance* memiliki tiga domain, yaitu state (Negara atau pemerintah), *privat sector* (sector swasta dan dunia usaha) dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing (Sedarmayanti, 2012)

Selanjutnya *governance* merupakan suatu istilah yang digunakan di sektor privat atau perusahaan dan di sektor publik termasuk di dalamnya pemerintahan. Dalam sektor privat atau perusahaan dikenal dengan istilah *corporate governance* atau tata kelola perusahaan dan di sektor publik dikenal dengan *public governance*, termasuk di dalamnya pemerintahan yang dikenal dengan istilah *government governance* atau tata kelola pemerintahan. Keseluruhannya menunjukkan suatu cara atau mekanisme internal yang disepakati bersama yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk mengatur, mengelola dan mengendalikan sesuatu pada berbagai tingkatan agar sesuatu tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang ditentukan. Tata kelola sektor publik meliputi kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan terpenuhi dan bahwa operasi dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab (IIA, 2012).

IFAC (2001) menyatakan tata kelola di sektor publik berkaitan dengan struktur, proses pengambilan keputusan, akuntabilitas, kontrol dan perilaku pada organisasi sektor publik. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tata kelola (*governance*) di sektor publik merupakan sistem yang terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan sebuah organisasi publik untuk memberikan arah strategis, memastikan tujuan tercapai, mengelola risiko dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab dengan akuntabilitas. Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas maka yang dimaksud *Good University Governance* dalam penelitian ini adalah struktur, kebijakan dan prosedur internal universitas yang disepakati bersama oleh internal universitas untuk memberikan arah strategis, memastikan tujuan tercapai, mengelola risiko dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab dengan akuntabilitas.

Perguruan tinggi adalah bagian sektor publik yang semakin menyadari akan pentingnya konsep *governance* (Indrajit & Djokopranoto, 2006). Konsep tata kelola

universitas diturunkan dari konsep *good governance* secara umum (Risanty & Kesuma, 2019). Tata kelola di perguruan tinggi sebagai proses pengambilan keputusan untuk membuat peraturan dan yang mengatur perilaku dan hubungan antara berbagai anggota perguruan tinggi atau komunitas universitas. Dalam tata kelola universitas melibatkan keputusan tentang tujuan dasar atau misi universitas, tentang kebijakan (nilai) yang harus dicapai dengan murni dari misi dasar, tentang program yang akan dilakukan dan tentang sumber daya yang akan diperoleh dan dimanfaatkan. Tata kelola juga melibatkan keputusan tentang tujuan pendaftaran, pengaturan organisasi, standars yang disepakati, persyaratan fasilitas, kebutuhan informasi, alokasi anggaran, dan proses evaluasi. Widjajanti & Sugiyanto (2015) menjelaskan bahwa tata kelola universitas yang baik akan berdampak pada tingkat kepercayaan *stakeholders*.

### Implementasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Badan Hukum

Konsepsi Pendidikan Tinggi di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, memberikan otonomi kepada perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Otonomi dimaksud: 1) Otonomi di bidang akademik; dan 2) Otonomi di bidang non akademik, yang salah satunya meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, salah satunya bidang keuangan. Otonomi non-akademik (pengelolaan) untuk meningkatkan mutu pendidikan dilaksanakan melalui prinsip GUG. kebebasan yang bertanggungjawab dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan (*delegation of authority*) melalui otonomi dalam pengertian keseluruhan kemampuan institusi untuk mencapai misinya berdasarkan pilihannya sendiri.

Perguruan tinggi yang otonom, dipersyaratkan memiliki kepastian tentang GUG. Akuntabilitas berupa transparansi *check and balance*, harus menjadi jiwa dalam tata kelola. Harus dijamin adanya organisasi yang tertib yang mampu memepertanggung jawabkan setiap sen uang di universitas. keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan relevansinya dengan kegiatan akademik.

Dengan otonomi ini perguruan tinggi juga dapat menyusun program kerja pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Selain itu, dapat pula menyusun penelitian yang bermanfaat, pengabdian kepada masyarakat, organisasi yang sesuai, sumber daya manusia yang kompeten, sarana-prasarana yang memadai dan dirumuskan visi, misi, tujuan, sasaran yang dirancang dalam rancangan kerja tahunan, rencana operasional, dan strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mencapai puncak keunggulan karya-karya ilmiah yang dihasilkan. Irianto (2012) mengatakan bahwa otonomi perguruan tinggi akan menumbuhkan budaya akademik yang mengajarkan nilai-nilai ilmu pengetahuan, argumentasi dasar ilmiah dalam setiap pengambilan keputusan. budaya akademik yang demikian akan melahirkan hubungan kolegial yang egaliter dan sehat atas dasar saling menghormati dan memberdayakan di antara para ilmuan. Apabila perguruan tinggi dijadikan bagian dari birokrasi pemerintah, akan tumbuh budaya birokrasi yang lamban, tidak efisien dan korup. Perguruan tinggi di indonesia akan semakin tidak mampu

mengejar perkembangan ilmu dan akan kalah bersaing dengan perguruan tinggi di dunia. Peran negara masih sangat besar dalam pengelolaan perguruan tinggi negeri di Indonesia (Soetjipto dkk, 2014).

PTN di Indonesia dalam perkembangannya mengalami perubahan bentuk dan landasan hukum tata kelolanya. Diawali dengan satker pemerintah, satker pengelolaan keuangan badan layanan umum selanjutnya disebut PTN-BLU, satker perguruan tinggi badan hukum milik negara selanjutnya disebut PTN-BHMN, dan terakhir satker perguruan tinggi badan hukum selanjutnya disebut PTN-BH. Dalam kerangka reformasi keuangan negara berdasarkan UU No.17/2003 Tentang Keuangan Negara, UU No.1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.15/2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Sistem keuangan PTN-BH selama ini masih kurang fleksibel dan dikhawatirkan akan menghambat perkembangan yang ada. Seharusnya sistem keuangan PTN-BH bisa secara mandiri dalam bidang akademik maupun non akademik, tetapi pada kenyataannya keuangan pun tidak mandiri karena diatur dengan Kemenkeu. Kemudian dicarikan solusi dengan PP 58/2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN-BH yang sudah diregulasi, maka diharapkan bisa dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut, Selain itu, lanjutnya, perbedaan mendasar antara PTN-BLU dengan PTN-BH terletak pada otonomi akademis yang diberikan, yaitu PTN-BH dapat lebih mandiri dalam membuka dan menutup program studi yang ada di lembaganya, Sedangkan dari aspek keuangan, kewenangan pengelolaan keuangan PTN BLU semuanya swakelola tetapi harus masuk ke APBN dan penentuan honor sangat diatur oleh Kementerian Keuangan.

PTN BLU tidak diperbolehkan mempunyai regulasi sendiri dan rektor juga tidak diberi kewenangan membuat peraturan, sedangkan untuk mengelola keuangan PTN-BH bisa lebih fleksibel dengan tetap melaporkannya kepada Kemenristekdikti selaku satker vertikal di atasnya (Laily, 2015). Saat ini penerapan pengelolaan keuangan berbasis kinerja melalui BLU pada PTN masih menimbulkan berbagai permasalahan. Pertama sulitnya PTN untuk beradaptasi dengan sistem pengelolaan keuangan BLU sehingga perbaikan kinerja tidak berjalan baik. Kedua, peraturan yang rumit dan tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang kompeten. Hal tersebut menjadi dasar dari adanya keraguan dalam pelaksanaan BLU dimana BLU yang diterapkan pada PTN masih menjumpai berbagai permasalahan sehingga dianggap belum mampu mengembangkan pendidikan dan perekonomian Indonesia. Berdasarkan ulasan tersebut, maka muncul suatu rumusan permasalahan yaitu apakah kekayaan negara dapat dikelola dengan baik oleh PTN sebagai badan layanan umum dalam pengembangan pendidikan dan perekonomian Indonesia.

Data audit BPK laporan hasil pemeriksaan tahun 2015 atas laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014, menunjukkan banyak ketidakteraturan dalam penggunaan anggaran negara di beberapa perguruan tinggi. Tabel 2 menunjukkan beberapa temuan terkait tata kelola di perguruan tinggi negeri.

**Tabel 2. Aspek Ketidakteraturan Penggunaan Anggaran Universitas**

No	Perguruan Tinggi	Aspek Ketidakteraturan
1	UNAIR, ITSN, UNP, UNANDA, UPI	Terdapat Lebih Bayar Gaji Dan Tunjangan Sebesar Rp1,45 Milyar dan Potensi Lebih Bayar Gaji Kepada Pegawai Sebesar Rp365,85 juta
2	UNAIR, UNPAD, UGM,	Terdapat 540 Rekening Pemerintah dengan Saldo Per 31 Desember 2014 senilai Rp565,60 Miliar dan US1,06 Belum Memiliki Ijin dari Menetri Keuangan dan Kas BLU
3	ITSN, UNPAD, UNM, UNHAS, UNDIP	Aset Senilai Sekurang-kurangnya Rp218,94 Miliar pada 13 Satuan Kerja Dikuasai oleh dan/atau Dalam Sengketa dengan Pihak Lain
4	UNAIR, UNPAD, UNM, ITB, UT, UNAND, UNP, UNY, UPI, ITSN, UI.	Aset Tanah Seluas 2.137.394 m2 Minimal Senilai Rp1,16 Triliun dan Aset Peralatan dan Mesin Sebanyak 275 Unit Minimal Senilai Rp17,74 Miliar pada Sejumlah Satuan Kerja Belum Didukung Bukti Kepemilikan Berupa Sertifikat/BPKB dan atau Bukti Sertifikat/BPKB Masih Atas Nama Pihak Lain
5	UNPAD, UNM, UNP, UNAND, UGM, UNY, IPB, UI, UNDIP, USU, UNM, UPI	Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Atas Kegiatan Belanja Modal pada 12 Satuan Kerja sebesar Rp3,47 Miliar
6	UNPAD, UNAIR, ITSN, UNP,	Pertanggungjawaban Belanja Barang pada Enam Satuan Tidak Akuntabel atau Dilengkapi Bukti yang Valid Senilai Rp52,36 Miliar

Sumber: LHP BPK, tahun 2015

Menurut Irianto (2012) universitas yang baik dipersyaratkan memiliki kepastian tentang *governance*. Tidak dapat dihindari bahwa universitas merupakan entitas yang utuh dalam tata kelolanya dan tidak terlepas dari aspek keuangan. Universitas harus dikelola secara profesional layaknya mengelola bisnis dalam suatu industri, akan tetapi memegang teguh komitmennya untuk tidak mencari keuntungan yang dibagikan, oleh karenanya keuntungan yang diperoleh harus dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan dan pengembangan universitas tidak mencari keuntungan yang dibagikan. Penting bagi perguruan tinggi untuk terus meningkatkan tata kelolanya (Abdul, 2016). Perguruan tinggi yang mampu menerapkan tata kelola yang baik akan mampu meningkatkan kinerja manajemen keuangannya (Wahyudin dkk, 2017).

Fenomena belum terimplementasinya prinsip-prinsip *university governance* di Indonesia dapat dilihat adanya banyak temuan berkaitan dengan pengelolaan keuangan pendidikan. Hasil kajian yang dilakukan oleh Inspektorat VI Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Keblagu udayaan terhadap 43 universitas dengan jumlah responden 390 unit kerja, terdiri dari 198 fakultas, 15 program pascasarjana, 134 lembaga/UPT, dan 43 pusat/rektorat menunjukkan bahwa pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Perguruan Tinggi Negeri (PNBP PTN) pada umumnya belum efektif, hal ini dapat dibuktikan bahwa 90 (23,08%) responden yang pengelolaan PNBP-nya efektif, 261 (66,92%) responden kurang efektif dan 39 (10%) responden tidak efektif.

Belum efektifnya pengelolaan PNBP di Universitas dipengaruhi oleh faktor-faktor kebijakan pimpinan yang tidak tertulis dan tidak tersosialisasi, sumber-sumber penerimaan PNBP, penetapan tarif penerimaan maupun penggunaan, pendapatan pengelolaan PNBP,

serta belum efektifnya penerapan sistem informasi akuntansi. Perlu adanya sebuah sistem yang berfungsi untuk mengawal dan memberi arahan yang konkret untuk setiap kebijakan-kebijakan pimpinan institusi. Pada akhirnya sistem informasi akuntansi menjadi sangat diperlukan dan diterapkan guna menuju institusi yang sehat dan bersih dalam berbagai bidang di dalamnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No: 119/PMK.05/2007 pasal 5, pola tata kelola merupakan peraturan internal universitas yang menetapkan bahwa organisasi dan tata laksana mencakup struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, ketersediaan dan pengembangan sumber daya manusia serta efisiensi biaya. Akuntabilitas mencakup kebijakan mekanisme/prosedur, media pertanggungjawaban, dan periodisasi pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan transparansi, dengan menerapkan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kemudahan memperoleh informasi bagi yang membutuhkan (Muljo dkk, 2014). Pasal 115 Ayat (1) PP No.60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, otonomi dalam bidang keuangan bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah mencakup kewenangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal secara langsung dari masyarakat. Ayat (3) PP No.60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, pembukuan keuangan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 116 Ayat (1) PP No.60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, rencana anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, setelah disetujui oleh senat perguruan tinggi diusulkan oleh rektor/ketua/direktur melalui menteri, menteri lain, atau pimpinan lembaga pemerintah lain kepada Menteri Keuangan untuk disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja. Selama ini PTN non BHMN harus menyetorkan dulu ke kas negara seluruh dana yang diterima karena penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat, yaitu: (a) sumbangan pembinaan pendidikan (SPP); (b) biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi; (c) hasil kontrak kerja sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi; (d) hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi; (e) sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah; dan (f) penerimaan dari masyarakat lainnya adalah merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang harus disetor ke Kas Negara secepatnya dan penggunaan dana tersebut dikembalikan ke kampus lewat rektor melalui mekanisme DIPA/RKAKL. Selain memerlukan waktu yang cukup panjang dan birokratis, proses ini tidak efektif dan efisien terutama apabila perguruan tinggi bersangkutan mendapatkan sumbangan atau hibah atas nama pribadi. Tentu kalau harus setor dahulu ke kas negara akan sangat menyulitkan PTN. Apabila menggunakan sistem yang selama ini berlaku, PTN diwajibkan setor dahulu ke Kas Negara.

## SIMPULAN

Implementasi tata kelola perguruan tinggi badan hukum masih belum sepenuhnya membentuk karakter yang budaya organisasi yang baik dalam hal kepatuhan dan keteraturan dalam rangka pelayanan dan kinerja sebagaimana dicita citakan. Perubahan bentuk hukum dalam landasan operasional keuangan belum sepenuhnya bisa diimplementasikan sebaiknya menimbulkan berbagai permasalahan terkait implementasi anggaran. Penelitian selanjutnya bisa menambah perspektif sehingga lebih baik.

## PUSTAKA ACUAN

- Abdul, A. J. (2016). Penguatan Tata Kelola Kelembagaan IAIN Menuju IAIN Ambon Bermutu Melalui Pelaksanaan Good University Governance. *Jurnal Fikratuna*, 8(2), 22-35.
- IIA. (2006). *The Role of Auditing in Public Sector Governance*. The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Maitland avenue Almonte Spring.
- IFAC. (2001). *Governance in The Public Sector: A Governing Body Perspective*. IFAC Public Sector Commite.
- Indrajit, R. E., & Djokopranoto, R. (2006). *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Irianto, S. (2012). *Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan*. Cet.2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Laily, I. (2015). *Menristekdikti: Keuangan PTN-BH kurang fleksibel*. Diperoleh dari sumber: <http://www.antaraneews.com/>.
- Muljo, H. H., Wicaksono, A., & Riantono, I. E. (2014). Optimalisasi Penerapan Prinsip Good Governance Bidang Akademik Dalam Upaya Mewujudkan Good University Governance. *Binus Business Review*, 5(1), 91-100.
- OECD. (2004). *The OECD Principlew of Corporate Governance*. New York: OECD.
- Risanty, R., & Kesuma, S. A. (2019). Good University Governance: Experience from Indonesian University. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 6(4), 515-524.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Soetjipto, A., Seda, F. E., Noor, I. R., Wardani, S. B. E., & Soebagjo, N. (2014). Otonomi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri Studi Kasus di Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 16(2), 293-304.
- UNDP. (1997). *Governance for suistainable Development Policy Document*. New York: UNDP.
- Wahyudin, A., Nurkhin, A. & Kiswanto. (2017). Hubungan Good University Governance Terhadap Kinerja Manajemen Keuangan Perguruan Tinggi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 21(1), 60-69.

Widjajanti, K., & Sugiyanto, E. K. (2015). Good University Governance untuk Meningkatkan Excellent Service dan Kepercayaan Mahasiswa (Studi Kasus Fakultas Ekonomi Universitas Semarang). *Jurnal Dinamika Sosbud*, 17(2), 69-81.

## **PETUNJUK PENULISAN NASKAH BERKALA ILMIAH AKUNTABILITAS**

1. Tulisan merupakan karya orisinal penulis (bukan plagiasi) dan belum pernah dipublikasikan atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah berupa artikel hasil penelitian;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia dan Inggris;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam bidang ilmu akuntansi;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
  - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
  - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dan email;
  - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris antara 100- 150 kata;
  - d. Sistematika penulisan
    - 1) Judul;
    - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi kelembagaan penulis, dan *e-mail*;
    - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, antara 100-150 kata. Abstrak berisi mengenai selintas tentang latar belakang studi, tujuan penelitian, metode, hasil umum yang didapat, dan implikasi hasil;
    - 4) Kata kunci, antara 2-5 konsep;
    - 5) Pendahuluan: berisi latar belakang mengenai topik yang akan diangkat. Sehingga, pendahuluan harus secara jelas menunjukkan apa yang menjadi kesenjangan penelitian (*research gap*), kebaruan (*novelty*), dan tujuan penelitian;
    - 6) Metode. Pada bagian ini membahas mengenai data dan teknik analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian ini;
    - 7) Hasil dan Pembahasan. Bagian ini menampilkan hasil empiris dari penelitian, serta analisis yang ditunjang oleh perbandingan antara temuan penelitian dengan studi-studi terdahulu;
    - 8) Simpulan. Bagian ini menjelaskan apakah tujuan penelitian sudah terjawab dengan baik atau belum, serta implikasi kebijakan yang ditawarkan;
    - 9) Pustaka acuan. Pustaka acuan menunjukkan literatur yang dipergunakan dalam penelitian ini. Pustaka acuan menggunakan APA style 6th edition. Penulis dianjurkan menggunakan referensi manajemen seperti Mendeley dan Zotero dalam pengutipan dan pustaka acuan.
  - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah ukuran A4, margin: atas 3 cm, bawah 3 cm, kiri 3 cm, dan kanan 3 cm;
  - f. Panjang Naskah antara 15 s.d. 20 halaman, spasi 1, huruf Cambria, ukuran 12;

- g. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh:
    - Al Arif, M. N. R. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia
    - Al Arif, M.N.R & E. Amalia. (2010). *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
    - Amalia, E, dkk. (2012). *Potret Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramata
  - 2) Jurnal, contoh:
    - Al Arif, M. N. R. (2014). Tipe Pemisahan dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Aset Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan. *Kinerja*, 18(2), 168-179.
    - Al Arif, M.N.R. & T. Nurashah. (2015). Customer Relationship Management dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah Bank: Studi Pada Bank Muamalat Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(1), 51-64
- h. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
- i. Penggunaan bahasa Indonesia. Para penulis harus merujuk kepada ketentuan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan EYD, antara lain:
- 1) Penulisan huruf kapital
    - a) Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat;
    - b) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung;
    - c) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan nama kitab suci, termasuk ganti untuk Tuhan;
    - d) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang;
    - e) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat;
    - f) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang;
    - g) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa-bangsa dan bahasa. Perlu diingat, posisi tengah kalimat, yang dituliskan dengan huruf kapital hanya huruf pertama *nama bangsa, nama suku, dan nama bahasa*; sedangkan huruf pertama kata *bangsa, suku, dan bahasa* ditulis dengan huruf kecil;
    - h) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah;
    - i) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas dalam geografi;
    - j) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, nama resmi badan/lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan, serta nama dokumen resmi;
    - k) Huruf kapital dipakai sebagai huruf kapital setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan/lembaga;
    - l) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua unsur kata ulang sempurna) dalam penulisan nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, *kecuali* kata seperti *di, ke, dari, dan, dalam, yang, untuk* yang tidak terletak pada posisi awal;
    - m) Huruf kapital *tidak* dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam penyapaan;
    - n) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan;
    - o) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti *Anda*.

- 2) Penulisan tanda baca titik (.)
  - a) Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf pengkodean suatu judul bab dan subbab;
  - b) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu dan jangka waktu;
  - c) Tanda titik *tidak* dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah;
  - d) Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka;
  - e) Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya;
  - f) Tanda titik *tidak* dipakai pada akhir judul, misalnya judul buku, karangan lain, kepala ilustrasi, atau tabel;
  - g) Tanda titik *tidak* dipakai di belakang (1) alamat pengirim atau tanggal surat atau (2) nama dan alamat penerima surat.
- 3) Penulisan tanda koma (,)
  - a) Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan;
  - b) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti *tetapi* atau *melainkan*;
  - c) Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya;
  - d) Tanda koma harus dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat, seperti *oleh karena itu*, *jadi*, *lagi pula*, *meskipun begitu*, *akan tetapi*;
  - e) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti *o*, *ya*, *wah*, *aduh*, *kasihan* dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat;
  - f) Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat;
  - g) Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki;
  - h) Tanda koma dipakai di antara orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga;
  - i) Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi;
  - j) Tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat;
  - k) Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru.
- 4) Tanda titik koma (;)
  - a) Tanda titik koma untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara;
  - b) Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk;
  - c) Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat kompleks yang tidak cukup dipisahkan dengan tanda koma demi memperjelas arti kalimat secara keseluruhan.
- 5) Penulisan huruf miring
  - a) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan;
  - b) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata;
  - c) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata ilmiah atau ungkapan asing, *kecuali* yang sudah disesuaikan ejaannya.

- 6) Penulisan kata dasar  
Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan.
  - 7) Penulisan kata turunan
    - a) Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasarnya;
    - b) Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan, atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya;
    - c) Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai.
  - 8) Bentuk ulang  
Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung.
  - 9) Gabungan Kata
    - a) Gabungan kata yang lazim disebutkan kata majemuk, termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah;
    - b) Gabungan kata, termasuk istilah khusus, yang mungkin menimbulkan salah pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang berkaitan;
    - c) Gabungan kata berikut ditulis serangkai karena hubungannya sudah sangat padu sehingga tidak dirasakan lagi sebagai dua kata;
    - d) Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai.
  - 10) Kata ganti *ku, kau, mu, dan nya*  
Kata ganti *ku* dan *kau* sebagai bentuk singkat kata *aku* dan *engkau*, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya.
  - 11) Kata depan *di, ke, dan dari*  
Kata depan *di, ke, dan dari* ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, *kecuali* di dalam gabungan kata yang sudah dianggap kata yang sudah dianggap sebagai satu kata seperti *kepada* dan *daripada*.
  - 12) Kata sandang *si* dan *sang*  
Kata *si* dan *sang* ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.
  - 13) Penulisan partikel
    - a) Partikel *-lah* dan *-kah* ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya;
    - b) Partikel *pun* ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya;
    - c) Partikel *per* yang berarti (demi), dan (tiap) ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya.
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
  7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya enam bulan sebelum waktu penerbitan. Artikel dikirimkan melalui online submission: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/user/register>.